

RENCANA STRATEGIS 2018 -2023



**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TANAH LAUT**



TAHUN 2018



B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 188.45/ -KUM/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2018 - 2023
BUPATI TANAH LAUT

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TANAH LAUT Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TANAH LAUT Tahun 2018-2023 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TANAH LAUT Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan

Keputusan Bupati TANAH LAUT tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TANAH LAUT Tahun 2018-2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten TANAH LAUT Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten TANAH LAUT Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten TANAH LAUT Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten TANAH LAUT Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten TANAH LAUT Nomor 25);
8. Peraturan Bupati TANAH LAUT Nomor 84 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TANAH LAUT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati TANAH LAUT tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TANAH LAUT Tahun 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU

- : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TANAH LAUT Tahun 2018-2023, mempunyai tugas :
1. Melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang dimasyarakat.
 2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TANAH LAUT.
 3. Melakukan pengkajian evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TANAH LAUT Tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TANAH LAUT Tahun 2013-2018.
 4. Melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TANAH LAUT.
 5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TANAH LAUT.
 6. Melaksanakan penyelarasan Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TANAH LAUT dengan arah rencana pembangunan Kabupaten TANAH LAUT.
 7. Melaksanakan penyusunan dan penajaman terhadap Indikator Kinerja Utama dan target kinerja Program/Kegiatan sampai dengan Pohon Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TANAH LAUT.

8. Melaksanakan sinkronisasi Program dan Kegiatan melalui pelaksanaan forum perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan dengan pemangku kepentingan terkait.
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TANAH LAUT Tahun Anggaran 2018, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyusunan Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada Tanggal

BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

TEMBUSAN :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten TANAH LAUT;
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten TANAH LAUT;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2018-2023**

No.	Nama/NIP	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Tim
1.	Ir. Suharyo	Kepala SKPD	Penanggung Jawab
2.	Ir. M. Razif Lufthy	Plt. Sekretaris	Ketua Tim
3.	Ikhwansyah, SP	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	Sekretaris
4.	Drh. M. Taufik	Kabid Keswan, Kesmavet, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	Anggota Pokja
5.	Lukman Effendy, S.Pt. MP	Kabid Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak	Anggota Pokja
6.	Ir. M. Razif Lufthy	Kabid Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	Anggota Pokja

BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

KATA PENGANTAR***Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,***

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia serta ridho-Nya, maka Kami dapat melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 - 2023, sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 - 2023.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, yang merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan.

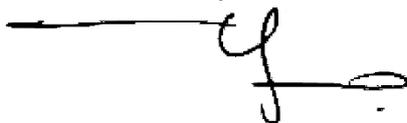
Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut ini.

Masukan, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut ini, umumnya untuk peningkatan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan peternakan Kabupaten Tanah Laut.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Tanah Laut, Februari 2019

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tanah Laut,



Ir. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUN RENSTRA	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan	3
4. Sistim Matika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	5
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	25
3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	25
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	39
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	44
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	45
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	47
3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Provinsi	52
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	54
5. Penentuan Isu - Isu Strategis	59
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	63
1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	63
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
1. Strategi	66
2. Arah Kebijakan	66
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	70
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	79
BAB VIII. P E N U T U P	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
1	Alur Perencanaan Pembangunan Daerah	2
2	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	24
3	Gambar unsur pembentuk wilayah sebagai syarat aktifitas Pembangunan wilayah	56

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1	Sebaran Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ..	25
2	Komposisi dan perbandingan Pegawai Berdasarkan Pendidikan..	26
3	Tenaga Pendukung Pelaksana Kegiatan Insiminsi Buatan (IB)	26
4	Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	27
5	Jenis Pelayanan Umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan..	29
6	Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	30
7	Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	31
8	Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	32
9	Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	33
10	Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	36
11	Jumlah Produk Hasil Ternak Besar dan Kecil yang Keluar dari Kabupaten Tanah Laut	41
12	Jumlah Produksi Daging di Kabupaten Tanah Laut	41
13	Jumlah Produk Hasil Ternak Unggas yang Keluar dari Kabupaten Tanah Laut	42
14	Populasi Ternak di Kabupaten Tanah Laut	43
15	Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	47
16	Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	51
17	Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.	52
18	Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan	53
19	Klasifikasi tema Isu Strategis Hasil FGD Multi Pihak	56
20	Pemilihan Isu Strategis Utama dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut	57
21	Rumusan Isu Strategis Utama, Permasalahan serta sasaran strategis Pembangunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023..	58
22	Analisis SWOT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut	61
23	Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	65
24	Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	68

25	Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019	71
26	Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2023	75
27	Tabel T-C.28. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Uraian	Halaman
1	Cascading/Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	84

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang Berkarya, Inovatif, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergis .

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, Dinas Peternakan mempunyai fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan sektor peternakan.

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut adalah dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

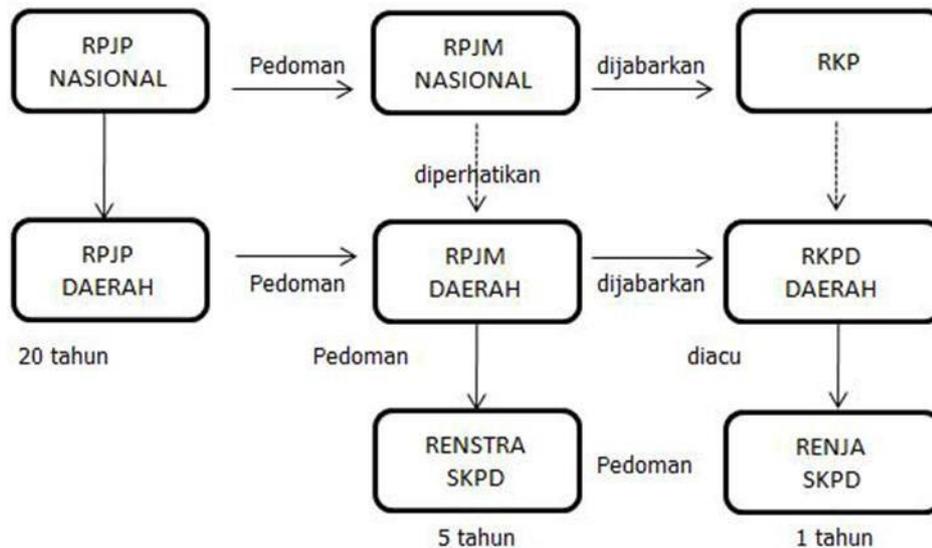
Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Provinsi yang menangani bidang peternakan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut, serta memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hasil evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Periode 2013-2018, serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang peternakan, baik pada tingkat global, nasional, maupun regional.

Proses penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan Renstra, rancangan akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan dengan tahapan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 tidak terlepas dari tugas dan fungsi serta kewenangan unit kerja teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa unit kerja teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU No. 25/2004



Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan, bahwa penyusunan Renstra SKPD tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah dan Renstra K/L.

Berpedoman pada dokumen menurut alur perencanaan tersebut, maka Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 disusun hingga menjadi sebuah dokumen yang akan menjadi acuan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

2. Landasan Hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional yang dalam hal ini termasuk pula perencanaan pembangunan di daerah, maka perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mengamanatkan bahwa dalam perencanaan pembangunan di daerah perlu disusun Rencana Strategis Daerah yang dimuat dalam masing-masing Rencana Strategis SKPD. Selain itu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut juga didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
13. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/687/Bappeda/2018, tanggal 10 Desember 2018, tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;

3. Maksud dan Tujuan.

3.1. Maksud

Maksud dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

- Peningkatan Kinerja Penyelenggara Bidang Peternakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Target Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah serta Target Sasaran Pembangunan Nasional.
- Memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi seluruh komponen jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyusun kegiatan dan menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Daerah dalam lima tahun periode RPJMD kedepan.

3.2. Tujuan

Tujuan dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

- Menjabarkan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Peternakan;
- Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta pihak terkait dalam upaya peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Peternakan.

- Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

- BAB I. : PENDAHULUAN**
Mendeskripsikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Sistematika Penulisan.
- BAB II. : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.**
Mendeskripsikan tentang peran (tugas dan fungsi) dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.
- BAB III. : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.**
Mendeskripsikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV. : TUJUAN DAN SASARAN**
Mendeskripsikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
- BAB V. : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Mendeskripsikan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI. : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Mendeskripsikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (perumusan rancangan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**
Mendeskripsikan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : PENUTUP**
Mendeskripsikan mengenai saripati dari seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya, disertai dengan harapan-harapan dalam mengimplementasikan ke depan yang lebih baik.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2016 tentang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan kegiatannya Dinas dipimpin seorang Kepala Dinas, yang secara taktis operasional dan teknis administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan masing-masing bidang kerja di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kegiatan operasional dalam rangka penyelenggaraan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Kepala Dinas bersama-sama dengan Sekretaris beserta Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang beserta kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Setiap pimpinan dibidang kerja lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi kerja di bawahannya atau pegawai yang membantu dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, serta akuntabilitas.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPT Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan peternakan dan Kesehatan Hewan, mengkoordinasikan kegiatan produksi peternakan, bina usaha peternakan dan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Tugas :

- a. Menetapkan Renstra dan rencana kerja tahunan Dinas sesuai dengan program kerja Bupati Tanah Laut;
- b. Menetapkan kebijakan dan melaksanakan dalam rangka pembinaan dibidang kesekretaiatan dan peternakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;

- c. Merumuskan kebijakan umum berkenaan dengan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat Veteriner pasca panen dan pengolahan hasil
- d. Merumuskan kebijakan dalam rangka pembinaan bidang perbibitan, Produksi dan Pakan;
- e. Merumuskan kebijakan dalam rangka pembinaan bidang Kelembagaan, Usaha, prasarana dan sarana ;
- f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pada kegiatan produksi peternakan;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan peternakan dan urusan pemerintahan di daerah;
- h. Mengkoordinir kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- i. Mempelajari pengelolaan anggaran/keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas sebagai pengguna anggaran;
- j. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

1.2. Sekretaris

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyusunan program kerja dan perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian, memberikan pelayanan teknis administratif, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategik;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1.2.1. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

Memimpin sub bagian dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan, Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan lingkup Dinas

Peternakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai yang direncanakan dan tepat waktu.

Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran Dinas;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyaian data dan statistic Dinas;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, LPPD, LKPJ dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin
Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. Melaksanakan administrasi keuangan;
- n. Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1.2.2. Kasubbag Umum Kepegawaian

Memimpin sub bagian dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum (surat menyurat, kearsipan, humas, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan barang milik daerah) dan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;

- c. Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang
- m. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
- n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1.3. Kepala Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan

Memimpin bidang dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Perbibitan, Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana Operasional bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada bidang perbibitan, produksi dan pakan
- c. Memberikan Petunjuk Pelaksanaan Tugas kepada bawahan pada bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak
- d. Menyelia Pelaksanaan tugas bawahan bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak secara berkala
- e. Melaksanakan penyusunan bahan , koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak
- f. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pelaksanaan pelayanan bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak.
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak dengan cara membandingkan antara rencana oprasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

1.3.1. Kepala Seksi Budidaya Ternak

Memimpin Kepala Seksi dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan

Pembinaan dan pengembangan budidaya ternak, fasilitasi, me mantau dan mengevaluasi pengembangan dan peningkatan Populasi, produksi dan penyebaran ternak, mengidentifikasi calon penggaduh dan calon lokasi penyebaran ternak di wilayah Kabupaten.

Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Budidaya Ternak;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan budidaya ternak;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan budidaya ternak;
- d. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang budidaya ternak dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- e. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data budidaya ternak;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang budidaya ternak;
- g. Melaksanakan identifikasi CPCL (Calon Penerima Calon lokasi) untuk memperoleh nominasi kelompok tani;
- h. Melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan untuk kelompok tani terpilih;
- i. Melaksanakan pendistribusian bibit ternak kepada kelompok tani terpilih;
- j. Melaksanakan Pemantauan dan Pelaporan Ternak Pemerintah;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Budidaya ternak ; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya;

1.3.2. Kepala Seksi Perbibitan

Memimpin Kepala Seksi dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Pembibitan ternak, fasilitasi pengembangan bibit unggul, menyiapkan bahan pembinaan , melakukan pengkajian, pengembangan penerapan standar pembibitan ternak, peningkatan produksi ternak bibit, penyebaran ternak bibit, identifikasi wilayah sumber bibit ternak dan pemantauan kelompok pembibitan wilayah Kabupaten.

Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perbibitan Ternak;
- b. Menyusun rencana koordinasi pembinaan metode inseminasi buatan (IB) dengan petugas Inseminasi Buatan agar terjalin kesamaan tujuan dan persepsi;
- c. Memberikan Petunjuk Pelaksanaan Tugas kepada bawahan pada Seksi Perbibitan ternak
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perbibitan ternak;
- e. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang perbibitan ternak dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

- f. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data perbibitan ternak;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbibitan ternak;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak;
- i. Melaksanakan kegiatan IB, PKB, ATR dan kelahiran yang masuk ;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan benih/bibit ternak;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan sumber daya genetic hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- l. Menyiapkan draf dan menerbitkan surat-surat keterangan yang berkenaan dengan perbibitan ternak;
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan ternak; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya;

1.3.3. Kepala Seksi Pakan Ternak

Memimpin seksi Pakan Ternak dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pakan ternak, fasilitasi, melakukan pengkajian, penerapan standar mutu pakan, peningkatan produksi, budidaya hijauan pakan ternak, sertifikasi mutu pakan ternak berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pakan Ternak;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pakan ternak;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pakan ternak dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data pakan ternak;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pakan ternak;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan dan peredaran pakan dan hijauan pakan ternak;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- h. Menyiapkan bahan, melaksanakan pengawasan pakan dan benih/bibit HPT;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian benih/bibit HPT;
- j. Memverifikasi rekomendasi pengujian sampel pakan dalam rangka uji edar;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pakan ternak; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya;

1.4. Kepala Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana

Memimpin Bidang dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan

Usaha dan Sarana, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan, teknologi dan mutu hasil, promosi dan pemasaran hasil peternakan wilayah Kabupaten.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana Operasional bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana
- c. Memberikan Petunjuk Pelaksanaan Tugas kepada bawahan pada bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana dan pengolahan hasil.
- d. Menyelia Pelaksanaan tugas bawahan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana secara berkala
- e. Melaksanakan penyusunan bahan , koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana
- f. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pelaksanaan pelayanan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana dengan cara membandingkan antara rencana oprasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.4.1. Kepala Seksi Usaha, Promosi dan Investasi

Memimpin Kepala Seksi dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, memfasilitasi pengembangan agribisnis, permodalan (perbankan, pemerintah dan swasta), promosi dan investasi usaha, kemitraan dan pelayanan perijinan usaha peternakan, pengolahan dan penanganan pasca panen serta mutu hasil peternakan.

Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Usaha, Promosi dan Investasi;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan usaha, promosi dan investasi;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang usaha, promosi dan investasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data usaha, promosi dan investasi
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan seksi usaha, promosi dan investasi;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan promosi dan investasi peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proyeksi peta usaha peternakan dan kesehatan hewan;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi usaha, promosi dan investasi; dan

- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

1.4.2. Kepala Seksi SDM, Kelembagaan, Data dan Informasi

Memimpin sub bagian dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan peningkatan SDM, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi peternakan di wilayah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sumber Daya manusia, Kelembagaan, Data dan Informasi;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sumber daya manusia, kelembagaan, data dan informasi;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang sumber daya manusia, kelembagaan, data dan informasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data sumber daya manusia, kelembagaan, data dan informasi;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, data dan informasi;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas penyuluhan;
- g. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan;
- h. Melaksanakan penyiapan data dan informasi terkait peternakan dan kesehatan hewan;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi sumber daya manusia, kelembagaan, data dan informasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

1.4.3. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana

Memimpin seksi Sarana dan Prasarana dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana, fasilitasi analisa dampak lingkungan, pelaksana uji lapangan, penerapan teknologi anjuran di bidang usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah Kabupaten.

Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan prasarana dan sarana;

- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang prasarana dan sarana dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Menyiapkan bahan perumusan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- f. Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Melaksanakan, menyiapkan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan dalam hal hibah kepada kelompokm tani;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi prasarana dan sarana dan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

1.5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Memimpin bidang dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil di wilayah Kabupaten.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana Operasional bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil ;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- c. Memberikan Petunjuk Pelaksanaan Tugas kepada bawahan pada bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan;
- d. Menyelia Pelaksanaan tugas bawahan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil secara berkala;
- e. Melaksanaan penyusunan bahan , koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- f. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pelaksanaan pelayanan bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil dengan cara membandingkan antara rencana oprasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak ;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

1.5.1. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Memimpin Kepala Seksi dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pembinaan dan Pengawasan, fasilitasi

Kesehatan Masyarakat Veteriner, Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas, Produk Peternakan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis wilayah Kabupaten Tanah laut.

Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang kesehatan masyarakat veteriner dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesehatan masyarakat veteriner;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi produk hewan;
- g. Menyiapkan bahan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan penularan zoonis;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1.5.2. Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Memimpin sub bagian dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengamatan dan penyidikan penyakit, pembinaan dan fasilitasi pengamatan dan penyidikan penyakit, mengkoordinasi, pengkajian, pengamatan, penyidikan, pemetaan, epidemiologi penyakit hewan, pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Tanah Laut. berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan hewan;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang kesehatan hewan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesehatan hewan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;

- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- h. Menyiapkan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan, penutupan dan pembukaan darah wabah penyakit hewan menular;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- l. Menyiapkan bahan dan menelaah rekomendasi penerbitan izin usaha distributor obat hewan;
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan; dan;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- o. Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

1.5.3. Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Memimpin seksi dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penanganan pasca panen, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi pengolahan hasil peternakan di wilayah Kabupaten.

Uraian Tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pasca panen dan pengolahan hasil;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pasca panen dan pengolahan hasil dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data pasca panen dan pengolahan hasil;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pasca panen dan pengolahan hasil;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPBO) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (skkp/skp) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang pasca panen dan pengolahan hasil;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen dan pengolahan hasil;

- n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1.6. Kepala UPTD Pasar Hewan dan RPH

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Dinas Peternakan, membina, mengelola dan mengkoordinasikan serta melaksanakan pelayanan bagi setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan transaksi jual beli ternak, Pengguna Fasilitas Pasar Ternak, Jasa Pelayanan (Pemeriksaan) Kesehatan Ternak, Promosi dan Pelayanan Informasi Pasar, Kebersihan Pasar dan Penanganan Limbah Pasar, Melakukan Pengawasan Terhadap Pengeluaran Ternak dan atau Ternak Bibit dari Wilayah Kabupaten Tanah Laut, pematangan hewan ternak dan penanganan daging, melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia.

Uraian Tugas :

- a. merumuskan visi, misi dan tujuan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan ;
- b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan berdasarkan Renstra/Renja Dinas peternakan Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman kerja;
- c. mendukung dan melaksanakan kebijakan umum dan teknis yang telah ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- e. menyiapkan bahan dan mengadakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan unit lain / instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- h. merencanakan, menyusun, mengendalikan, memantau mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- i. melaksanakan pelayanan transaksi jual beli;
- j. menyediakan fasilitas pasar ternak;
- k. melaksanakan pelayanan jasa pemeriksaan kesehatan ternak, inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan;
- l. melaksanakan pelayanan promosi dan informasi pasar peternakan secara on line;
- m. melaksanakan pemeliharaan kebersihan pasar ternak dan lingkungan sekitarnya serta penanganan limbah;
- n. melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran ternak dan atau ternak bibit dari wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- o. merencanakan kegiatan pemeriksaan (ente mortem) ternak yang akan dipotong;
- p. merencanakan kegiatan, pemeriksaan setelah dipotong (post mortem);
- q. melaksanakan pengamatan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya;

- r. menyelenggarakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif;
- s. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan proses produksi yang aman sehat utuh halal (ASUH);
- t. melakukan konsultasi veteriner serta memberikan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
- u. membantu Dinas Peternakan dalam mengelola penerimaan dan pendapatan daerah untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- v. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- w. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- x. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pasar Hewan Dan Rumah Potong Hewan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- y. menyiapkan bahan penyusunan usulan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelayanan Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- z. mengumpulkan dan menginventarisasikan data atau laporan tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang Pasar Hewan dan Rumah Potong hewan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- bb. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan pada wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- cc. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- dd. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- ee. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- ff. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- gg. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- hh. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ii. menerima laporan kinerja dari bawahan;
- jj. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan; dan
- kk. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1.6.1. Kasubbag Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung, Batu Ampar dan Panyipatan mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan urusan tata usaha umum, penyusunan program dan rencana kegiatan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Uraian Tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan langkah-langkah operasional Unit Pelaksana Teknis dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- c. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun program serta rencana kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran, penyelenggaraan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan mengelola pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik struktural, teknis maupun fungsional;
- h. menyiapkan bahan dan mengelola urusan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan kantor;
- i. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- j. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- k. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- l. mengelola arsip baik aktif, inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan apabila diperlukan;
- m. menghimpun usulan kegiatan guna penyusunan program kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- n. melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- o. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- p. memberikan layanan humas kepada pihak terkait dan masyarakat secara transparan dan akurat sesuai petunjuk atasan;
- q. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pengaduan/ keluhan masyarakat;
- r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- s. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan urusan suratmenyurat dan kearsipan, urusan kebersihan, keamanan kantor dan penyediaan fasilitas pelayanan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- u. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- v. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- w. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- x. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan bidang tugasnya;
- y. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan ketatausahaan umum dan kepegawaian;
- z. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- aa. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- bb. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- cc. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- dd. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan mendistribusikan/memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- ee. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai untuk pengembangan karier;
- ff. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- gg. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.7. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Dinas Peternakan, membina, mengelola dan mengkoordinasikan serta melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, melaksanakan pemeriksaan, diagnosa, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan hewan yang sakit.

Uraian Tugas :

- a. merumuskan visi, misi dan tujuan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan;
- b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan berdasarkan Renstra/Renja Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman kerja;
- c. mendukung dan melaksanakan kebijakan umum dan teknis yang telah ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan;
- e. menyiapkan bahan mengadakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan dengan unit lain / instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- g. merencanakan, menyusun, mengendalikan, memantau mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan;
- h. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
- i. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner secara berkala dan terpadu;
- j. melaksanakan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya;
- k. melakukan pengamatan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan pemantauan dan pelaporan kejadian penyakit hewan di wilayah kerjanya;
- m. melaksanakan pengambilan sample pada hewan dalam rangka mendiagnosa dan surveilans atau monitoring kejadian penyakit hewan di wilayah kerjanya;
- n. melaksanakan pelayanan pengembangan peternakan yang meliputi: pelaksanaan inseminasi buatan, diagnosa kebuntingan, menolong kelahiran, dan melakukan diagnose serta pengobatan gangguan reproduksi;
- o. melaksanakan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
- p. melakukan konsultasi veteriner serta memberikan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
- q. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- r. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- s. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Hewan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- t. menyiapkan bahan penyusunan usulan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
- u. mengumpulkan dan menginventarisasikan data atau laporan tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang Pusat Kesehatan Hewan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- v. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- w. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Pusat Kesehatan Hewan pada wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- x. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- y. menyiapkan bahan-bahan dan mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan;
- z. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- aa. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan;
- bb. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- cc. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai untuk pengembangan karier;
- dd. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ee. menerima laporan kinerja dari bawahan;
- ff. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada KepalaDinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- gg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1.7.1. Kasubbag Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung, Batu Ampar dan Panyipatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan urusan tata usaha umum, penyusunan program dan rencana kegiatan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Uraian Tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan langkah-langkah operasional Unit Pelaksana Teknis dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- c. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;

- d. menyiapkan bahan dan menyusun program serta rencana kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran, penyelenggaraan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan mengelola pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik struktural, teknis maupun fungsional;
- h. menyiapkan bahan dan mengelola urusan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan kantor;
- i. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- j. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- k. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- l. mengelola arsip baik aktif, inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan apabila diperlukan;
- m. menghimpun usulan kegiatan guna penyusunan program kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- n. melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- o. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- p. memberikan layanan humas kepada pihak terkait dan masyarakat secara transparan dan akurat sesuai petunjuk atasan;
- q. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pengaduan/ keluhan masyarakat;
- r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- s. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan urusan suratmenyurat dan kearsipan, urusan kebersihan, keamanan kantor dan penyediaan fasilitas pelayanan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- u. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- v. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- w. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- x. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan bidang tugasnya;

- y. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan ketatausahaan umum dan kepegawaian;
- z. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- aa. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- bb. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- cc. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- dd. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan mendistribusikan/memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- ee. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai untuk pengembangan karier;
- ff. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- gg. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
- hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

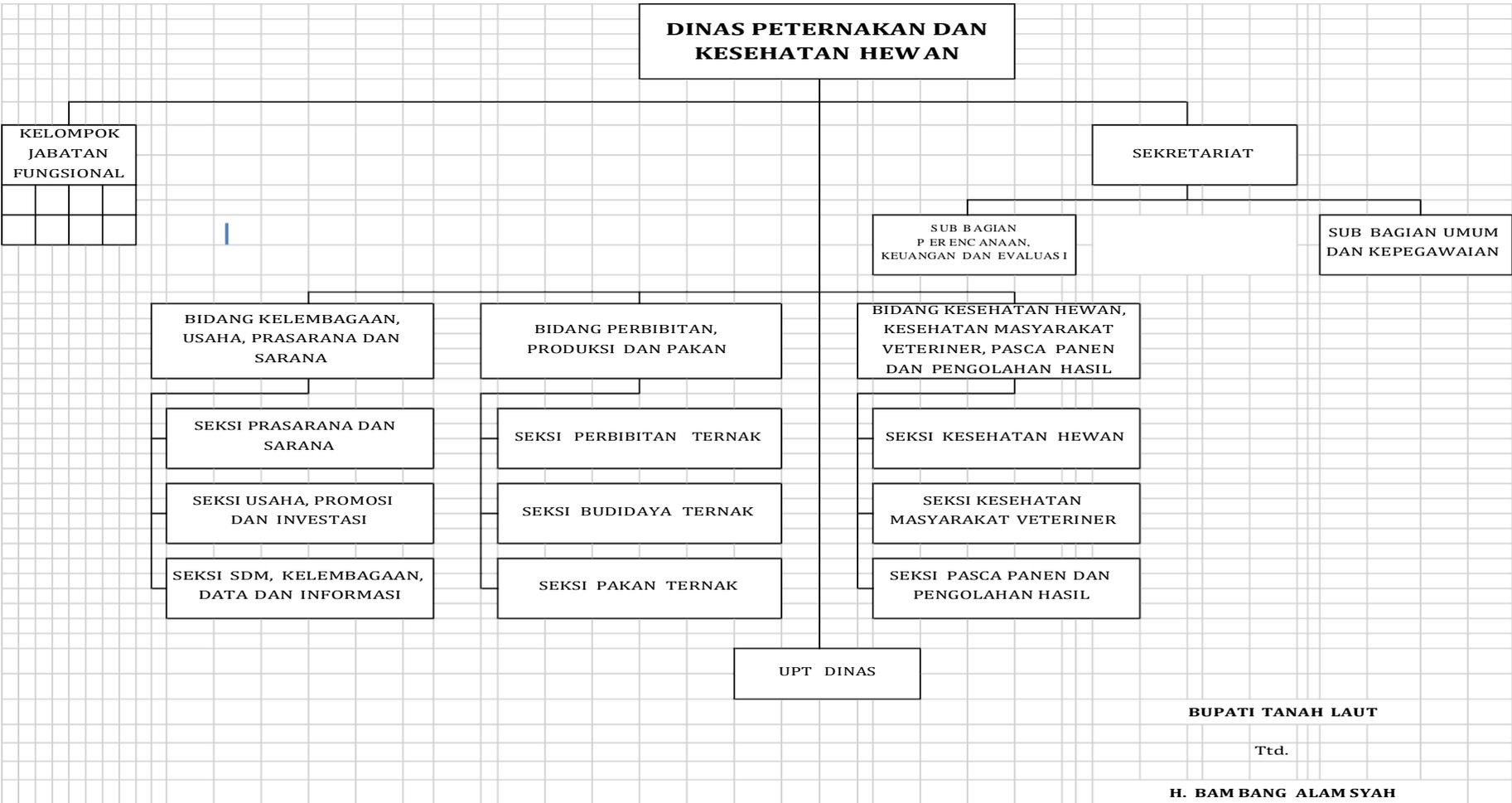
Struktur Organisasi.

Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Kepala Dinas, membawahkan : Sekretariat, Tiga Kepala Bidang dan kelompok Jabatabtan Fungsional.
2. Sekretariat (Skretaris), membawahkan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Kepala Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan : Kasi Pembibitan ternak, Kasi Budidaya Ternak, Kasi Pakan Ternak.
4. Kepala Bidang Keswan, Kesmavet Pasca Panen dan Pengolahan Hasil membawahkan: Kasi Kesehatan Hewan, Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kasi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
5. Kepala Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana membawahkan : Kasi Prasarana dan Sarana, Kasi Usaha, Promosi dan Investasi, Kasi SDM, Kelembagaan data dan Informasi.
6. Ada 4 (empat) UPT yang berada dibawah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut. Dan 4 (empat) UPT tersebut adalah :
 - UPTD Pasar Hewan dan RPH
 - UPTD Poskeswan Batu Ampar
 - UPTD Poskeswan Takisung
 - UPTD Poskeswan Panyipatan

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : 84 Tahun 2016
 Tanggal : 14 Desember 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut



2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

2.1. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan data Analisis Jabatan Tahun 2017, Dinas Peternakan didukung dengan Sumber Daya aparatur sebanyak 69 orang terdiri, 44 status PNS, 24 orang berstatus Honorer dan THL Pusat 1 orang dengan komposisi laki-laki 50 orang, dan 19 orang pegawai wanita.

Sumber daya Dinas Peternakan sebanyak 69 orang, tersebar di sekretariat dan 3 (Tiga) bidang serta jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional sebagai berikut :

- 1 (satu) orang pejabat Struktural Eselon II.b
- 3 (tiga) orang pejabat Struktural Eselon III.b
- 14 (empat belas) orang pejabat Stuktural Eselon IV.a
- 3 (tiga) orang pejabat Struktural Eselon IV.b
- 18 (delapan belas) orang staf/pelaksana
- 2 (dua) orang pejabat Fungsional Medik Veteriner
- 3 (tiga) orang pejabat Fungsional Paramedis Veteriner

Tabel 1. Sebaran Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Struktur Pegawai	Bidang					UPT	Jlh
		Sekretariat	Perbibitan, Produksi & Pakan	Kelembagaan, Usaha, Prasarana & Sarana	Keswan, Kesmavet, Pasca Panen & Pengolahan Hasil			
1	IV/d	-	-	-	-	-	-	-
2.	IV/c	1	-	-	1	-	-	2
3.	IV/b	-	-	-	-	-	-	-
4.	IV/a	-	1	1	2			4
	Jumlah	1	1	1	3	0		6
5	III/d	-	1	2	1	1		5
6	III/c	-	1	-	1	2		4
7	III/b	1	2	1	1	5		10
8	III/a	-	2	1	1	1		5
	Jumlah	1	6	4	4	9		24
9	II/d	2	2	-	-	-		4
10	II/c	3	-	-	1	2		6
11	II/b	-	-	-	-	1		1
12	II/a	-	-	-	-	-		-
	Jumlah	5	2	0	1	3		11
13	I/d	-	-	-	-	1		1
14	I/c	-	-	1	-	1		2
15	Honorer	6	2	2	1	13		24
16	THL	-	-	-	1	-		1
	Jumlah	6	2	3	2	15		28
	JUMLAH	13	11	8	10	27		69

Dengan kualifikasi tingkat pendidikan terbanyak di Dinas Peternakan Stara Satu (S.1), dan kedua pada tingkat SLTA, Data jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2. Komposisi dan perbandingan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Status Pendidikan	Jumlah
1.	S2	1
2.	S1	25
3.	D4	4
4.	D3	10
5.	SLTA	12
6.	SLTP	17
7.	SD	0
JUMLAH		69

Jumlah tenaga pelaksana teknis untuk mendukung kegiatan Insiminsi Buatan (IB) dan Paramedis Kesehatan Hewan (Keswan), tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan dan kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan jenjang tugas dapat dilihat pada table. 3

Tabel. 3 Tenaga Pendukung Pelaksana Kegiatan Insiminsi Buatan (IB)

No	Uraian	Jumlah (orang)	Ket
1.	Medik Veteriner	8	Insiminator merangkap PKb dan Paramedis Kesehatan Hewan dan PKb merangkap ATR.
2.	Supervisor	-	
3.	Instruktur	-	
4.	Assinten Teknis Reproduksi (ATR)		
5.	Pemeriksa Kebuntingan (PKb)		
6.	Insiminator / Paramedis PNS	13	
7.	Insiminator / Paramedis Swadaya	22	
8.	Recorder	2	
Jumlah		45	

Jumlah tenaga kegiatan pelayanan teknis Insiminsi Buatan (IB) dan Paramedis Kesehatan Hewan (Keswan) sejumlah 24 orang, dari 24 orang tersebut 12 orang tenaga teknis Penyuluh Peternakan yang bertugas di Balai Penyuluhan Pertanian tersebar di sebelas kecamatan.

2.2. Aset (Sarana Prasarana) Yang Dikelola

Sarana dan prasarana kerja sebagai “perangkat keras” suatu organisasi, merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas suatu organisasi.

Tabel 4. Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No.	Nama Barang	Jumlah (unit/buah)	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	1		
2	Rumah Dinas	4	4		
3	Pasar Hewan	1	1		
4	Rumah Potong Hewan	1	1		
5	Kantor Puskesmas	3	3		
6	Pos IB	3	3		
7	Gudang penampungan limbah ternak dan Gudang Produksi hasil peternakan	2	2		
8	Kendaraan Roda 4	4	4		
9	Kendaraan Roda 3	1	1		
10	Kendaraan Roda 2	14	9	5	
11	Alat Bengkel tak bermesin (Katrol)	2			2
12	Alat ukur (GPS)	4	4		
13	Alat - Alat Peternakan (Kar tang, Stik ukur, Container IB)	63	63		
14	Alat Proccesing (Unit Pengaduk/Mixer)	1		1	
15	Alat Pasca Panen	6	6		
16	Alat Penyimpanan	1	1		
17	Mesin Ketik	3	1	2	
18	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari, Filing Kabinet, Brand kas)	28	25	3	
19	Alat Kantor Lainnya (Papan pengumuman, White board, Genset, Mesin pompa air)	15	14		1
20	Meubelair (Meja kerja, Meja rapat, Meja resepsionis, Kursi rapat, Kursi Tamu, sofa, Kursi Kerja, Bangku tunggu)	164	150	5	9
21	Alat Pembersih (Mesin potong rumput)	4	2	2	
22	Alat Pendingin (Lemari es, AC)	15	14		1
23	Alat rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23	21	1	1
25	Personal Komputer (PC, Laptop, Notebook)	41	37	2	2
26	Peralatan Komputer Mainframe	2	1		1
27	Peralatan Personal Komputer (Printer, Scanner, UPS, Hardisk Eksternal)	51	45	3	3
28	Peralatan Jaringan (Modem)	3	3		
29	Meja Dan Kursi Kerja	46	46		
30	Peralatan Studio Visual (Proyektor, Handycam, Televisi)	8	8		
31	Peralatan Studio Video Dan Film (Kamera Elektronik)	3	3		
32	Alat Komunikasi Telephone	2	2		
33	Alat Komunikasi Sosial (Sound sistem)	1		1	
34	Alat Kedokteran Hewan	40	39	1	

2.3. Unit Usaha Yang Masih Operasional

Usaha sektor peternakan di Kabupaten Tanah Laut dilakukan oleh masyarakat perorangan dan Kelompok-Kelompok Tani yang tersebar di 11 Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dan sampai saat ini belum mempunyai unit usaha sektor peternakan seperti KUD, KUB maupun unit usaha lainnya.

3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.1. Jenis Pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dalam pembangunan peternakan di Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut. Berkenaan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, maka terjadi perombakan struktur organisasi dari Dinas Peternakan. Secara prinsip gambaran pelayanan yang diberikan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kontribusi pembangunan peternakan dalam pembangunan Kabupaten Tanah Laut.

Secara umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tugas yang diberikan oleh Bupati sebagai penyelenggara pelayanan teknis administrasi bagi semua perangkat Daerah dan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan secara umum, khususnya di bidang sektor peternakan. Bidang perencanaan pembangunan peternakan Daerah yang dimaksud adalah perencanaan ekonomi petani peternak, pembangunan sosial budaya peternak, sarana dan prasarana peternak serta pengendalian evaluasi dan pelaporan.

3.1.1. Sekretariat

Untuk pelayanan internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu terkait pelayanan yang bersifat teknis administratif kepada seluruh perangkat/personil Dinas Peternakan meliputi; administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana.

Pelayanan eksternal Dinas Peternakan, pada intinya terdiri dari pelayanan yang terkait dengan:

1. Memberikan penjabaran kebijakan strategis dan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektor peternakan Daerah yang dibutuhkan oleh seluruh SKPD dan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.
2. Melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektor peternakan antara lain : RPJM, KUA, RKP, Renstra dan Renja Dinas Peternakan dan pembangunan lainnya baik untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri maupun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Melakukan pengendalian, evaluasi/ monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sektor peternakan Daerah.
4. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan sektor peternakan kepada kelompok masyarakat, kelompok usaha kecil/industri dan jasa, profesi peternakan dan kelompok organisasi sosial dan kemasyarakatan.

Tabel 5. Jenis Pelayanan Umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Jenis Pelayanan	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah di sektor peternakan	1.1 Internal Dinas
		1.2 Eksternal kelompok masyarakat peternakan dan SKPD terkait
2.	Mendayagunakan data dan informasi dalam pembangunan daerah	2.1 Internal Dinas
		2.2 Para Perencana pembangunan daerah yang ada diseluruh SKPD
		2.3 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik dalam pengembangan data dan informasi
3.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur	3.1 Pejabat dan para pegawai lingkup Dinas, khususnya perencana pembangunan Dinas

3.1.2. Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan

Bidang Perbibitan, Produksi dan pakan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantuan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pembibitan, Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pembibitan, Produksi dan Pakan menyelenggarakan fungsi ;

- a. penyusunan rencana kerja bidang perbibitan, produksi dan pakan;
- b. perumusan kebijakan bidang perbibitan, produksi dan pakan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perbibitan, produksi dan pengembangan pakan;
- d. pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak;
- e. pelaksanaan kebijakan budidaya ternak;
- f. pelaksanaan kebijakan pengembangan pakan ternak;
- g. pemantuan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan, produksi dan pakan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Jenis kegiatan pelayanan dan kelompok sasaran Bidang Pengembangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Jenis Pelayanan dan kelompok Sasaran Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan

No	Jenis Pelayanan	Objek Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Penyebaran ternak sapi	Sapi induk dan bakalan	Kelompok peternak
2.	Pelaksanaan insiminasi buatan (IB)	Induk sapi Produktif	Kelompok tani dan masyarakat peternak
3.	Pemeriksaan kebuntingan	Induk sapi produktif dan non produktif	Kelompok tani dan masyarakat peternak
4.	Penyebaran Hijauan Pakan Ternak (HPT), Uji Prosimask	Lahan produktif, produksi pakan dan limbah pertanian	Kelompok tani dan masyarakat peternak

3.1.3. Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana

Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana Dan Sarana dipimpin oleh seseorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kelembagaan, usaha, parasana dan sarana peternakan dan keseharan hewan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan usaha;
- b. perumusan kebijakan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana;
- e. pelaksanaan kebijakan pengadaan dan perawatan parasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan kebijakan usaha, promosi dan investasi peternakan dan hewan;
- g. pelaksanaan kebijakan pengolahan penyajian data serta informasi peternakan dan kesehatan hewan;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Adapun jenis pelayanan dan kelompok sasaran Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana dapat di hilat pada table dibawah ini.

Tabel 7. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana.

No	Jenis Pelayanan	Obyek Pelayanan	Kelompok sasaran
1.	Pelayanan izin usaha	Dokumen/ data	Peternak/ pelaku usaha
2.	Pelayanan izin keluar masuk ternak	Dokumen/ data	Peternak/ pelaku usaha
3.	Pelayanan fasilitas promosi produksi unggulan daerah	Produk peternakan	Pelaku usaha peternak
4.	Pelayanan informasi pasar	Harga komoditas peternakan	Pelaku usaha peternak
5.	Pelayanan fasilitas kredit usaha peternakan	Modal usaha	Pelaku usaha peternak
6.	Pelayanan data dan informasi peternakan	Data usaha peternakan	Peternak, kelompok ternak dan masyarakat

3.1.4. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Bidang Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Pasca Panen dan Pengolahan hasil di pimpin oleh oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana fungsi ;

- a. penyusunan rencana kerja bidang, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- b. perumusan kebijakan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- e. pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pelaksanaan kebijakan pasca panen dan pengolahan hasil;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Jenis pelayanan dan kelompok sasaran Bidang Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veterinier (Kesmavet), Pasca Panen dan Pengolahan Hasil dapat dilihat pada tabel dibawah in :

Tabel 8. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

No	Jenis Pelayanan	Obyek Pelayanan	Kelompok sasaran
1.	Pengobatan ternak	Ternak Sakit	Peternak/Poktan
2.	Vaksinasi a. Ternak Sapi b. Anjing	- Induk Sapi Sehat - Induk anjing sehat	- Peternak/ Poktan - Masyarakat
3.	Pemeriksaan Kesehatana Hewan	Ternak Sakit	Peternak/ Poktan
4.	Pengambilan specimen/ sampel	Ternak sehat dan sakit	Peternak/ Poktan
	Pemeriksaan specimen/ sampel	Ternak sehat dan sakit	Peternak/ Poktan
5.	Disinfektan	Kandang ternak unggas dan sapi	Peternak
6.	Pemeriksaan dan pengobatan kemajiran	Ternak induk gangguan reproduksi	Peternak/ Poktan
7.	Surat keterangan keswan	Dokumen	Peternak
8.	Surat rekomendasi bebas PHM	Dokumen	Peternak

3.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target jenis pelayanan khusus SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu ; kelompok masyarakat, kelompok usaha peternakan/ industri barang dan jasa, profesi, kelompok organisasi sosial dan masyarakat.

Selama kurun waktu Tahun 2013-2018 kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat dicapai sesuai target RPJMD seperti terlihat pada Tabel T-C.23. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja sasaran pada renstra tahun 2013- 2018 maka dapat digambarkan pencapaian kinerja yang baik.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan populasi antara lain pendistribusian, perbibitan, budidaya, pakan, agribisnis, peningkatan kemampuan lembaga petani, penyediaan sarana dan prasarana, promosi dan pasca panen.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk penurunan angka kematian ternak dan ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH antara lain Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular, Penyidikan dan pemeriksaan penyakit ternak, Pengendalian penyakit zoonosa dan tersedianya pangan asal hewan yang ASUH dan Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana RPH.

Terkait dengan kesehatan hewan, untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosa dan penularan kepada manusia dilakukan dengan jalan vaksinasi terhadap ternak sehat, pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi/Kabupaten dan peningkatan kesadaran masyarakat. Disamping itu juga dilakukan surveillance yang dilaksanakan secara rutin untuk deteksi dini penyakit AI dan mengoptimalkan kegiatan PDSR.

Tabel 9.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SOPD	Satuan	Target Renstra SOPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase peningkatan Populasi Ternak Sapi Potong	%	6	7	8	9	10	10,51	8,23	6,64	15,86	4,60	175,20	117,53	82,97	176,19	45,95
a.	Persentase angka kebuntingan ternak sapi potong	%	55	60	65	70	70	45,14	64,90	60,87	66,11		82,08	108,17	93,64	94,44	0,00
	1) Jumlah intensifikasi IB	ekor	7.000	7.500	8.000	17.000	10.000	7.122	7.430	11.862	17.084		101,74	99,07	148,28	100,49	0,00
	2) Jumlah kebuntingan	ekor	3.850	4.500	5.200	11.900	7.000	3.215	4.822	7.220	11.294		83,51	107,16	138,85	94,91	0,00
b.	Persentase angka kelahiran ternak sapi potong	%	75	77	80	80	80	92	84	75	85		122,76	108,57	93,42	106,25	0,00
	1) Jumlah kelahiran	ekor	2.888	3.465	4.160	9.520	5.600	2.960	4.031	5.396	9.600		102,51	116,33	129,71	100,84	0,00
c.	Persentase peningkatan pengelolaan aset ternak Daerah	%	3	4	5	6	7	3,91	9,20	5,15	6,11		130,19	229,99	103,06	101,83	0,00
	1) Jumlah aset ternak daerah yang bergulir dimasyarakat	ekor	1.400	1.350	1.300	1.250	1.200	1.357	1.337	1.339	1.257		103,17	100,97	97,09	100,56	0,00
	2) Jumlah aset ternak yang telah dikembalikan ke daerah	ekor	50	55	60	65	70	53	123	69	38		106,00	223,64	115,00	58,46	0,00
d.	Jumlah penyebaran bibit rumput	Ha	2	2	2	2	2	2,5	2,5	0	25		125,00	125,00	0,00	1250,00	0,00
e.	Jumlah pemeliharaan demplot pakan	Ha	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
f.	Jumlah pengambilan sampel pakan ternak	Sampel	6	7	8	7	5	6	10	9	7		100,00	142,86	112,50	100,00	0,00
g.	Jumlah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	ekor	20	20	20	20	10	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h.	Jumlah pelaku usaha bermitra dengan pihak lain	Pelaku Usaha	1	2	3	4	5	2	3	4	4		200,00	150,00	133,33	100,00	0,00
	1) Jumlah produksi peternakan yang dapat dipasarkan	Produk	5	7	8	10	15	7	9	12	14		140,00	128,57	150,00	140,00	0,00
	2) Jumlah informasi pasar atas hasil produksi peternakan yang akurat dan dapat diakses	Informasi	12	12	12	12	12	12	12	12	12		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
i.	Jumlah poktan yang dapat mengembangkan usahanya	Poktan	5	10	15	20	25	5	10	15	20		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	1) Jumlah Kelompok Tani terlatih	Poktan	5	10	15	20	25	5	10	15	20		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2) Jumlah Kelompok Tani Berprestasi	Poktan	6	6	6	6	6	6	6	6	6		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
j.	Jumlah informasi peternakan yang dikelola dengan baik	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	1) Jumlah informasi peternakan yang akurat dan bisa diakses	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
k.	Jumlah sarana dan prasarana peternakan yang terpenuhi dan terdistribusi dengan lancar																
	1) Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana pasar hewan yang sesuai standar	Unit	0	0	8	0	2	0	0	8	0		0,00	0,00	100,00	0,00	1,00
	2) Jumlah sarana dan prasarana teknologi peternakan yang terdistribusi	Unit	8	10	12	14	16	8	10	13	15		100,00	100,00	108,33	107,14	0,00
	3) Jumlah kelompok tani yang terlatih dalam pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Poktan	8	10	12	14	16	8	10	13	15		100	100	108,3333	107,14	0,00
2	Persentase penurunan angka Kematian Ternak																
a.	Persentase penurunan angka Kematian Ternak																
	1) Sapi / Kerbau/Kambing	%	1,3	1	1	1	0,5	0,86	0,43	0,31	1	0,13	151	232,56	322,58	100,00	26,00
	2) Ayam Buras	%	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	4,84	1,47	1,75	4,5	2,25	45	149,66	125,71	48,89	97,78
	3) Ayam Ras	%	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,94	2,47	5,36	3,14	1,50	170	64,78	29,85	50,96	106,67
b.	Jumlah pengobatan dan vaksinasi	ekor	3750	4000	4250	4500	4750	4050,00	4350,00	5000	4700		108	108,75	117,6471	104,44	0,00
c.	Jumlah pengambilan spacemen / sampel																
	1) Jumlah pengambilan specemen/ sampel ulas darah	Sampel	300	350	400	400	400	300	350	400	400		100	100	100	100,00	0,00
	2) Jumlah pengambilan specemen/ sampel feces	Sampel	550	600	650	700	750	550	600	650	660		100	100	100	94,29	0,00
3	Persentase tingkat pangan asal hewan yang ASUH	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100,00	0,00
a.	Persentase ternak yang sehat																
	1) Jumlah pengambilan specemen sampel produksi hasil ternak daging ayam	Sampel	40	40	40	100	100	40	40	25	100		100	100	62,5	100,00	0,00
	2) Jumlah pengambilan specemen sampel produksi hasil ternak daging sapi	Sampel	25	25	25	20	25	25	25	25	20		100	100	100	100,00	0,00
b.	Persentase sarana dan prasarana rumah potong hewan yang berstandar	%	55	65	75	80	85	55	65	75	75		100	100	100	93,75	0,00
	1) Jumlah sarana dan prasarana rumah potong hewan yang sesuai standar	Unit	2	2	2	0	2	2	2	2	0		100	100	100	0,00	1,00
c.	Jumlah pelaku usaha yang hasil produksinya meningkat	Pelaku Usaha	1	2	3	4	5	1	2	3	4		100	100	100	100,00	0,00
	1) Jumlah Pelaku Usaha terlatih	Pelaku Usaha	1	2	3	4	5	1	2	3	4		100	100	100	100,00	0,00
	2) Jumlah produk hasil olahan ternak yang berhasil dikembangkan	Produk	4	6	8	10	15	4	6	8	14		100	100	100	140,00	0,00

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum pada Tabel T-C.23., selanjutnya dapat disajikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya Populasi Ternak

Sasaran Strategisnya yaitu meningkatnya Populasi ternak dengan indikator sasaran yaitu persentase peningkatan populasi ternak sapi potong.

Dari Tabel diatas dapat dilihat, bahwa populasi ternak sapi potong semakin meningkat tiap tahunnya. Peningkatan populasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 15,86% (10.353 ekor) dari target 9%, selanjutnya pada 2014 terjadi peningkatan sebesar 10,51% (5.381 ekor) dari target 6%, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2015 yaitu dengan capaian 8,23% (4.654 ekor) dari target 87%, tahun 2016 terjadi penurunan dari target yaitu 6,64% (4.064 ekor) dari target 8% dan pada tahun 2018 terjadi penurunan populasi dengan capaian 4,60% (3.476 ekor) dari target 10%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan populasi antara lain pendistribusian, perbibitan, budidaya, pakan, agribisnis, pelatihan dan peningkatan kemampuan lembaga petani, penyediaan sarana dan prasarana, promosi dan pasca panen.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga atas kontribusi dan partisipasi kalangan dunia usaha terutama usaha di bidang peternakan sapi potong.

2. Menurunnya Angka Kematian Ternak

Sasaran Strategisnya yaitu menurunnya angka kematian ternak dengan indikator sasaran yaitu persentase penurunan angka kematian ternak sapi potong/Kerbau/Kambing, ayam buras dan ayam ras.

Dari Tabel diatas dapat dilihat, bahwa angka kematian ternak sapi potong/Kerbau/Kambing, ayam buras dan ayam ras cenderung semakin menurun tiap tahunnya. Penurunan angka kematian ternak sapi potong tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,31% dari populasi awal (189 ekor) dari target 1%, kemudian pada tahun 2014 penurunan sebesar 0,86% (442 ekor) dari target 1,3%, pada tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 0,43% (246 ekor) dari target 1%, pada tahun 2017 penurunan angka kematian sebesar 1% (653 ekor) dari target 1%, dan terakhir pada tahun 2018 terjadi penurunan angka kematian sebesar 0,13% (95 ekor) dari target 0,5%)

Angka kematian ayam buras terjadi penurunan angka kematian tertinggi pada tahun 2015 sebesar 1,47% dari populasi awal (24.800 ekor) dengan target 2,2%, pada 2014 terjadi peningkatan sebesar 4,84% (58.373 ekor) dari target 2,2%, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2016 yaitu dengan capaian 1,75% (38.591 ekor) dari target 82,2%, tahun 2017 terjadi peningkatan kembali sebesar 4,5% (106.517 ekor) dari target 2,2% dan pada tahun 2018 terjadi penurunan dengan capaian 2,25% (56.532 ekor) dari target 2,2%.

Angka kematian ayam ras cenderung meningkat dan hanya terjadi penurunan pada tahun 2018 dengan capaian 0,94% (207.573 ekor) dari target 1,6%, karena untuk pengelolaan ayam ras di Kabupaten Tanah Laut dikuasai oleh perusahaan, sehingga untuk penanganan kesehatan hewannya juga ditangani oleh pihak perusahaan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menurunkan angka kematian ternak, antara lain Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular, Penyidikan dan

pemeriksaan penyakit ternak, Pengendalian penyakit zoonosa dan tersedianya pangan asal hewan yang ASUH dan Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana RPH, dan partisipasi dari kalangan dunia usaha dalam hal ini usaha ternak ayam ras.

3. Peningkatan Pangan Asal Hewan yang ASUH

Sasaran Strategisnya yaitu persentase pangan asal hewan yang ASUH, melalui pengampilan dan pengujian sampel bahan pangan asal ternak, penyediaan sarana dan prasaran RPH dan peningkatan mutu produk hasil peternakan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target pangan asal hewan yang ASUH selama 5 tahun dari 2014 s/d 2018 tercapai target 100% dan dapat dikatangkan bahwa pangan asal hewan di Kabupaten Tanah Laut aman untuk dikonsumsi. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi dari pelaksana kegiatan dan pelaku usaha di Kabupaten Tanah Laut yang bersedia untuk mengikuti aturan dan anjuran petugas.

Capaian kinerja anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama kurun waktu Tahun 2013-2018 seperti terlihat pada Tabel T-C.24.

Anggaran belanja selama 5 tahun menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2013-2018 yang dapat dilihat dari ratio antara realisasi dan anggaranyang mencapai 66,04%-87,10%.

Tabel 10.

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tanah Laut

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi																	
Perkantoran																	
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	1.000.000	-	-	-	-	32.000	-	-	-	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	-80.000	0
2. Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	60.000.000	60.600.000	72.600.000	118.880.000	98.880.070	45.279.228	26.962.855	23.223.380	54.200.338	45.133.012	75,47	44,49	31,99	45,59	45,64	106.880.000	36.077.166
3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	-	7.400.000	7.500.000	8.000.000	-	-	4.581.000	5.611.600	3.226.000	0,00	0,00	61,91	74,82	40,33	7.500.000	3.226.000
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	181.764.000	185.216.000	380.400.000	486.250.000	20.000.000	151.879.000	166.813.800	367.600.000	469.055.000	75.000	83,56	90,06	96,64	96,46	0,38	449.897.200	-30.300.800
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.800.000	7.435.000	12.000.000	36.780.000	10.000.000	4.800.000	7.350.000	8.961.000	34.292.000	1.847.500	61,54	98,86	74,68	93,24	18,48	35.220.000	887.500
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.400.000	12.950.000	18.900.000	15.150.000	5.000.000	3.400.000	6.726.000	7.350.000	6.975.000	2.395.000	100,00	51,94	38,89	46,04	47,90	14.470.000	1.715.000
7. Penyediaan Alat Tulis kantor	56.695.000	60.922.000	55.000.000	42.784.000	28.585.000	51.810.000	51.215.700	49.140.500	37.112.000	25.784.500	91,38	84,07	89,35	86,74	90,20	31.445.000	15.422.500
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.587.000	9.075.000	10.000.000	31.390.000	30.000.000	6.508.750	7.002.750	7.967.250	20.107.500	9.305.600	98,81	77,17	79,67	64,06	31,02	30.072.600	8.003.850
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan	11.475.000	2.725.000	30.000.000	94.300.000	18.200.000	7.940.000	1.335.000	6.888.750	77.112.500	11.275.500	69,19	48,99	22,96	81,77	61,95	92.005.000	9.687.500
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	78.875.000	160.230.000	678.450.000	36.720.000	0	62.360.000	125.024.000	500.069.809	24.501.455	0	79,06	78,03	73,71	66,73	#DIV/0!	20.945.000	-12.472.000
11. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.920.000	1.500.000	4.280.482	4.411.000	3.840.000	3.780.000	1.110.000	85,61	88,22	76,80	76,83	74,00	3.920.000	253.904
12. Penyediaan Makanan dan Minuman	12.500.000	22.500.000	21.765.000	58.960.000	23.740.000	10.290.000	18.548.000	20.905.000	57.421.000	19.125.000	82,32	82,44	96,05	97,39	80,56	56.460.000	17.067.000
13. Rakor dan Koordinasi Ke Luar daerah	591.210.000	980.300.000	516.887.000	429.162.200	174.800.000	567.956.329	597.001.800	516.815.896	427.566.148	174.535.203	96,07	60,90	99,99	99,63	99,85	310.920.200	60.943.937
14. Rakor dan Koordinasi di dalam daerah	55.110.000	60.595.000	55.010.000	75.195.000	38.000.000	24.650.000	19.805.000	55.008.050	74.565.000	37.815.000	44,73	32,68	100,00	99,16	99,51	64.173.000	32.885.000
15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SOPD					405.000.000					291.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	71,90	0	291.200.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor				20.000.000					18.910.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	94,55	#DIV/0!		
2. Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	228.100.000	124.600.000	-	-	-	220.620.000	105.225.900	-	-	26.132.000	96,72	84,45	0,00	0,00	1,00	-45.620.000	-17.992.000
3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	14.505.000	11.350.000	21.000.000	21.850.000	2.000.000	11.805.000	11.350.000	12.662.500	15.950.000,00		81,39	100,00	60,30	73,00	0,00	18.949.000	-2.361.000
4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	69.050.000	152.382.000	211.752.000	87.250.000	47.621.000	60.777.400	120.971.800	158.299.630	67.238.050		88,02	79,39	74,76	77,06	0,00	73.440.000	-12.155.480
5. Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas	-	373.650.000	-	-	-		365.681.000	-	-		0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0	0
6. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	-	1.249.400.000	-	-	-		817.394.000	-	-		0,00	65,42	0,00	0,00	0,00	0	0
7. Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional	-	20.600.000	6.300.000	-	-		17.965.000	6.300.000	-		0,00	87,21	100,00	0,00	0,00	0	0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	17.650.000	49.950.000	15.350.000	-	-	17.650.000	49.950.000	15.350.000	-	-	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-3.530.000	-3.530.000

RENCANA STRATEGIS 2018 -2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur																	
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	-	-	47.500.000	8.000.000		-	-	4.200.000	7.500.000,00								
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.610.000	12.984.000	8.480.000	1.245.000	1.250.000	5.242.500	3.971.250	7.195.000	844.000	379.000	68,89	30,59	84,85	67,79	30,32	-277.000	-669.500
Program Pengembangan data / Informasi																	
1. Penyusunan Profile daerah	-	192.280.000	-	-	-		66.995.000	-	-		0,00	34,84	0,00	0,00	1,00	0	0
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah																	
1. Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah	-	155.895.000	139.440.000	80.295.000			59.140.500	112.185.500	79.068.500		0,00	37,94	80,45	98,47	#DIV/0!	80.295.000	0
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani																	
1. Pelatihan Petani dan Pelaku agribisnis	108.265.000	134.429.800	84.537.000	59.723.000	39.545.000	101.615.500	88.355.800	79.322.900	56.705.500	36.620.000	93,86	65,73	93,83	94,95	92,60	38.070.000	16.296.900
2. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	175.510.000	135.146.900	83.486.000	36.877.000	10.000.000	157.316.300	97.358.300	75.207.000	36.680.750	7.064.000	89,63	72,04	90,08	99,47	70,64	1.775.000	-24.399.260
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak																	
1. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular	208.329.000	284.515.000	101.308.500	161.548.000	96.770.000	202.070.300	228.147.040	76.498.500	147.609.700	87.915.500	97,00	80,19	75,51	91,37	90,85	119.882.200	47.501.440
2. Penyidikan dan pemeriksaan penyakit ternak	13.579.000	35.287.000	16.707.000	54.693.000	2.500.000	8.171.000	6.345.000	12.529.500	41.564.500	850.000	60,17	17,98	75,00	76,00	34,00	51.977.200	-784.200
3. Pengendalian penyakit zoonosa dan tersedianya pangan asal hewan yang ASUH	56.397.000	76.415.000	26.910.000	49.850.000	14.999.900	42.104.000	57.466.000	24.326.855	43.751.500	1.805.000	74,66	75,20	90,40	87,77	12,03	38.570.600	-6.615.800
4. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana RPH	673.350.000	1.719.889.000	431.732.000	0		655.922.800	1.236.313.000	418.669.300	-		97,41	71,88	96,97	#DIV/0!	#DIV/0!	-134.670.000	-131.184.560
Program Perencanaan Pembangunan Daerah																	
1. Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja)	5.626.000	8.432.000	55.595.000	16.714.000	6.500.000	3.358.000	741.500	5.595.000	10.269.500	2.375.500	59,69	8,79	10,06	61,44	36,55	15.588.800	1.703.900
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan																	
1. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	384.068.000	724.519.000	339.030.000	38.193.000	40.000.000	355.430.200	36.043.000	249.080.190	31.841.000	26.544.000	92,54	4,97	73,47	83,37	66,36	-38.620.600	-44.542.040
2. Pembelian dan Pendistribusian vaksin dan pakan ternak	124.555.000	147.020.000	46.599.900	46.308.000	10.000.000	110.334.850	58.353.050	30.337.130	38.921.960	7.545.000	88,58	39,69	65,10	84,05	75,45	21.397.000	-14.521.970
3. Pengembangan agribisnis peternakan	287.030.000	191.325.000	152.807.000	50.670.000	10.000.000	182.209.300	153.191.600	149.883.000	42.063.000	9.635.000	63,48	80,07	98,09	83,01	96,35	-6.736.000	-26.806.860
4. Pendamping dana Tugas Pembantuan APBN	33.000.000	124.847.000	17.100.000	167.636.000	53.250.000		42.273.000	15.750.000	143.212.900	42.357.000	0,00	33,86	92,11	85,43	79,54	161.036.000	42.357.000
5. Pendistribusian semen bibit sapi unggul dan pelaksanaan inseminasi buatan	246.190.000	659.475.075	531.677.000	175.075.000	25.000.000	199.483.850	480.914.075	500.628.000	150.509.250	18.516.000	81,03	72,92	94,16	85,97	74,06	125.837.000	-21.380.770
6. Pengembangan Data dan Informasi					48.230.000					17.520.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	36,33	0	17.520.000

RENCANA STRATEGIS 2018 -2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan																	
1. Pembangunan pusat-pusat etalase / eksepsi / promosi atas hasil produksi peternakan	766.313.000	1.384.589.900	1.365.528.419	-	-	620.804.920	1.159.854.590	1.174.306.000	-	-	81,01	83,77	86,00	0,00	1,00	-153.262.600	-124.160.984
2. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	186.707.000	107.424.800	78.736.500	45.626.500	-	163.018.500	52.654.400	57.173.500	34.419.000	-	87,31	49,02	72,61	75,44	#DIV/0!	8.285.100	-32.603.700
3. Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan	-	94.851.700	109.928.600	93.445.000	7.490.000	-	77.150.280	88.714.900	86.639.000	7.490.000	0,00	81,34	80,70	92,72	100,00	93.445.000	7.490.000
4. Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan yang akan di Pasarkan	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	7.970.000	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan																	
1. Pengadaan Sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	332.706.000	297.710.000	201.670.000	165.785.000	35.575.000	272.029.500	213.792.290	185.526.003	146.327.750	25.950.800	81,76	71,81	91,99	88,26	72,95	99.243.800	-28.455.100
2. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan	174.832.000	214.400.000	101.890.000	93.324.000	35.190.000	145.587.750	127.506.750	96.446.350	57.101.500	27.195.000	83,27	59,47	94,66	61,19	77,28	58.357.600	-1.922.550
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah																	
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan aset daerah	154.985.000	175.000.000	189.900.000	100.065.500	14.980.000	94.022.900	118.128.000	129.544.500	74.092.050	2.279.200	60,67	67,50	68,22	74,04	15,21	69.068.500	-16.525.380
Total	5.339.173.000	10.426.916.175	6.248.376.919	3.012.164.200	1.372.605.970	4.570.728.359	6.885.460.030	5.258.081.893	2.623.518.951	978.970.315	86	66	84	87	71		

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Tantangan

Berikut merupakan uraian tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tanah Laut yang semakin kompleks yang banyak dipengaruhi kemajuan teknologi informasi, tingkat kecerdasan masyarakat, pendapatan masyarakat serta tuntutan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi bahan pangan asal ternak yang ASUH.

1.1. Tantangan Internal

Tantangan internal merupakan faktor potensial yang ada di dalam intern Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut yang belum secara optimal diberdayakan dalam pembangunan peternakan.

a. Sumber Daya manusia

Berdasarkan pendidikan, jumlah pegawai keseluruhan 69 orang terdiri dari 44 PNS dan 25 Non PNS.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut merupakan dinas teknis yang mempunyai tugas pokok sudah selayaknya memerlukan tenaga teknis yang lebih banyak dibandingkan dengan tenaga non teknis. Untuk itu, perlu pemberdayaan tenaga non teknis dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan/magang teknis peternakan dan kesehatan hewan, sehingga memiliki dasar pemahaman tentang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Di samping itu, harus memahami administrasi perkantoran sebagai pendukung dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan.

b. Prasarana dan sarana

Secara umum, prasarana dan sarana perkantoran sudah memadai namun untuk prasarana dan sarana pelayanan di lokasi khususnya pada ternak masih diperlukan seperti puskesmas, check point, pos pelayanan IB, depo obat hewan, lumbung pakan dan alat mesin peternakan.

Perkembangan informasi elektronik sangat pesat dan kecepatan ketepatan dan keterbukaan semakin dituntut oleh masyarakat. Publikasi saat ini harus mengikuti perkembangan dan informasi yang dipublikasikan harus transparan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan media elektronik serta prasarana dan sarana elektronik seperti website, baliho, leaflet, spanduk perlu ditingkatkan agar penyampaian informasi mengenai peternakan dan kesehatan hewan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Peran serta masyarakat akan semakin meningkat dengan adanya media publikasi tersebut di dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan.

c. Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait

Keterkaitan/keterpaduan dan sinergisitas antar instansi/lembaga terkait baik di Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota perlu ditingkatkan agar keterpaduan program dan kegiatan peternakan berjalan efektif dan efisien.

Dalam pengembangan kawasan peternakan yang berbasis komoditas ternak dapat terintegrasi dengan sektor lainnya seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, industri pengolahan hasil dan lahan eks tambang.

1.2. Tantangan Eksternal

- a. Sumber pembiayaan di luar Pemerintah seperti Kredit Program (KKPE, KUR), CSR, belum secara optimal dapat diakses oleh peternak. Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memecahkan permasalahan permodalan khususnya agunan yang harus dimiliki oleh peternak maka perlu dibentuk lembaga penjaminan.
- b. Potensi pakan hijauan ternak sangat melimpah, namun untuk pakan penguat dan bahan baku masih sangat tergantung dari luar daerah.
- c. Pemotongan betina produktif khususnya sapi/kerbau lokal masih cukup tinggi. Hal ini merupakan suatu kerugian bagi peternak karena yang seharusnya dapat memberikan keuntungan dengan bertambahnya populasi namun harus dipotong. Oleh karena itu pemahaman tentang larangan pemotongan betina produktif perlu ditingkatkan.
- d. Meningkatnya kesadaran peternak mengenai kesehatan ternak akan berimplikasi, pada pemberian pelayanan yang harus diberikan, sementara petugas medis di lapangan/ poskeswan relatif masih kurang.
- e. Populasi ternak yang dinamis, terutama keluar masuk ternak dari luar Kabupaten Tanah Laut atau yang masuk ke Kabupaten Tanah Laut perlu pengawasan dan antisipasi terutama memberikan pelayanan dalam rangka untuk pencegahan pemberantasan penyakit menular.
- f. Meningkatnya kebutuhan Insiminasi Buatan (IB), yang dilakukan oleh Insiminator dilapangan, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas bibit ternak, maka permintaan pelayanan Insiminasi Buatan (IB) akan meningkat, sementara sarana dan prasarana pendukung kegiatan insiminator dilapangan masih kurang, sedangkan petugas relatif cukup.

2. Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan SOPD adalah; meningkatkan keswadayaan dan keswadanaan peternak sehingga dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah yang dapat dilihat dari :

2.1. Ketersediaan dan dukungan dana dalam usaha peternakan.

Permodalan usaha peternakan biasa melalui modal KKP-E dan berbagai skim Kredit yang berlaku. Peluang mendapatkan modal atau flafon yang tersedia biasa melalui BANK BRI, Bank Kalsel, BNI dan Mandiri telah dilakukan kedepan perlu ditingkatkan.

2.2. Pengeluaran hasil ternak besar dan kecil keluar Kabupaten Tanah Laut yang dinamis dan cukup banyak.

Pengeluaran ternak dan hasil ternak Kabupaten Tanah Laut ke Kabupaten dalam provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan tengah bahkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Dari data yang terhimpun melalui Check Point, jenis ternak yang keluar dari Kabupaten Tanah Laut berupa sapi bibit, bakalan/sapi potong, kerbau dan kambing, Adapun jumlah ternak yang keluar dari Kabupaten Tanah Laut seperti tabel dibawah ini :

Tabel 11. Jumlah Produk Hasil Ternak Besar dan Kecil Yang Keluar Dari Kabupaten Tanah Laut.

No	Hasil Ternak	Tahun (ekor)				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1.	Sapi	11.648	10.121	13.551	7.569	7.564
2.	Kerbau	642	654	676	520	364
3.	Kambing	108	345	404	1.687	2.083
4.	Domba	-	-	-	14	-
5.	Babi	45	-	-	-	-
6.	Ayam Buras	651.813	135.300	191.221	260.375	138.189
7.	Ayam Ras Petelur	3.041.100	3.499.500	6.037.299	2.983.336	1.885.940
8.	Ayam Ras Pedaging	22.168.982	36.296.110	35.894.600	41.648.894	
9.	Itik	84.000	94.689	90.963	46.683	24.042

*) Data Sampai dengan bulan Agustus 2018

2.3. Permintaan terhadap produk peternakan yang semakin meningkat.

Konsumsi daging berkembang dengan pesat yang disebabkan oleh pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan, kesadaran gizi serta pola hidup sehat. Peluangnya sangat besar untuk mengembangkan sektor peternakan sehingga bisa memenuhi kebutuhan daging sendiri.

Tabel 12. Jumlah Produksi Daging di Kabupaten Tanah Laut

No	Produksi Daging	Tahun (Kg)				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1.	Sapi	480.864	252.888	253.571	268.212	
2.	Kerbau	73.440	45.792	48.038	50.204	
3.	Kambing	52.756	12.608	7.466	12.608	
4.	Domba	317	429	592	408	
5.	Babi	1.567	575	-	8	
6.	Ayam Buras	798.888	398.376	482.734	500.787	
7.	Ayam Ras Petelur	1.634.303	1.072.940	934.104	1.244.736	
8.	Ayam Ras Pedaging	4.694.759	4.720.044	5.962.843	6.859.018	
9.	Itik	71.440	76.622	66.534	70.958	

*) Data Sampai dengan bulan Agustus 2018

Pangsa Pasar ternak kambing di Kabupaten Tanah Laut dan di dalam Kalimantan Selatan sangat tinggi dan berprospek bagus, selain itu ternak kambing sangat diperlukan dalam keagamaan. Namun populasinya masih perlu ditingkatkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari data yang telah tercatat dicheck point hanya untuk ternak kambing mulai dari tahun 2017 s/d 2018, pada tabel 15 diatas data yang ada 70 % didatangkan dari luar Kabupaten Tanah Laut.

2.4. Produksi hasil ternak unggas di Kabupaten Tanah Laut yang dinamis dan cukup banyak.

Hasil ternak unggas yang keluar setelah dikurangkan konsumsi kebutuhan dalam Kabupaten Tanah Laut yaitu ; berupa karkas (daging) ayam ras, buras, itik dan telur ayam ras, buras, itik, terbesar pada telur ayam ras dan sebagian besar dikeluarkan ke wilayah Kota Madya dan Kabupaten Banjar bahkan ke Kalimantan Tengah, Adapun Produk hasil unggas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 13. Jumlah Produk Hasil Ternak Unggas di Kabupaten Tanah Laut.

Hasil Ternak	Tahun (Kg)				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Telur					
Ayam Buras	1.379.853	1.808.302	1.936.676	2.055.704	
Ayam Ras Petelur	42.244.188	55.065.801	59.413.085	72.008.607	
Itik	1.834.320	1.758.933	1.280.441	1.318.854	
Daging					
Ayam Buras	798.888	398.376	482.734	500.787	
Ayam Ras Petelur	1.634.303	1.072.940	934.104	1.244.736	
Ayam Ras Pedaging	4.694.759	4.720.044	5.962.843	6.859.018	
Itik	71.440	76.622	66.534	70.958	

*) Data Sampai dengan bulan Agustus 2018

2.5. Pengembangan Energi Alternatif dan Pupuk Organik

Produktivitas ternak khususnya sapi/kerbau dikenal dengan 7 emas yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Emas Merah : Daging sebagai bahan konsumsi dan sumber gizi
- 2) Emas Putih : Susu sebagai bahan konsumsi dan sumber gizi
- 3) Emas Kuning : Urine sebagai bahan pupuk organik
- 4) Emas Putih Batangan : Tepung tulang sebagai bahan baku pakan
- 5) Emas Coklat : Kulit sebagai bahan baku industri
- 6) Emas Biru : Energi yang dihasilkan melalui biogas
- 7) Emas Hijau : Kotoran Ternak sebagai bahan pupuk organik

Tidak ada satupun bagian dari tubuh ternak yang tidak bisa dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang semakin berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman.

2.6. Peluang Pengembangan Populasi

Populasi ternak di Kabupaten Tanah Laut masih sangat potensial untuk dikembangkan. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dapat ditunjukkan dengan potensi wilayah dan lahan yang potensial untuk pengembangan sektor peternakan. Berikut data populasi ternak di Kabupaten Tanah Laut disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 14. Populasi Ternak di Kabupaten Tanah Laut

No	Jenis Ternak	Tahun (Ekor)				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1.	Sapi Potong	56.571	61.225	65.289	75.642	79.118
2.	Sapi Perah	13	11	10	24	27
3.	Kerbau	3.265	3.280	3.260	3.641	3.694
4.	Kambing	14.829	14.797	15.630	20.829	22.489
5.	Domba	292	244	188	164	150
6.	Ayam Buras	1.686.487	2.210.147	2.367.048	2.512.527	2.580.413
7.	Ayam Ras Petelur	4.023.256	5.244.362	5.658.389	6.857.963	6.926.543
8.	Ayam Ras Pedaging	26.436.945	45.671.838	50.554.733	51.365.593	
9.	Itik	267.505	256.511	186.731	192.333	195.218

*) Data Sampai dengan bulan Agustus 2018

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut 3.631,35 km² (363.135 Ha) atau sekitar 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 Km², sedangkan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 Km². Secara geograrafis Kabupaten Tanah Laut terletak pada posisi 114°30'20 Bujur Timur (BT) - 115°23'31 Bujur Timur (BT) dan 3°30'33 Lintang Selatan (LS) - 4°11'38 Lintang Selatan (LS), dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan kota Banjarbaru.
- Selatan berbatasan dengan laut jawa.
- Barat berbatasan dengan laut jawa.
- Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan laut jawa.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut harus melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya sharing. Kegiatan ini dimaksudkan agar SKPD yang terkait dapat melakukan kegiatan khususnya perencanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Dengan demikian bahwa layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut adalah merupakan layanan perencanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Dari tugas pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut bahwa, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas **melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.**

Dari tugas pokok dan fungsi tersebut maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib **menyusun rencana pembangunan daerah yang aspiratif, responsive, partisipatif, transparan, implementatif, integrative, komprehensif dalam suasana demokratis sesuai kondisi dan potensi daerah.**

Dengan demikian dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada SKPD tentang perencanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas perencanaan.
2. Menjadikan dokumen Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dapat diterima, dipedomani dan dimanfaatkan para pelaku pembangunan.
3. Meningkatkan keterpaduan perencanaan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kecamatan, provinsi dan Nasional.
4. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sektor peternakan secara efektif dan efisien agar,
 - a. Pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan tepat sasaran.
 - b. Pengendalian pembangunan yang efisien.

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, sering dihadapkan pada berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut sering kali menjadi tugas dan fungsi tidak dapat dijalankan dengan baik.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan pembangunan sektor peternakan di daerah agar rencana Strategis yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Permasalahan tersebut merupakan masalah prioritas utama yang menjadi agenda rencana pembangunan Peternakan dalam periode 2018-2023 yang berasal dari penjelasan misi pembangunan yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan teridentifikasinya permasalahan tersebut diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan sektor Peternakan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan peternakan adalah "**Percepatan Pertumbuhan Populasi Ternak Belum Sebanding dengan Konsumsi**", sehingga permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan ke depan adalah sebagai berikut:

a. Permintaan terhadap produk peternakan yang semakin meningkat

Bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan gizi, secara langsung mempengaruhi permintaan akan daging. Produksi daging dipengaruhi oleh jumlah pemotongan ternak sapi, kerbau, ayam, kambing/domba dan jumlah pemasukan daging dari luar. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus dapat ditangkap untuk meningkatkan produksi.

Selain itu penurunan mutu genetik ternak yang disebabkan oleh terjadinya inbreeding (kawin sedarah) sehingga keturunan yang dihasilkan semakin buruk kualitasnya, untuk mengatasi hal tersebut sangat diperlukan intensifikasi Inseminasi Buatan (IB) untuk memperbaiki keturunan ternak karena semen berasal dari pejantan terpilih dan berkualitas.

Terjadinya kasus penyakit sangat berpengaruh pada peningkatan populasi ternak. Pengawasan lalu lintas ternak sangat penting karena merupakan salah satu upaya pencegahan keluar masuknya penyakit hewan menular serta produk asal ternak dari dan ke Kabupaten Tanah Laut, baik yang dibawa melalui ternak hidup maupun yang berasal dari bahan atau produk asal ternak. Pengawasan dilakukan oleh petugas masing-masing di Pos Check Point di daerah perbatasan/pesisir yaitu di Kecamatan Takisung, Panyipatan, Jorong dan Kintap yang wilayahnya berbatasan dengan Daerah lain. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas di Pos Check Point secara berkala dimonitor oleh petugas di Kabupaten dalam rangka pembinaan baik personil maupun teknis.

Apabila pengawasan lalu lintas ternak tidak ketat, selain merebaknya kejadian kasus penyakit hewan, akan terjadi kasus pemasukan dan peredaran

daging ilegal ke wilayah perbatasan/pesisir. Hal ini disebabkan karena: 1) adanya perbedaan harga yang cukup tinggi antara daging sapi yang dimasukkan secara ilegal dengan daging segar lokal; 2) penyediaan daging sapi segar lokal masih kurang; 3) belum optimalnya fungsi Rumah Potong Hewan (RPH); 4) tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dari aspek kesmavet masih rendah; 5) operasional tim pengawasan dan pengendalian di kabupaten/kota belum optimal serta; 6) banyaknya pos Check Point dengan jumlah aparat pengawasan masih terbatas.

Betapa pentingnya pengawasan lalu lintas perbatasan komoditas peternakan/hewan ini dikarenakan wilayah perbatasan/pesisir sebagai akses keluar masuknya perdagangan bebas salah satunya produk asal hewan yang dari dulu sudah melakukan perdagangan secara tradisional dengan akses transportasi yang mudah dengan jarak tempuh yang lebih dekat dengan Daerah tetangga.

b. Penerapan Teknologi Peternakan Belum Optimal

Populasi ternak semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi dan permintaan akan daging sapi, daging ayam, susu dan telur (produk peternakan) juga akan semakin meningkat guna membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya pertumbuhan populasi sapi tiap tahun, maka harus diiringi dengan penerapan teknologi peternakan sesuai dengan perkembangan jaman baik dalam hal budidaya maupun pengolahan hasil peternakan, seperti pengembangan teknologi perbibitan ternak, pembangunan biogas sebagai sumber energi alternatif, pengolahan pupuk dari kotoran ternak, pengolahan pakan ternak dan pengolahan hasil peternakan lainnya.

c. Usaha Pengolahan Hasil Peternakan Belum Optimal

Usaha pengolahan hasil peternakan di Kabupaten Tanah Laut masih terbatas pada skala usaha rumah tangga. Permasalahan yang mendasar dalam memajukan usaha pengolahan hasil peternakan adalah masih lemahnya kemampuan sumber daya manusia (peternak dan pelaku usaha), kelembagaan usaha dan sumber permodalan. Selain itu masih adanya penyedia bahan pangan asal hewan yang belum memahami produk yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Ketersediaan pangan hewani yang ASUH merupakan manifestasi konkrit dari salah satu sasaran pembangunan di bidang keamanan pangan. Ketersediaan pangan yang ASUH dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Tingkat pengetahuan pelaku usaha masih terbatas dan belum memperhatikan secara maksimal mengenai sanitasi dan higienitas produk peternakan yang dihasilkan. Untuk menjamin keamanan produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), setiap unit usaha pengolahan produk peternakan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan higienitas pangan asal hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai persyaratan kelayakan dasar sistem jaminan dan mutu pangan. Penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada usaha produk peternakan memungkinkan untuk mengantisipasi terjadinya bahaya yang mengakibatkan ketidakamanan dan ketidaklayakan mutu produk peternakan yang diproduksi dan yang diedarkan, sehingga setiap pelaku usaha yang telah memperoleh NKV wajib mencantumkan nomor yang tercantum pada NKV tersebut.

- Akar permasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan pembangunan peternakan ke depan adalah :
1. Berkurangnya mutu genetik ternak dan masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan peternak dalam budidaya peternakan.
 2. Masih adanya kejadian kasus penyakit Jembrana, AI, Parasiter/Cacingan dan gangguan reproduksi pada sapi.
 3. Masih kurangnya pengawasan lalu lintas ternak.
 4. Pemahaman peternak terhadap teknologi peternakan masih rendah.
 5. Pengembangan usaha hasil produksi peternakan masih belum optimal.
 6. Masih banyak penyedia bahan pangan asal hewan belum memahami ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Secara lengkap, masalah utama, masalah, akar permasalahan serta isu strategis Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 15.
Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Percepatan Pertumbuhan Populasi Ternak Belum Sebanding dengan Konsumsi	1) Permintaan terhadap produk peternakan yang semakin meningkat	1) Turunnya mutu genetik ternak. 2) Masih terjadinya kasus penyakit ternak (Jembrana, AI, Parasiter/Cacingan dan Gangguan Reproduksi pada sapi). 3) Masih kurangnya Pengawasan lalu lintas ternak.
		2) Penerapan Teknologi Peternakan Belum Optimal	1) Pemahaman peternak terhadap pengembangan teknologi peternakan tepat guna masih rendah.
		3) Usaha Pengolahan Hasil Peternakan Belum Optimal	1) Masih rendahnya usaha pengolahan hasil peternakan. 2) Masih banyak penyedia bahan pangan asal hewan yang belum mehami ASUH (Aman, Suhat, Utuh dan Halal)

2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

VISI

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada periode 2018–2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI

Kata BERINTERAKSI pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

TERTATA : Secara umum, makna “tertata” adalah tertib administrasi dan tertib substansi. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi

teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

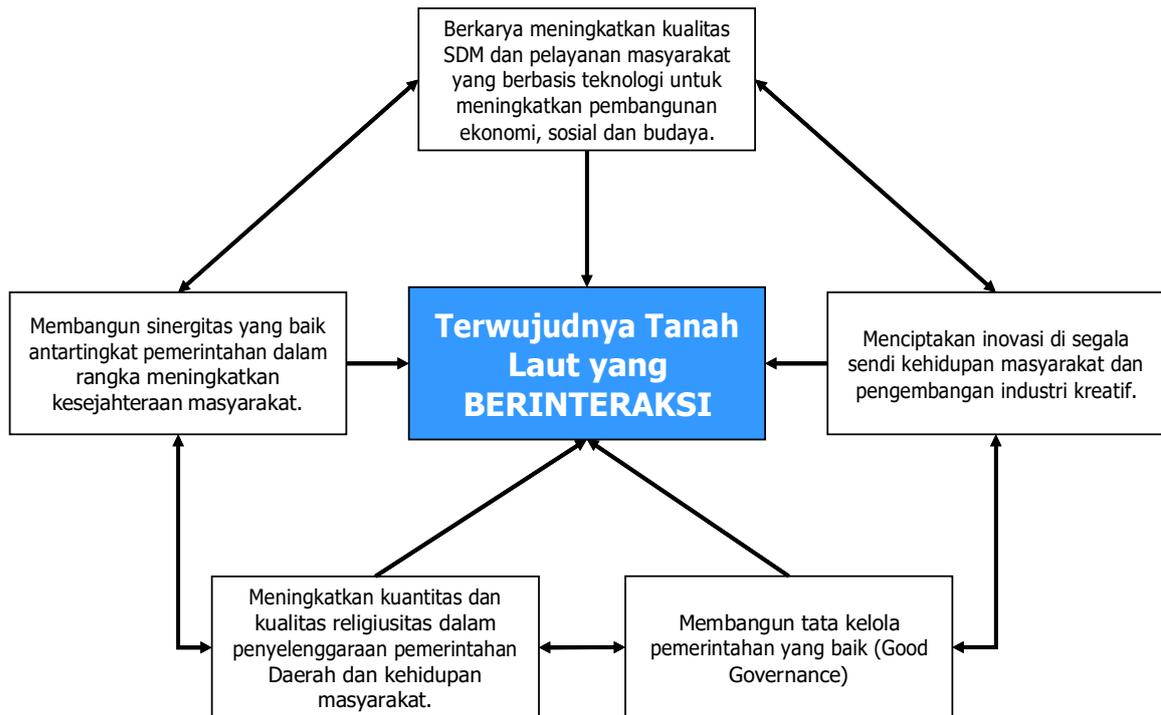
Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

MISI

Secara umum, "**Misi**" sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan agar visi Kabupaten Tanah Laut dapat direalisasikan. Berdasarkan Visi "**Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi ((BERkarya, INovatif, TERTata, Religius, Aktual dan SINergis)**" maka ditetapkan Misi daerah sebagai berikut :

- 1) **Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.**
- 2) Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- 3) **Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).**
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- 5) **Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

Keterkaitan Visi dan Misi yang disajikan pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	MISI
BERKARYA	1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
INOVASI	2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
RELIGIUS	4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut. Hal ini ditunjukkan melalui:

- ✓ **Misi 1, yaitu : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.**

Pada misi ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut berperan dalam :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilingkungan internal SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang

peternakan agar dapat memberikan ilmu dan pengetahuan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan kepada para petani peternak dalam mengembangkan usahanya di bidang peternakan sapi, kambing, itik, ayam dan lain sebagainya termasuk dalam hal pemeliharaan dan pengembangan hewan kesayangan seperti kucing, anjing dan lain sebagainya. Selain itu ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga harus dibekali pengetahuan dalam hal pengolahan hasil dari hewan ternak dan pengembangan usaha sektor peternakan, dan diberikan pengetahuan dalam mengelola kelembagaan usaha dengan baik dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sehingga pengetahuan itu bisa di ajarkan kepada masyarakat khususnya petani peternak.

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat peternak/kelompok tani dan pelaku usaha sektor peternakan dengan memberikan pengetahuan tentang teknologi yang terbaru dalam bidang peternakan dan tentunya untuk meningkatkan mutu hewan ternak guna peningkatan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Kabupaten Tanah Laut.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui pendidikan dan pelatihan dalam hal peningkatan produksi peternakan, peningkatan populasi ternak, meningkatkan produksi pangan hewani asal ternak sebagai penunjang pembangunan perekonomian masyarakat, dan pengembangan dibidang sosial dan budaya.

✓ **Misi 3**, yaitu : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pada misi ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut berperan dalam :

- Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan serta pemenuhan administrasi bagi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran sehingga dapat menunjang kegiatan pengadministrasian maupun pengurusan surat pertanggung jawaban terhadap kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- Meningkatkan pengelolaan bidang kepegawaian yang efektif dan efisien bagi Aparatur Sipil Negara dinas peternakan dan kesehatan hewan dalam hal pelayanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengurusan karis/karsu, dan lain sebagainya sehingga ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya terutama dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kesehatan hewan secara khusus.
- Meningkatkan pengelolaan administrasi perkantoran, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan dengan baik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

✓ **Misi 5**, yaitu : Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada misi ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut berperan dalam :

- Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi, Sumber Daya Manusia dalam hal ini SDM petani peternak dan pelaku agribisnis serta Kelembagaan dan pengembangan usaha pada sektor peternakan.
- Menekan kejadian penyakit ternak, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk peternakan melalui penanganan kesehatan hewan, pengawasan terhadap produk asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) sehingga produk hewan/ternak yang beredar di masyarakat dapat terjamin keamanannya, kesehatannya dan kehalalannya agar masyarakat bisa mengkonsumsi produk asal hewan dengan perasaan tenang dan nyaman, hal ini juga merupakan salah satu factor penunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang melakukan usaha dibidang peternakan maupun pengolahan hasil peternakan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 16. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No.	Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	1)Kebutuhan produk peternakan yang semakin meningkat.	2) Turunnya mutu genetic ternak. 3) Masih terjadinya kasus penyakit ternak (jembrana, AI, Parasiter/Cacingan dan Gangguan Reproduksi pada sapi). 4) Masih kurangnya pengawasan lalu lintas ternak. 5) Kurangnya ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan usaha sektor peternakan.	1) Intensifikasi Inseminasi Buatan (IB). 2) Potensi pakan ternak yang belum termanfaatkan dengan optimal. 3) Meningkatkan usaha budidaya ternak. 4) Globalisasi komunikasi dan informasi menuntut pelayanan kesehatan hewan prima yang membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai dibidang kesehatan hewan. 5) Adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan usaha sektor peternakan.
2.	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).	1) Penerapan Teknologi Peternakan Belum Optimal.	1) Pemahaman peternak terhadap pengembangan teknologi	1) Adanya lomba inovasi teknologi tepat guna yang diadakan oleh

			<p>peternakan tepat guna masih rendah.</p> <p>2)Kurangunya pengetahuan dalam hal Peningkatan Mutu Hewan Ternak.</p> <p>3)Kurangunya pengetahuan ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal peningkatan produksi peternakan, peningkatan populasi ternak.</p> <p>4)Kurangunya pengetahuan ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal peningkatan produksi pangan hewani asal ternak.</p> <p>5)Kurangunya pengetahuan ASN Disnak Keswan dalam pengelolaan administrasi perkantoran, perencanaan, keuangan, evaluasi.</p>	<p>pemerintah.</p> <p>2)Adanya Pendidikan dan Pelatihan teknologi pengolahan pakan ternak.</p> <p>3)Adanya Pendidikan dan Pelatihan dalam hal kelembagaan usaha peternakan.</p> <p>4)Adanya Pelatihan secara berkala terhadap kelompok petani peternak dalam hal peningkatan mutu hewan ternak, peningkatan produksi peternakan.</p> <p>5)Adanya Pelatihan untuk ASN dalam hal peningkatan populasi ternak, peningkatan produksi pangan hewani asal ternak.</p> <p>6)Adanya pelatihan pengelolaan administrasi perkantoran, perencanaan, keuangan, evaluasi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan</p>
--	--	--	--	--

<p>3.</p>	<p>Membangun Sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>1) Usaha pengolahan hasil peternakan belum optimal</p>	<p>1)Masih rendahnya usaha pengolahan hasil peternakan. 2)Masih banyak penyedia bahan pangan asal hewan yang memahami ASUH(Aman, Sehat, Utuh dan Halal). 3)Masih kurangnya sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>yang baik (Good Governance)</p> <p>1)Adanya program pemerintah dalam pemberian subsidi bunga melalui perbankan dan CSR dengan bunga 0%' 2)Pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat dalam konsumsi gizi dan pemenuhan pangan asal hewan yang ASUH. 3)Adanya bimbingan teknis peningkatan sumber daya manusia untuk petani peternak guna peningkatan populasi ternak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
-----------	--	---	--	--

3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 17. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Ditjen PKH	Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya produksi pangan asal hewan, daya saing dan pendapatan peternak	1) Belum adanya regulasi yang mendorong berkembangnya usaha peternakan 2) Belum berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar. 3) Masih rendahnya akses peternak terhadap teknologi peternakan. 4) Belum berkembangnya usaha pengolahan hasil peternakan.	1) Regulasi impor daging yang berbasis pada harga bukan pada kebutuhan 2) Turunnya mutu genetik ternak disebabkan oleh terjadinya inbreeding (kawin sedarah) sehingga keturunan yang dihasilkan semakin buruk kualitasnya. 3) Terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas di lapangan. 4) Terbatasnya kemampuan petani untuk mengakses permodalan dari Bank.	1. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktifitas. 2. Intensifikasi Inseminasi Buatan dalam perbaikan keturunan ternak. 3. Potensi pengembangan sektor peternakan di Kabupaten Tanah Laut sangat baik (Sapi, Kerbau, Kambing, Ayam Buras, Ayam Ras Pedaging/Petelur dan Itik). 4. Adanya program pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan pinjaman modal usaha dengan bunga 0%.

Tabel 18. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DISBUNNAK	Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya mandiri pangan dan kontribusi sektor pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turunnya mutu genetik ternak. 2. Masih terjadinya kejadian penyakit dan kematian pada hewan ternak masyarakat. 3. Berkurangnya lahan penggembalaan rakyat. 4. Masih rendahnya akses peternak terhadap teknologi peternakan. 5. Belum berkembangnya usaha pengolahan hasil peternakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat. 2. Kurangnya tenaga teknis yang menangani kesehatan dan penanggulangan penyakit ternak. 3. Belum optimalnya kerjasama usaha pengembangan usaha peternakan dengan pihak ketiga. 4. Terbatasnya kemampuan petani untuk mengakses permodalan dari Bank. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktifitas. 2. Intensifikasi Inseminasi Buatan dalam perbaikan keturunan ternak. 3. Potensi pengembangan sektor peternakan di Kabupaten Tanah Laut sangat baik, sebagai pendorong investasi dari pihak ketiga. 4. Adanya program pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan pinjaman modal usaha dengan bunga 0%.

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk didalamnya bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sementara itu ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Sedangkan secara keseluruhan kewilayahan Kabupaten Tanah Laut berkembang, kumpium, dan terunggul dibagi kedalam 3 (tiga) koridor pembangunan ekonomi yaitu:

KORIDOR 1 :

Meliputi kecamatan Bati-bati, Tambang Ulang, Kurau dan Bumi Makmur. Fokus sector yang dibangun meliputi :

1. Industri perdagangan dan jasa
2. Pertanian
3. Perikanan Tangkap

KORIDOR 2 :

Meliputi Kecamatan Pelaihari, Bajuin, Takisung dan Panyipatan. Fokus sektor yang dibangun meliputi :

1. Perkebunan
2. Peternakan
3. Pariwisata

KORIDOR 3 :

Meliputi Kecamatan Batu Ampar, Jorong, dan Kintap. Fokus sektor yang dibangun meliputi :

1. Pertambangan
2. Perkebunan
3. Perikanan
4. Pelabuhan

Berdasarkan koridor fokus pembangunan tersebut diatas, pembangunan peternakan diwujudkan dengan pola ruang yang meliputi kawasan peternakan yang terdiri atas.

1. Wilayah Pengembangan Kawasan pembibitan ternak sapi bali fokus pada Kecamatan Payipatan dan Bajuin.
2. Wilayah Pengembangan Kawasan pembibitan ternak sapi Crossing fokus pada Kecamatan Pelaihari dan Takisung
3. Wilayah Pengembangan Kawasan penggemukan sapi potong fokus pada Kecamatan Pelaihari dan Takisung
4. Wilayah Pengembangan Kawasan pembibitan ternak kerbau kalang/ rawa/ darat fokus pada Kecamatan Bajuin, Bati-bati, Jorong
5. Wilayah Pengembangan Kawasan itik Alabio fokus pada Kecamatan Bumi Makmur dan Bati – bati
6. Wilayah pengembangan ternak kambing fokus pada Kecamatan Pelaihari, Bajuin, Batu Ampar, Jorong, dan Kintap

b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan KLHS Kabupaten Tanah Laut digunakan untuk memberikan penilaian mengenai daya tampung dan daya dukung lingkungan terhadap implementasi indikator- indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). KLHS memberikan deskripsi-deskripsi isu-isu strategis kelingkungan untuk diangkat dan dibahas dalam dokumen perencanaan wilayah yaitu RPJMD. Perumusan arah kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan dalam KLHS merupakan masukan dalam perumusan arah dan strategi kebijakan dalam RPJMD.

KLHS memberikan penilaian dampak lingkungan terhadap sosial budaya Kabupaten Tanah Laut. Secara umum, kondisi sosial Kabupaten Tanah Laut direpresentasikan dengan pencapaian target-target isu-isu strategis sosial. Isu-isu sosial tersebut banyak bersinggungan dengan indikator-indikator TPB.

Berdasarkan data-data pencapaian yang ada, masalah kemiskinan merupakan isu yang mendasar sesuai TPB 1 dengan data yang cukup lengkap. Tren yang berkembang adalah terjadinya penurunan angka kemiskinan sehingga masalah kemiskinan dapat diangkat sebagai isu strategis dalam RPJMD. Arahan dan strategi kebijakan mengatasi masalah kemiskinan perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perencanaan wilayah.

Isu keberlanjutan infrastruktur merupakan isu penting dalam perencanaan wilayah Kabupaten Tanah Laut. Infrastruktur berperan dalam pengembangan perekonomian wilayah karena memudahkan berjalannya kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada. Infrastruktur yang potensial dikembangkan adalah infrastuktur pengembangan biogas sebagai bahan bakar alternatif. Masalah infrastruktur bukan menjadi isu strategis yang dapat diangkat dan dibahas dalam RPJMD, namun keberlanjutan infrastruktur diperlukan dalam mempermudah pengembangan perekonomian di Kabupaten Tanah Laut. Infrastruktur meliputi jaringan jalan maupun aksesibilitas lainnya termasuk fasilitas perhubungan seperti pelabuhan. Penilaian keberlanjutan infrastruktur penting dalam mendukung pencapaian target-target lainnya menurut TPB.

Arahan dan strategi dalam KLHS menekankan pada pengembangan wilayah, terutama dari pengembangan ekonomi berdasarkan kondisi daya tampung dan daya dukung lingkungan yang ada. Perekonomian dikembangkan dari berbagai sektor, seperti pariwisata dan perikanan. Kedua sektor tersebut memanfaatkan potensi pesisir yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut, termasuk adanya pelabuhan-pelabuhan di wilayah tersebut. Pengembangan perekonomian wilayah merupakan kunci dalam perkembangan wilayah sehingga perlu ditetulkan arahan dan kebijakan strategis dalam RPJMD.

Hasil dari FGD ini yaitu terdapat 85 c yang terekam. Langkah selanjutnya, dari 85 masalah tersebut, kemudian dilakukan klasifikasi agar memudahkan dalam memahami kelompok-kelompok permasalahan. Klasifikasi yang telah dilakukan kemudian menghasilkan 18 tema dalam isu strategis hasil dari FGD, dimana Sektor Pertanian dan Peternakan berada pada tema No. 11 yaitu tertuang didalam Tabel 19 dibawah ini.

Tabel 19. Klasifikasi Tema Isu Strategis Hasil FGD Multi-Pihak

No	Tema Isu	Isu Strategis
11	Pertanian dan Peternakan	Pemasaran hasil pertanian
		Pengembangan produk jagung
		Pupuk subsidi
		Kelembagaan petani
		Pabrik pengolahan hasil
		Pengolahan limbah
		Kesehatan hewan
		Kualitas bibit ternak
		Sarpras terbatas
		Pakan Ternak
		Kondisi Pasar Hewan

Isu strategis yang berkembang didalam FGD multipihak di atas, juga tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, tim penyusun kemudian menganalisis keterkaitan dengan unsur-unsur pembentuk wilayah. Apakah dari semua unsur

pembentuk wilayah ini telah terakomodir didalam isu startegis diatas. Unsur pembentuk wilayah yang dimaksud adalah komponen-komponen yang harus ada di dalam melaksanakan aktivitas pembangunan wilayah, sehingga dapat menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan tujuan secara komprehensif dan berkelanjutan. Adapun unsur-unsur pembentuk wilayah yang dimaksud tertuang dalam Gambar dibawah ini.



Gambar Unsur Pembentuk Wilayah sebagai syarat Aktivitas Pembangunan Wilayah

Terdapat dua unsur atau komponen yang belum disebutkan didalam pemetaan isu strategis saat proses FGD yaitu komponen politik Kelembagaan dan komponen organisasi spasial atau keruangan. Komponen politik Kelembagaan yang dimaksud salah satunya terkait dengan kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai aktivitas politik demokrasi di wilayah Tanah Laut, seperti PILPRES, PILEG, sampai dengan Pemelihan Umum Serentak untuk Kepala Desa. Sedangkan terkait dengan komponen organisasi spasial sangat erat kaitannya dengan sistem kota-kota atau hubungan antar wilayah baik itu intra region (di dalam wilayah Tanah Laut) maupun inter-region (keterkaitan antara Tanah Laut dengan wilayah lain). Sistem organisasi spasial ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan komponen-komponen wilayah lainnya.

Di samping itu, keberadaan peraturan baru terkait dengan penyusunan KLHS untuk RPJMD yang dikeluarkan oleh Menteri dalam negeri patut menjadi perhatian. Aturan baru tersebut tertuang di dalam permendagri nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pada aturan ini diarahkan untuk memasukkan agenda pembangunan berkelanjutan yang tertuang didalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada RPJMD melalui kajian lingkungan hidup strategis. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yang setiap tujuan kemudian terdapat beberapa target turunannya, akan tetapi tidak semua tujuan pembangunan berkelanjutan ini relevan dengan wilayah Tanah Laut. Oleh sebab itu, pemetaan isu strategis disini berfungsi untuk merumuskan isu strategis utama dari sekian banyak target dan tujuan dari TPB. Rumusan ini yang kemudian akan dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan dan sasaran dari RPJMD setelah dikompilasi dengan beberapa rumusan isu strategis baik yang berasal dari RPJMD Teknokratik, FGD, maupun hasil

analisis dari tim penyusun. Isu strategis hasil dari rumusan TPB tertuang didalam Tabel 20.

Tabel 20. Pemilihan Isu Strategis Utama didalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut

No.	TPB	Isu Strategis Utama
2.	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asupan gizi makanan pada anak dan penduduk usia dewasa. 2. Peningkatan nilai tambah produk pertanian untuk daya tawar sektor pertanian berkelanjutan

Berdasarkan beberapa aktivitas dalam merumuskan isu strategis, baik dari dokumen RPJMD Teknokratik, Hasil FGD, rumusan isu strategis utama dari proses pensarian beberapa target TPB, serta hasil analisis tim penyusun, maka ditetapkan isu strategis utama yang akan menjadi pertimbangan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dimana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut tertuang pada bidang BIDANG PEREKONOMIAN WILAYAH yang terdiri dari :

1. Pengembangan Potensi Pariwisata berkelanjutan
2. Pengentasan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
3. Potensi Kelautan dan Perikanan
4. Pengembangan Sektor Pertanian, Peternakan, dan Pertambangan
5. Peningkatan nilai tambah produk pertanian untuk daya tawar sektor pertanianberkelanjutan
6. Penyediaan lapangan kerja dan wirausaha skala UMKM
7. Peningkatan nilai tambah industri kecil dan manufaktur
8. Penanganan desa tertinggal menuju desa mandiri
9. Pengembangan kemitraan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan wilayah Tanah Laut.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pendalaman terhadap tantangan serta sasaran strategis dalam mengeksekusi setiap program pembangunan yang terkait dengan isu strategis. Tantangan atau permasalahan yang dimaksud yaitu bagaimana prediksi kedepan jika isu strategis ini akan dilaksanakan, pengaruhnya terhadap dampak serta jika isu strategis ini tidak dilaksanakan. Selanjutnya memetakan sasaran strategis yang dimaksudkan adalah kondisi ideal atau capaian yang akan ditetapkan dalam melaksanakan pembangunan yang terkait dengan isu strategis ini. Rumusan isu strategis yang kemudian diturunkan pada tantangan pelaksanaan serta sasaran strategis dapat tertuang dalam Tabel 21 berikut ini.

Tabel 21. Rumusan Isu Strategis Utama, Permasalahan serta Sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No	Isu Strategis		Permasalahan/ Tantangan	Sasaran Strategis/ Capaian
	Bidang	Sub Bidang		
3	Bidang Perekonomian	Pengembangan Sektor Pertanian, Peternakan	Nilai Tambang dari sektor Primer yang	Peningkatan nilai tambah

Wilayah	dan Pertambangan	Minim	sektor primer
	Peningkatan nilai tambah produk pertanian untuk daya tawar sektor pertanian berkelanjutan	Pelaku bisnis di sektor ini yang menyentuh skala mikro masih minim	Hubungan langsung antara pelaku skala makro dan mikro
	Penyediaan lapangan kerja dan wirausaha skala UMKM	Pengetahuan peluang usaha yang memanfaatkan potensi lokal masih Minim	Pengetahuan masyarakat perlu ditingkatkan
	Peningkatan nilai tambah industri kecil dan manufaktur	Kendala akses modal usaha	Akses modal usaha dan kreatifitas ditingkatkan
	Pengembangan kemitraan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan wilayah Tanah Laut	Perlu aturan khusus yang mengikat kewajiban perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan tanah laut	Kebijakan dan regulasi khusus terkait partisipasi dunia usaha

5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor dari pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari : Gambaran pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.

Faktor - faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut akan membimbing dan mengarahkan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan.

Dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini akan terkait dengan Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal. Untuk itu perlu mengenal kondisi internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (controllable) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal yang sifatnya relatif kurang dikuasai (uncontrollable) yang berguna untuk mengetahui peluang dan ancaman, dengan menggunakan pendekatan analisis Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman) atau SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yaitu:

1. Kekuatan (Strength)

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, antara lain:

- 1) Tersedianya SDM dan kelembagaan.
- 2) Undang-Undang No. 41 tahun 2014.
- 3) Regulasi Pemerintah Kabupaten.
- 4) Dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi, Perguruan Tinggi dan Swasta.
- 5) Tersedianya kawasan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.
- 6) Tersedianya kawasan lahan eks tambang.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut hingga saat ini masih dijumpai beberapa kelemahan internal baik dengan didalam kelembagaan dinas maupun secara teknis di lapangan. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kelemahan yang dapat ditekan seminimal mungkin, antara lain :

- 1) Menurunnya mutu genetik ternak khususnya sapi potong.
- 2) Masih adanya pemotongan betina produktif khususnya sapi/kerbau/kambing lokal.
- 3) Penguasaan teknologi peternakan di tingkat petani ternak relatif masih rendah.
- 4) Kurangnya tenaga teknis di lapangan.
- 5) Pemanfaatan sumber permodalan belum optimal.
- 6) Masih rendahnya usaha pengolahan hasil sektor peternakan.
- 7) Masih rendahnya kualitas pangan asal hewan.
- 8) Masih banyak kasus kejadian penyakit

3. Peluang (*Opportunity*)

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membuat strategi dan kebijakan pembangunan peternakan, antara lain :

- 1) Kebutuhan terhadap produk peternakan yang semakin meningkat.
- 2) Tersedianya sumber daya pakan lokal potensial.
- 3) Meningkatnya usaha budidaya ternak.
- 4) Potensi daerah dalam pengembangan peternakan yang sangat mendukung.
- 5) Akses permodalan dari pemerintah Daerah.

4. Ancaman (*Threats*)

Di samping peluang yang ada, faktor eksternal yang merupakan ancaman bagi pembangunan peternakan juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan lima tahun ke depan, antara lain :

- 1) Lalu lintas ternak dan produk peternakan.
- 2) Ancaman penyakit hewan menular strategis.
- 3) Kurangnya pengawasan terhadap kualitas produk peternakan.

Tahap selanjutnya berdasarkan Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadikan Critical Success Faktor kedalam 4 (empat) strategi, yaitu :

1. **Strategi Peluang - Kekuatan (SO)**, yaitu mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang.

- 1) Pemenuhan kebutuhan produk peternakan melalui Regulasi Pemerintah Kabupaten.
 - 2) Pengembangan ternak terintegrasi dengan kawasan pertanian tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan lahan eks tambang.
2. **Strategi Ancaman – Kekuatan (ST)**, yaitu memanfaatkan Kekuatan untuk menghadapi ancaman.
- 1) Menekan kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis melalui penerapan Undang-undang Nomor 41 tahun 2014.
 - 2) Peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas produk peternakan melalui pemberdayaan SDM dan kelembagaan.
3. **Strategi Peluang – Kelemahan (WO)**, yaitu meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang.
- 1) Peningkatan populasi dan produktivitas ternak untuk pemenuhan kebutuhan produk peternakan masyarakat.
 - 2) Peningkatan penguasaan teknologi peternakan dalam rangka pemanfaatan sumber pakan lokal dan limbah ternak.
4. **Strategi Ancaman – Kelemahan (WT)**, yaitu meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman
- 1) Optimalisasi pemanfaatan sumber permodalan untuk pengembangan usaha sektor peternakan.
 - 2) Menurunkan pemotongan betina produktif sapi/kerbau/kambing lokal melalui peningkatan pengawasan pemotongan ternak.

Adapun analisis SWOT Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Analisis SWOT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut

Faktor	Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya SDM dan kelembagaan. 2) Undang-Undang No. 41 tahun 2014. 3) Regulasi Pemerintah Kabupaten. 4) Dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi, Perguruan Tinggi dan Swasta. 5) Tersedianya kawasan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan. 6) Tersedianya kawasan lahan eks tambang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menurunnya mutu genetik ternak khususnya sapi potong. 2) Masih adanya pemotongan betina produktif khususnya sapi/kerbau/kambing lokal. 3) Penguasaan teknologi peternakan di tingkat petani ternak relatif masih rendah. 4) Kurangnya tenaga teknis di lapangan. 5) Pemanfaatan sumber permodalan belum optimal. 6) Masih rendahnya usaha pengolahan hasil sektor peternakan. 7) Masih rendahnya kualitas pangan asal hewan. 8) Masih banyak kasus kejadian penyakit
Eksternal		
Oppertunity (Peluang)	Strategi S - O	Strategi W - O
1) Kebutuhan terhadap produk	1) Pemenuhan kebutuhan	1) Peningkatan populasi dan

<p>peternakan yang semakin meningkat.</p> <p>2) Tersedianya sumber daya pakan lokal potensial.</p> <p>3) Meningkatnya usaha budidaya ternak.</p> <p>4) Potensi daerah dalam pengembangan peternakan yang sangat mendukung.</p> <p>5) Akses permodalan dari pemerintah Daerah.</p>	<p>produk peternakan melalui Regulasi Pemerintah Kabupaten.</p> <p>2) Pengembangan ternak terintegrasi dengan kawasan pertanian tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan lahan eks tambang.</p>	<p>produktivitas ternak untuk pemenuhan kebutuhan produk peternakan masyarakat.</p> <p>2) Peningkatan penguasaan teknologi peternakan dalam rangka pemanfaatan sumber pakan lokal dan limbah ternak.</p>
Threat (Ancaman)	Strategi S - T	Strategi W - T
<p>1) Lalu lintas ternak dan produk peternakan.</p> <p>2) Ancaman penyakit hewan menular strategis.</p> <p>3) Kurangnya pengawasan terhadap kualitas produk peternakan.</p>	<p>1) Menekan kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis melalui penerapan Undang-undang Nomor 41 tahun 2014.</p> <p>2) Peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas produk peternakan melalui pemberdayaan SDM dan kelembagaan.</p>	<p>1) Optimalisasi pemanfaatan sumber permodalan untuk pengembangan usaha sektor peternakan.</p> <p>2) Menurunkan pemotongan betina produktif sapi/kerbau/kambing lokal melalui peningkatan pengawasan pemotongan ternak.</p>

Berdasarkan strategi-strategi di atas ditentukan strategi yang tepat ntuk dijadikan kunci keberhasilan dengan mempertimbangkan keterkaitan strategi dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan penilaian terhadap keterkaitan tersebut diperoleh 3 (tiga) kunci keberhasilan yang merupakan faktor kunci/penentu keberhasilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dalam membangun peternakan, yaitu :

1. Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi, SDM dan Kelembagaan serta pengembangan usaha sektor peternakan.
2. Menekan kejadian Penyakit Hewan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk peternakan melalui penanganan kesehatan hewan, pengawasan terhadap produk peternakan dan penanganan Pasca Panen serta Pengolahan Hasil Peternakan
3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan serta pemenuhan adminitrasi dan sarana prasarana perkantoran, dan kepegawaian yang efektif dan efisien.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut

a. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari apa yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, dan program. Penetapan tujuan Strategis ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang dimiliki, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi, SDM dan kelembagaan serta pengembangan usaha sektor peternakan, dengan indikator tujuan adalah:
 - Produksi Daging (Ton) dan Produksi Telur (Ton).
2. Menekan kejadian penyakit hewan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk peternakan melalui penanganan kesehatan hewan, pengawasan terhadap produk peternakan dan penanganan pasca panen serta pengolahan hasil, dengan indikator tujuan adalah: - Intensitas pelayanan kesehatan hewan (Ekor) dan Pangan asal hewan yang ASUH (%).
3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan serta pemenuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, kepegawaian yang efektif dan efisien, dengan indikator tujuan adalah: - Terkelolanya administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan (%).

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam seluruh kegiatannya. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang dan berorientasi pada hasil. Sasaran diikuti dengan indikator sasaran, yang merupakan tanda, ukuran, kriteria yang menyatakan apakah suatu sasaran yang ditetapkan tercapai atau tidak.

Sasaran dan indikator sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

1. Sasaran yang akan dicapai atas tujuan, Meningkatkan Produksi peternakan melalui peningkatan populasi, SDM dan kelembagaan serta pengembangan usaha sektor peternakan adalah:

Meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak, dengan indikator kinerja

sasaran : -Persentase peningkatan produksi Daging dan Telur.

2. Sasaran yang akan dicapai atas tujuan, Menekan kejadian penyakit hewan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk peternakan melalui penanganan kesehatan hewan, pengawasan terhadap produk peternakan dan penanganan pasca panen serta pengolahan hasil adalah:
 - Meningkatnya Status Kesehatan**, dengan indikator kinerja sasaran: Persentase status kesehatan hewan.
 - Meningkatnya pengawasan terhadap produk peternakan**, dengan indikator kinerja sasaran : Persentase ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH.
3. Sasaran yang akan dicapai atas tujuan, Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan serta pemenuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, kepegawaian yang efektif dan efisien, adalah: -**Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan** , dengan indikator kinerja sasaran adalah:
 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD adalah sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam periode tertentu, sinergi dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 yang telah ditetapkan, maka dirumuskan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam periode tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.25. sebagai berikut.

Tabel 23.

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target kinerja tujuan pada tahun ke-					Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke-					
			2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi, SDM dan kelembagaan serta pengembangan usaha sektor peternakan	Produksi Daging (Ton)	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500	Meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak.	Persentase Peningkatan Produksi Daging dan Telur	:					
									Daging :						
									a. Sapi Potong	1	1,1	1,2	1,3	1,4	
									b. Kerbau	1	1	1	1	1	
									c. Kambing	1	1,2	1,3	1,4	1,5	
									d. Domba	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	
									e. Ayam Buras	1	1	1	1	1	
									f. Ayam Ras Petelur	1	1	1	1	1	
									g. Ayam Ras Pedaging	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	
									h. Itik	1	1	1	1	1	
									Telur :						
									a. Ayam Buras	1	1,5	2	2,5	3	
									b. Ayam Ras Petelur	1	1,2	1,3	1,4	1,5	
									c. Itik	1	1,2	1,3	1,4	1,5	
		Produksi Telur (Ton)	85.000	87.000	90.000	92.000	95.000								
								Meningkatnya populasi ternak sapi potong	Persentase angka kebuntingan ternak sapi potong	55	60	65	70	70	
									Persentase angka kelahiran ternak sapi potong	75	77	80	80	80	
							Meningkatnya pengelolaan aset ternak daerah	Persentase peningkatan pengelolaan aset ternak daerah	3	4	5	6	7		
							Meningkatnya pengembangan usaha peternakan	Persentase pelaku usaha bermitra dengan pihak lain	1	2	3	4	5		
								Persentase poktan yang dapat mengembangkan usahanya	5	10	15	20	25		
							Meningkatnya pengembangan lembaga, data dan informasi sektor peternakan	Persentase informasi peternakan yang dikelola dengan baik	1	1	1	1	1		
								Persentase sarana dan prasarana peternakan yang terpenuhi dan terdistribusi dengan lancar	100	100	100	100	100		
2	Menekan kejadian Penyakit Hewan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk peternakan melalui penanganan kesehatan hewan, pengawasan terhadap produk peternakan dan penanganan Pasca Panen serta Pengolahan	Intensitas pelayanan kesehatan hewan (Ekor)	6.000	6.200	7.300	7.400	8.500	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Status Kesehatan Hewan	81	82	83	84	85	
		Pangan asal hewan yang ASUH (%)	100	100	100	100	100	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Produk peternakan	Persentase ketersediaan pangan asal hewan	100	100	100	100	100	

	Hasil														
									Meningkatnya kesehatan ternak sapi potong, ayam buras, ayam ras	Persentase penurunan angka kematian ternak sapi potong, ayam buras dan ayam ras	1,3, 2,2, 1,6	1, 2,2, 1,6	1, 2,2, 1,6	1, 2,2, 1,6	0,5, 2,2, 1,6
									Meningkatnya ketersediaan pangan asalhewan yang ASUH	Persentase produk hasil ternak yang ASUH	100	100	100	100	100
									Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan RPH	Persentase sarana dan prasarana RPH yang berstandar	55	65	75	80	85
									Meningkatnya penanganan pasca panen produksi hasil peternakan	Jumlah pelaku usaha yang terampil dalam penanganan produksi hasil peternakan	1	2	3	4	5
3	Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan serta pemenuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, kepegawaian yang efektif dan efisien	Terkelolanya administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan (%).	100	100	100	100	100	Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	BB	BB	BB	BB	A	
								Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan	Persentase terkelolanya administrasi perkantoran dan kepegawaian	100	100	100	100	100	
								Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi	28	28	28	28	28	

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, berdasarkan RPJMD Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 – 2023. Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, serta dengan memperhatikan berbagai hal yang dapat mempengaruhi kinerja, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu merumuskan suatu Strategi dari berbagai faktor tersebut, baik dari sisi internal maupun eksternal, maka strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dalam membangun peternakan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas ternak.
- 2) Pengembangan peternakan dengan pendekatan kawasan dan komoditas unggulan, melalui Pemanfaatan lahan secara optimal dengan pola simbiosis mutualisme antara ternak dengan tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan dan eks tambang.
- 3) Peningkatan pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis.
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas ternak dan produk hasil peternakan
- 5) Peningkatan peran swasta dalam pengembangan usaha sektor peternakan.
- 6) Pengembangan usaha pengolahan limbah peternakan.
- 7) Penerapan teknologi peternakan tepat guna yang ramah lingkungan.
- 8) Adopsi dan inovasi pengembangan dan pengolahan pakan ternak berkualitas.
- 9) Peningkatan promosi dan pemasaran produk hasil peternakan.
- 10) Peningkatan Sumber Daya Manusia peternak dan pelaku usaha untuk menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing.
- 11) Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana perkantoran dan kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 12) Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran, serta Strategi yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan, maka dirumuskan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 dalam membangun peternakan, yaitu:

- 1) Peningkatan pengelolaan dan pemenuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, dan kepegawaian yang efektif dan efisien.
- 2) Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 3) Penurunan resiko inbreeding melalui Intensifikasi Kawin Alam (INKA).
- 4) Peningkatan angka kelahiran, memperpendek jarak kelahiran (calving interval) dan peningkatan bobot lahir.
- 5) Pengembangan komponen agribisnis peternakan.
- 6) Pengembangan pola integrasi sapi dengan tanaman.
- 7) Pengembangan kawasan peternakan.

- 8) Penguatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan hewan (Puskeswan dan Check Point).
- 9) Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui pengobatan, dan vaksinasi.
- 10) Peningkatan investasi, industrialisasi peternakan dan peran swasta melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber pembiayaan lainnya.
- 11) Pengembangan teknologi pakan ternak dan pengawasan mutu pakan ternak.
- 12) Perbaikan mutu genetik sumber daya genetik ternak asli Kabupaten Tanah Laut (Kijang dan Kerbau Rawa).
- 13) Peningkatan kualitas bibit ternak melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB).
- 14) Penguatan prasarana dan sarana Inseminasi Buatan (IB).
- 15) Peningkatan penerapan teknik budidaya ternak yang baik (Good Farming Practice).
- 16) Peningkatan kualitas sumber daya manusia peternak dan pelaku usaha peternakan
- 17) Perbaikan standarisasi produk peternakan dan sistem pendukung peternakan.
- 18) Peningkatan prasarana dan sarana peternakan, baik sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal.
- 19) Peningkatan pengawasan lalu lintas ternak.
- 20) Peningkatan pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner.
- 21) Peningkatan penerapan Public Awareness (kesejahteraan hewan) melalui sosialisasi kepada konsumen, peternak dan pelaku usaha.
- 22) Kajian dan pelatihan pengolahan limbah peternakan.
- 23) Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- 24) Pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas dan pupuk organik yang ramah lingkungan.
- 25) Kajian dan pelatihan pengolahan pakan ternak yang berkualitas dengan bahan baku yang tersedia di Kabupaten Tanah Laut.
- 26) Meningkatkan mekanisme pengumpulan, pemutahiran data dan informasi sektor peternakan yang lengkap, akurat dan kontinyu.

Keterkaitan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24
Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI I : Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi			
MISI 1 : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1) Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi, SDM dan Kelembagaan serta pengembangan usaha sektor peternakan	1) Meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak	1) Peningkatan produksi dan produktivitas ternak	1) Penurunan resiko inbreeding melalui Intensifikasi Kawin Alam (INKA). 2) Peningkatan angka kelahiran, memperpendek jarak kelahiran (calving interval) dan peningkatan bobot lahir. 3) Pengembangan teknologi pakan ternak dan pengawasan mutu pakan ternak. 4) Perbaikan mutu genetik sumber daya genetik ternak asli Kabupaten Tanah Laut (Kijang dan Kerbau Rawa). 5) Peningkatan kualitas bibit ternak melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB). 6) Penguatan prasarana dan sarana Inseminasi Buatan (IB). 7) Peningkatan penerapan teknik budidaya ternak yang baik (Good Farming Practice). 8) Peningkatan penerapan Public Awareness (kesejahteraan hewan) melalui sosialisasi kepada konsumen, peternak dan pelaku usaha.
		2) Peningkatan peran swasta dalam pengembangan usaha sektor peternakan	1) Pengembangan komponen agribisnis peternakan. 2) Peningkatan investasi, industrialisasi peternakan dan peran swasta melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber pembiayaan lainnya.
		3) Peningkatan Sumber Daya Manusia peternak dan pelaku usaha untuk	1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia peternak dan pelaku usaha peternakan
		4) Peningkatan promosi dan pemasaran produk hasil peternakan.	1) Perbaikan standarisasi produk peternakan dan sistem pendukung peternakan.
		5) Penerapan teknologi peternakan tepat guna yang ramah lingkungan.	1) Peningkatan prasarana dan sarana peternakan, baik sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran sehingga dapat bersaing dipasaran 2) Pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas dan pupuk organik yang ramah lingkungan

VISI I : Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi			
MISI 1 : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2) Menekan kejadian Penyakit Hewan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk peternakan melalui penanganan kesehatan hewan, pengawasan terhadap produk peternakan dan penanganan Pasca Panen serta Pengolahan Hasil Peternakan	1) Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	1) Peningkatan pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis	1) Penguatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan hewan (Puskeswan dan Check Point). 2) Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui pengobatan, dan vaksinasi.
	2) Meningkatnya Pengawasan Terhadap Produk Peternakan	1) Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas ternak dan produk hasil peternakan	1) Peningkatan pengawasan lalu lintas ternak. 2) Peningkatan pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner.
3) Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan serta pemenuhan adminitrasi dan sarana prasarana perkantoran, kepegawaian yang efektif dan efisien.	1) Meningkatnya pengelolaan adminitrasi perkantoran, dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan.	1) Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana perkantoran dan kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2) Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.	1) Peningkatan pengelolaan dan pemenuhan adminitrasi dan sarana prasarana perkantoran, dan kepegawaian yang efektif dan efisien. 1) Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2) Meningkatkan mekanisme pengumpulan, pemutahiran data dan informasi sektor peternakan yang lengkap, akurat dan kontinyu.
MISI 2 : Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1) Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi, SDM dan Kelembagaan serta pengembangan usaha sektor peternakan	1) Meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak	1) Pengembangan peternakan dengan pendekatan kawasan dan komoditas unggulan, melalui Pemanfaatan lahan secara optimal dengan pola simbiosis mutualisme antara ternak dengan tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan dan eks tambang.	1) Pengembangan pola integrasi sapi dengan tanaman. 2) Pengembangan kawasan peternakan.
		2) Adopsi dan inovasi pengembangan dan pengolahan pakan ternak berkualitas.	1) Kajian dan pelatihan pengolahan pakan ternak yang berkualitas dengan bahan baku yang tersedia di Kabupaten Tanah Laut.
		3) Pengembangan usaha pengolahan limbah peternakan	1) Kajian dan pelatihan pengolahan limbah peternakan. 2) Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel T-C.27. berikut ini.

Tabel 25.

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019

T ujuan	Sasaran	Kode	P ro gram dan Kegiatan	Indikator Kinerja T ujuan, Sasaran, P ro gram (O utco me) dan Kegiatan (Output)	D ata C apaian pada Tahun A wal P erencanaan (2017)	2019		2020		2021		2022		2023		Ko ndisi Kinerja pada akhir perio de R enstra SKPD	Unit Kerja SKPD P enang-gungjawab	Lo kasi					
						T arget	Rp	T arget	Rp	T arget	Rp	T arget	Rp	T arget	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
M eningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan po putasi, SD M dan Kelembagaan serta pengembangan usaha sektor peternakan				P roduksi D aging (T on)	9,009	10,500		11,000		11,500		12,000		12,500		57,500							
				P roduksi Telur (T on)	75,385	85,000		87,000		90,000		92,000		95,000		449,000							
M eningkatnya produksi pangan hewani asal ternak				P ersentase P eningkatan P roduksi D aging dan D aging :	Kg																		
				a. Sapi P otong	268,212	1	1,1	1,2	1,3	1,4	6												
				b. Kerbau	50,204	1	1	1	1	5													
				c. Kambing	12,608	1	1,2	1,3	1,4	6,4													
				d. D omba	408	1,1	1,2	1,3	1,4	6,5													
				e. Ayam B uras	500,787	1	1	1	1	5													
				f. Ayam R as P etelur	1,244,736	1	1	1	1	5													
				g. Ayam R as P edaging	6,859,018	1,1	1,2	1,3	1,4	6,5													
				h. Itik	70,958	1	1	1	1	5													
				T elur :																			
				a. Ayam B uras	2,055,704	1	1,5	2	2,5	10													
				b. Ayam R as P etelur	72,008,607	1	1,2	1,3	1,4	6,4													
				c. Itik	1,318,854	1	1,2	1,3	1,4	6,4													
3.03.3.03.02.22	P ro gram P eningkatan P roduksi Hasil P eternakan		P oputasi ternak	a. Sapi P otong	75,642	87,000	868,727,860																
				b. Sapi P erah	24	30																	
				c. Kerbau	3,641	3,787																	
				d. Kambing	20,829	22,079																	
				e. Ayam B uras	2,512,527	2,663,279																	
				f. Ayam R as P etelur	6,857,963	7,269,441																	
				g. Ayam R as P edaging	51,365,593	54,447,528																	
				h. Itik	192,333	198,103																	
				3.03.3.03.02.22.03.	P endistribusian bibit ternak kepada masyarakat			Jumlah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat			709,168,360												
									a. Sapi P otong (Ekor)	10		23											
b. Kambing (Ekor)	0	35																					
3.03.3.03.02.22.06.	P embelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak		Jumlah penyebaran bibit rumput (Ha)		2	32,900,000																	
				Jumlah pemeliharaan demplot pakan (Ha)	0.5		0.5																
				Jumlah sampel pakan ternak yang layak (Sampel)	5		8																
3.03.3.03.02.22.08	P engembangan agribisnis peternakan		Jumlah peserta pertemuan petani/wirausaha muda bidang peternakan (Orang)		25	35,999,700																	
				Jumlah P etani yang mengikut Asuransi Usaha Ternak Sap/Kerbau (AUTS/K)	100		50																
				Jumlah P eserta Sosialisasi permodalan usaha	15		50																
3.03.3.03.02.22.11	P endistribusian semen bibit sapi unggul dan pelaksanaan Inseminasi buatan		Jumlah intensifikasi IB (Dosis)	10000	10000	23,700,000																	
				Jumlah angka kelahiran ternak sapi potong (Ekor)	5600		5600																
3.03.3.03.02.22.12	P engembangan data dan Informasi		Jumlah Terkelolaanya data dan informasi sektor peternakan (Do)	1	1	44,999,800																	
3.03.3.03.02.22.15	P eningkatan Mutu Bahan Pangan Asal Ternak		Jumlah bahan pangan asal ternak yang bersertifikat	5	2	21,960,000																	

RENCANA STRATEGIS 2018 -2023

T ujuan	Sasaran	Kode	P ro gram dan Kegiatan	Indikator Kinerja T ujuan, Sasaran, P ro gram (Output) dan Kegiatan (Output)	D ata C apaian pada Tahun A wal P erencanaan (2017)	2019		2020		2021		2022		2023		Ko ndisi Kinerja pada akhir perio de Rencana SKP D	Unit Kerja SKP D P enang-gungjawab	Lo kasi
						T arget	Rp	T arget	Rp	T arget	Rp	T arget	Rp	T arget	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		4.04.3.03.02.18	P ro gram P eningkatan dan P engembangan P engolaan A set D daerah	P ersentase pengolaan aset ternak D daerah	7	3	17,987,500											
		4.04.3.03.02.18.08	M o nito ring, Evaluasi dan Pelaporan Aset Daerah	Jumlah aset ternak daerah yang bergulir dimasyarakat (Eko r)	1250	1200	17,987,500											
				Jumlah aset ternak yang telah dikembalikan ke daerah (Eko r)	24	30												
		3.03.3.03.02.23	P ro gram P eningkatan P emasaran Hasil P ro duksi P eternakan	P ersentase pelaku usaha B inaan yang bermitra dengan pihak lain	5	1	88,720,050											
		3.03.3.03.02.23.05	P ro mosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah pro duksi peternakan yang dapat dipasarkan (P ro duk)	5	5	49,720,400											
		3.03.3.03.02.23.08	P engolahan Informasi P ermintaan pasar atas hasil pro duksi peternakan masyarakat	Jumlah info rmasi pasar atas hasil produksi peternakan yang akurat dan dapat diakses (Informasi)	12	12	22,499,650											
		3.03.3.03.02.23.10	P enyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil P ro duksi P eternakan yang akan di P asarkan	Jumlah pro duk hasil peternakan yang kualitas dan teknis kemasaannya meningkat (P ro duk)	2	2	16,500,000											
		3.03.3.03.02.15	P ro gram P eningkatan Kesejahteraan P etani	P ersentase po ktan yang dapat mengembangkan usahanya (%)	10	2	141,301,450											
		3.03.3.03.02.15.01	P elatihan P etani dan P elaku Agribisnis	Jumlah P eternak terlatih (Orang)	120	175	105,085,800											
		3.03.3.03.02.15.03	P eningkatan Kemampuan Lembaga P etani	Jumlah P enilaian Kelo mpo k Tani Berprestasi (Kecamatan)	11	11	36,215,650											
		3.03.3.03.02.18	P ro gram P eningkatan P enerapan Tekno lo gi P eternakan	P ersentase sarana dan prasarana peternakan yang terdistribusi dengan	100	100	384,773,250											
		3.03.3.03.02.18.10	P engadaan sarana dan prasarana tekno lo gi peternakan tepat guna	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana peternakan yang terdistribusi (Unit)	30	4	328,144,500											
		3.03.3.03.02.18.11	P elatihan dan bimbingan pengo perasian tekno lo gi peternakan tepat guna	Jumlah kelo mpo k tani yang terlatih dalam pengo perasian tekno lo gi peternakan tepat guna (Po ktan)	30	4	29,628,750											
		3.03.3.03.02.26.04	P enelitian dan P engembangan tekno lo gi pasca panen dan pengo lahan hasil	Jumlah pro duk pasca panen hasil peternakan yang dapat dikembangkan (P ro duk)	14	2	27,000,000											
M enekan kejadian P enyakit Hewan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pro duk peternakan melalui penangan kesehatan hewan, pengawasan terhadap pro duk peternakan dan penanganan P asca P anen serta P engo lahan Hasil				Intensitas pelayanan kesehatan hewan (Eko r)	5,000	6,000												
				P angan asal hewan yang ASUH (%)	100	100												
	M eningkatkan Status Kesehatan			P ersentase Status Kesehatan Hewan		81												
	M eningkatkan P engawasan Terhadap P ro duk P eternakan dan penanganan P asca P anen serta P engo lahan Hasil			P ersentase ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH	100	100												
		3.03.3.03.02.21	P ro gram P encegahan dan P enanggulangan P enyakit Ternak	P ersentase penurunan angka kematian ternak			# REF1											
				a. Sapi P o tong	1.00	1												
				b. Sapi P erah	0.00	0												
				c. Kerbau	0.30	0.5												
				d. Kambing	0.25	0.3												
				e. Ayam B uras	4.50	3												
				f. Ayam R as P etelur	3.00	3												
				g. Ayam R as P edaging	3.14	5												
				h. Itik	7.00	7												
				P ersentase pro duk hasil ternak yang sehat	100	100												
				P ersentase pelayanan kesehatan hewan	6.20	6.5												
				Jumlah pengo lahan hasil pro duksi peternakan	14	16												

RENCANA STRATEGIS 2018 -2023

T ujuan	Sasaran	Kode	P ro gram dan Kegiatan	Indikator Kinerja T ujuan, Sasaran, P ro gram (Output) dan Kegiatan (Output)	D ata C apaian pada Tahun A wai perencanaan (2017)	2019		2020		2021		2022		2023		Ko ndisi Kinerja pada akhir perio de Rencana SKP D	Unit Kerja SKP D P enang-gungjawab	Lo kasi
						T arget	Rp	T arget	Rp	T arget	Rp	T arget	Rp	T arget	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		3.03.3.03.02.21.02	P emeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah Vaksinasi Ternak Sapi (Ekor)	21250	3000	88,041,461											
				Jumlah Vaksinasi Ternak Unggas/ayam buras (Ekor)		2500												
				Jumlah P engobatan Ternak Sapi (Ekor)		3000												
		3.03.3.03.02.21.07	Penyidikan dan Pemeriksaan P enyakit Ternak	Jumlah penyidikan dan pemeriksaan specimen/			18,024,500											
				a. Ulas Darah	400	200												
				b. Feces	750	400												
				c. Organ	0	5												
				d. Serum	500	400												
				Jumlah Dokumen M onitoring, Evaluasi dan P elaporan (Dok)	1	1												
				Tertaksannya P emetaan P enyakit Hewan di Kab. Tanah Laut (Dok)	0	1												
		3.03.3.03.02.21.10	P engendalian P enyakit Zoo no sa dan P enyediaan Pangan Asal Hewan Yang ASUH	Jumlah Vaksinasi Rabies (Dosis/Ekor).	500	500	16,305,750											
				Jumlah pengambilan specimen sampel produksi hasil ternak (daging sapi/daging ayam)	25	100												
				Jumlah Sosialisasi NKV (Kali)		1												
				Jumlah Pengawasan Hewan Qurban (Kecamatan)	11	11												
				Jumlah dokumen laporan mo nitoring dan evaluasi P asar Hewan dan RPH (Dok)	1	1												
M eningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelo laan serta pemenuhan administrasi dan sarana prasarana perkanto ran, dan				T erkelo lanya administrasi perkanto ran, kepegawain, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelapo ran (%).	100	100												
	M eningkatkan pengelo laan administrasi perkanto ran, kepegawain, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelapo ran.			N ilai Sistem A kuntabilitas Kinerja SKP D D inas P ernakan dan Kesehatan H ewan	B	BB												
		3.03.3.03.02.01	P ro gram P elayanan A dministrasi P erkanto ran	IKM	C ukup	B aik	1,166,353,854											
		3.03.3.03.02.01.02	Penyediaan Jasa Ko munikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	4	4	123,320,000											
		3.03.3.03.02.01.06	Penyediaan Jasa P emeliharaan dan Peizinan Kendaraan Dinas/Operasio nal	Jumlah	15	20	8,550,000											
		3.03.3.03.02.01.07	Penyediaan Jasa A dministrasi Keuangan	Jumlah	12	20	1,000,000											
		3.03.3.03.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis	14	16	8,999,374											
		3.03.3.03.02.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jenis	50	60	4,500,000											
		3.03.3.03.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK	25	22	33,989,200											
				Jumlah M aterial (Lembar)	200	200												
		3.03.3.03.02.01.11	Penyediaan B arang Cetakan dan P enggandaan	Jenis	12	12	34,649,000											
				Jumlah (Lembar)	8000	10000												
		3.03.3.03.02.01.12	Penyediaan Ko mpo nen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jenis	5	5	4,475,200											
				Jumlah (Liter)	150	200												
		3.03.3.03.02.01.13	Penyediaan P eralatan dan P eralatan Kantor	Jenis	5	5	2,240,000											
		3.03.3.03.02.01.15	Penyediaan B ahan B acaan dan P eraturan P erundang-undangan	Jumlah eksampler	1	1	1,800,000											
		3.03.3.03.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Orang	720	720	26,696,000											

RENCANA STRATEGIS 2018 -2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		3.03.3.03.02.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah SPPD	40	40	256,035,000											
		3.03.3.03.02.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Jumlah SPPD	500	500	75,000,000											
		3.03.3.03.02.01.20	Kegiatan Pemediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Jumlah PTT	25	27	585,100,080											
		3.03.3.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	IKM	Cukup	Baik	574,236,000											
		3.03.3.03.02.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah (Unit)	1	Unit	500,000,000											
		3.03.3.03.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah (Unit)	0	0	-											
		3.03.3.03.02.02.07	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	Jumlah (Buah/unit)	0	0	-											
		3.03.3.03.02.02.10	Pengadaan Meubeler	Jumlah (Buah)	0	0	-											
		3.03.3.03.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jenis	1	1	6,736,000											
		3.03.3.03.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis Pemeliharaan	3	3	67,500,000											
		3.03.3.03.02.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	0	0	-											
		3.03.3.03.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Unit	0	0	-											
		3.03.3.03.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	IKM	Cukup	Baik	-											
		3.03.3.03.02.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Stel	0	0	-											
		3.03.3.03.02.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Peralengkapannya	Jumlah Stel	0	0	-											
		3.03.3.03.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	IKM	Cukup	Baik	8,000,000											
		3.03.3.03.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN	0	2	8,000,000											
		3.03.3.03.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SA KIP	BB	BB	3,709,950											
		3.03.3.03.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	5	5	3,709,950											
		4.03.3.03.02.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Keseuaian antara pagu Renstra dengan Renja		94.39	6,298,000											
		4.03.3.03.02.21.18	Penyusunan Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)	Jumlah Dokumen	7	7	6,298,000											
			TOTAL				3,382,479,625											

Tabel 26

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 - 2023

T ujuan	Sasaran	Kode	P ro gram dan Kegiatan	Indikator Kinerja T ujuan, Sasaran, P ro gram (Output)	D ata Capaian pada Tahun A wal erencanaan (2017)	2019		2020		2021		2022		2023		K o ndisi Kinerja pada akhir perio de R enstra SKP D	Unit Kerja SKP D P enanggungjawab	Lo kasi			
						T arget	Rp	T arget	Rp	T arget	Rp	T arget	Rp	T arget	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
M eningkatkan pro duksi peternakan melalui peningkatan po putasi, SD M dan Kelembagaan serta pengembangan usaha sekt o r peternakan				P ro duksi D aging (T o n)	9,009	10,500		11,000		11,500		12,000		12,500		57,500					
				P ro duksi T elur (T o n)	75,385	85,000		87,000		90,000		92,000		95,000		449,000					
M eningkatnya pro duksi pangan hewani asal ternak				P ersentase P eningkatan P ro duksi D aging dan D aging :	Kg																
				a. Sapi P o t o ng	268,212	1		1,1		1,2		1,3		1,4		6					
				b. Kerbau	50,204	1		1		1		1		1		5					
				c. Kambing	12,608	1		1,2		1,3		1,4		1,5		6,4					
				d. D o mba	408	1,1		1,2		1,3		1,4		1,5		6,5					
				e. Ayam B uras	500,787	1		1		1		1		1		5					
				f. Ayam R as P etelur	1,244,736	1		1		1		1		1		5					
				g. Ayam R as P edaging	6,859,018	1,1		1,2		1,3		1,4		1,5		6,5					
				h. Itik	70,958	1		1		1		1		1		5					
				T elur :																	
				a. Ayam B uras	2,055,704	1		1,5		2		2,5		3		10					
				b. Ayam R as P etelur	72,008,607	1		1,2		1,3		1,4		1,5		6,4					
				c. Itik	1,318,854	1		1,2		1,3		1,4		1,5		6,4					
				3.03.3.03.02.22	Pro gram P eningkatan P ro duksi Hasil P eternakan	P o pulasi Ternak				840,000,000		1,360,000,000		1,460,000,000		1,560,000,000		99,000			
						a. Sapi P o t o ng	75,842	87,000		90,000		93,000		96,000		99,000		99,000			
		b. Sapi P erah	24	30		35		40		45		50		50							
		c. Kerbau	3,641	3,787		3,969		4,187		4,442		4,733		4,733							
		d. Kambing	20,829	22,079		23,537		25,203		27,078		29,161		29,161							
		e. Ayam B uras	2,512,527	2,663,279		2,888,404		2,713,529		2,738,654		2,763,780		2,763,780							
		f. Ayam R as P etelur	6,857,963	7,269,441		7,338,020		7,406,600		7,475,180		7,543,759		7,543,759							
		g. Ayam R as P edaging	51,365,593	54,447,528		54,961,184		55,474,840		55,988,496		56,502,152		56,502,152							
		h. Itik	192,333	198,103		200,026		201,950		203,873		205,796		205,796							
3.03.3.03.02.22.03.	P endistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Jumlah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat				750,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000							
		a. Sapi P otong (Ekor)	10	23		25		25		25		25		123							
		b. Kambing (Ekor)	0	35		35		35		35		35		175							
		c. Itik (Ekor)	0	4000		4000		4000		4000		4000		20000							
	Penelitian, Pengolahan dan pengembangan pakan ternak	Jumlah penyebaran bibit tumpat (Ha)	10			1	40,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	4							
		Jumlah pemeliharaan demplot pakan (Ha)	0.5			2		2		2		2		8							
		Jumlah sampel pakan ternak yang layak (Sampel)	5			8		8		8		8		32							
	P endistribusian semen bibit ternak unggul dan pelaksanaan inseminasi buatan	Jumlah intensifikasi IB (Dosis)	10000	10000		10000	50,000,000	10000	550,000,000	10000	650,000,000	10000	750,000,000	50000							
		Jumlah angka kelahiran ternak sapi potong (Ekor)	5600	5600		5800		6000		6200		6400		30000							
	P ro gram P embinaan dan pengembangan potensi desa	Jumlah berkembangnya Desa kawasan ternak	0	0		1	50,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	4							
	P embinaan dan pengembangan desa pro duksi ternak	Jumlah P embinaan dan P engembangan Desa P ro duksi Ternak Sapi Potong (Desa)	0	0		0	50,000,000	1	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	1							
		Jumlah P embinaan dan P engembangan Desa P ro duksi Ternak Kerbau Rawa (Desa)	0	0		0		0		1		0		1							
		Jumlah P embinaan dan P engembangan Desa P ro duksi Ternak Kambing (Desa)	0	0		0		0		0		1		1							
		Jumlah P embinaan dan P engembangan Desa P ro duksi Ternak Itik (Desa)	0	0		1		0		0		0		1							
	P ro gram Kelembagaan Usaha P rasarana dan sarana	P ersentase pelaku usaha binaan bermitra dengan pihak lain	5			2	710,000,000	3	735,000,000	4	740,000,000	5	745,000,000	15							
		P ersentase po ktan yang dapat mengembangkan usahanya	10			3		4		5		6		20							
		Jumlah data dan info msasi peternakan yang terkelola dengan	1			1		1		1		1		5							
		P ersentase terpenuhinya sarana dan prasarana peternakan	100			100		100		100		100		100							

RENCANA STRATEGIS 2018 -2023

	Peningkatan SDM dan Kemampuan Lembaga Petani Ternak	Jumlah Petani dan Peternak terlatih (orang)	120			130	90,000,000	140	95,000,000	150	100,000,000	160	105,000,000	580		
		Jumlah Penilaian Kelompok Tani berprestasi (kali)	11			11		11		11		11		11		
	Pengembangan data dan Informasi	Jumlah Terkelolanya data dan informasi sektor peternakan (Dok)	1			1	30,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1		
	Usaha, agribisnis dan Pro mosi hasil pro duksi peternakan unggulan daerah	Jumlah Petani yang mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUS/TK)	100			75	90,000,000	75	100,000,000	75	100,000,000	75	100,000,000	375		
		Jumlah Pelaku Usaha yang bermitra dengan pihak lain	15			4		6		8		10		30		
		Jumlah kontes ternak terlaksana (Kali)	0			1		1		1		1		4		
		Jumlah pro duksi peternakan yang dapat dipasarkan (Pro duk)	5			5		5		5		5		25		
		Jenis informasi pasar atas hasil pro duksi peternakan yang akurat dan dapat diakses (Informasi)	12			12		12		12		12		60		
	Penyediaan Prasarana dan Sarana peternakan	Jenis pengadaan sarana dan prasarana peternakan	1			5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	24		
Meningkatkan Kejadian Penyakit Hewan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pro duk peternakan melalui penanganan kesehatan hewan, pengawasan terhadap pro duk peternakan dan penanganan Pasca Panen serta Pengolahan Hasil		Intensitas pelayanan kesehatan hewan (Ekor)	5,000	6,000		6,200		7,300		7,400		8,500		35,400		
		Pangan asal hewan yang ASUH (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Meningkatnya Status Kesehatan	Persentase Status Kesehatan Hewan		81		82		83		84		85		85		
	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Pro duk Peternakan dan penanganan Pasca Panen serta Pengolahan Hasil	Persentase ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Penurunan Angka kematian ternak					95,000,000		275,000,000		300,000,000		335,000,000			
		a. Sapi Potong	1.0	1		1		0.75		0.75		0.5		0.5		
		b. Sapi Perah	0.0	0		0		0		0		0		0		
		c. Kerbau	0.3	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		
		d. Kambing	0.3	0.3		0.25		0.24		0.22		0.2		0.2		
		e. Ayam Buras	4.5	3		2.8		2.6		2.5		2.4		2.4		
		f. Ayam Ras Petelur	3.0	3		2.8		2.6		2.4		2.2		2.2		
		g. Ayam Ras Pedaging	3.1	5		4.5		4		3.5		3		3		
		h. Itik	7.0	7		6		5		4		4		4		
		Persentase pro duk hasil ternak yang sehat	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase pelayanan kesehatan hewan	6.2	6.5		6.5		6.7		6.7		7		33.4		
	3.03.3.03.02.21.02	Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah Vaksinasi Ternak Sapi (Ekor)	21250	3000	3250	40,000,000	3300	150,000,000	3350	175,000,000	3400	200,000,000	16300		
			Jumlah Vaksinasi Ternak Unggas (Ekor)		2500	2750		2800		2850		2900		13800		
			Jumlah Pengobatan Ternak Sapi (Ekor)		3000	3250		3300		3350		3400		16300		

RENCANA STRATEGIS 2018 -2023

	3.03.3.03.02.21.07	Penyidikan dan Pemenuhan Penyakit Ternak	Jumlah penyidikan dan pemeriksaan specimen/ a. Ulas Darah b. Feces c. Organ d. Serum Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan (Dok) Terlaksananya Pemetaan Penyakit Hewan di Kab. Tanah Laut (Dok)	400 750 0 500 1 0	200 400 5 400 1 1	200 400 7 400 1 1	25,000,000	200 400 8 400 1 1	40,000,000	200 400 9 400 1 1	40,000,000	200 400 10 400 1 1	50,000,000	1000 2000 39 2000 5 5			
	3.03.3.03.02.21.10	Pengendalian Penyakit Zoo no sa dan P enyediaan Pangan Asal Hewan Yang ASUH	Jumlah Vaksinasi Rabies (Dosis/Ekor), Jumlah pengambilan specimen sampel produksi hasil ternak (daging sapi) Jumlah pengambilan specimen sampel produksi hasil ternak (daging ayam) Jumlah Sosialisasi NKV (Kali) Jumlah Pengawasan Hewan Outban (Kecamatan) Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi P asar Hewan dan RPH (Dok)	500 25 100 1 11 0	500 25 75 1 11 1	600 25 75 2 11 1	30,000,000	650 25 100 3 11 1	85,000,000	700 25 125 4 11 1	85,000,000	750 25 150 5 11 1	85,000,000	3200 125 525 15 11 5			
	3.03.3.03.02.23	Program P eningkatan P emasaran Hasil P roduksi P eternakan	Jumlah P engembangan dan P eningkatan M utu serta Kualitas P roduksi hasil P eternakan	16		8	40,000,000	12	50,000,000	16	55,000,000	20	60,000,000	56			
		P enanganan pasca panen dan pengolahan hasil P eternakan	Jumlah produk pasca panen hasil peternakan yang dapat dikembangkan (Produk) Jumlah produk hasil peternakan yang kualitasnya meningkat (Produk)	14 2	2	4 4	40,000,000	6 6	50,000,000	8 8	55,000,000	10 10	60,000,000	30 30			
M eningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelo laan serta pemenuhan administrasi dan sarana prasarana perkanto ran, dan			T erkelo lany a administrasi perkanto ran, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelapo ran (%)	100		100		100		100		100	100	100			
		M eningkatkan pengelo laan administrasi perkanto ran, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelapo ran.	N ilai Sistem A kuntabilitas Kinerja SKP D D Inas P eternakan dan Kesehatan Hewan	B	BB	BB		BB		BB		A		A			
	3.03.3.03.02.01	Program P elayanan Administrasi P erkanto ran	IKM		C UKUP		1,229,000,000	BAIK	1,485,000,000	BAIK	1,500,000,000	SANGAT BAIK	1,510,000,000	BAIK			
	3.03.3.03.02.01.20	Kegiatan P enyediaan Jasa P enunjang Kinerja SKPD	Jumlah PTT (Orang)	27	27	27	600,000,000	30	660,000,000	30	675,000,000	30	685,000,000	1			
		P enyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah Jasa Surat M enyurat (Kali) Jenis Rekening Terbayar Jumlah KIR dan pertizinan kendaraan dinas/operasional terbayar (Buah/Unit) Jumlah jasa transaksi keuangan terbayar (Kali) Jumlah Materai Terbesar Jenis peralatan dan kelengkapan kebersihan yang dibeli Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (Buat/Unit) Jenis ATK terbeli Jenis jasa cetak Jumlah tersedianya jasa penggandaan (Lembar) Jumlah tersedianya bahan bakar (liter) Jumlah tersedianya komponen listrik (Jenis) Jumlah tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan (Eksampler) Jumlah makan dan minum rapat (Orang)	20 5 15 20 200 15 60 25 12 10000 200 5 1 720	0 5 15 20 200 15 60 22 12 10000 200 5 1 740	20 5 15 20 200 15 30 25 12 10000 200 5 1 750	304,000,000	20 5 15 20 200 15 30 25 12 10000 200 5 1 750	350,000,000	20 5 15 20 200 15 40 25 12 10000 200 5 1 800	350,000,000	20 5 15 20 200 15 40 25 12 10000 200 5 1 800	360,000,000	80 25 75 100 1000 75 200 122 60 50000 1000 25 5 3840			
		P enyediaan rapat-rapat, ko nsultasi, dan koordinasi	Jumlah SPPD Luar Daerah (Orang) Jumlah SPPD Dalam Daerah (Orang)	1 1	40 430	40 450	325,000,000	40 500	475,000,000	40 500	475,000,000	40 500	475,000,000	200 2380			

RENCANA STRATEGIS 2018 -2023

			Pro gram P emenuhan dan P eningkatan Sarana/ P arasarana Kerja dan Kualitas Sumber D aya M anusia	IKM				B A I K	1,232 ,000 ,000	B A I K	1,242 ,000 ,000	B A I K	894 ,000 ,000	S A N G A T B A I K	847 ,000 ,000	S A N G A T B A I K		
			Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah terbelinya kendaraan Dinas/Operasional (%/Unit Roda 2/Roda 4) (Unit)	0	0		1	350,000,000	1	250,000,000	1	60,000,000	1	25,000,000	4		
				Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	0	5		5		5		5		5		25		
				Jenis peralatan dan perlengkapan kantor terbeli	0	5		10		10		10		10		45		
				Jumlah Pengadaan Meubeler (B uah)	0	0		60		10		0		1		71		
			P emeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jenis pemeliharaan gedung kantor	2	7		2	95,000,000	2	105,000,000	2	110,000,000	2	115,000,000	15		
				Jumlah perbaikan peralatan kerja (B uah/Unit)	10	60		15		15		15		15		120		
				Jenis P emeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3	3		3		3		3		3		15		
			P embangunan gedung kantor	Jumlah P embangunan Gedung (Unit)	0	1		1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	5		
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	0		1	350,000,000	1	450,000,000	0	350,000,000	0	250,000,000	2		
			P eningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah ASN (Orang)	0	2		3	12,000,000	3	12,000,000	3	24,000,000	3	32,000,000	14		
			P engadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu terbeli (Steel)	0	0		72	75,000,000	0	75,000,000	72	0	0	75,000,000	144		
				Jumlah P engadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Steel)	0	0		72		0		72		0		144		
			Pro gram P erencanaan, P engendalian dan Evaluasi Kinerja	N ilai S A K I P	BB		BB	12,750,000	BB	20,500,000	BB	21,000,000	BB	21,000,000	BB	BB		
			P enyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Jumlah Tersusunnya Dokumen Perencanaan (DoK)	7	6		7	6,500,000	7	7,000,000	7	7,500,000	7	7,500,000	34		
			P enyusunan laporan keuangan	Jumlah Tersusunnya Laporan Keuangan (DoK)	1	0		1	2,500,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	4		
			P engendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah penyusunan sistem pelaporan kinerja yang akuntabel (DoK)	5	7		5	3,750,000	5	7,500,000	5	7,500,000	5	7,500,000	27		
				Jumlah Aset BMD tercatat	24			24		24		24		24		24		
			Pro gram P enyebaruasan Info rmasi dan	IKM			B A I K	90,000,000	B A I K	100,000,000	B A I K	105,000,000	S A N G A T B A I K	115,000,000	S A N G A T B A I K			
			P elaksanaan kegiatan pameran pembangunan	Jumlah Terikutinya Pameran Pembangunan (Kal)	5	0		5	50,000,000	5	60,000,000	5	60,000,000	5	70,000,000	20		
			P embuatan sistem informasi SKPD	Tersedianya sistem informasi SKPD (Sistem)	1	0		1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	4		
			Fasilitas pemasaran produk unggulan daerah	Jumlah terlaksananya fasilitas pemasaran produk unggulan daerah (Kali/Tahun)	0	0		1	25,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	4		
			TOTAL					4,298,750,000		5,327,500,000		5,135,000,000		5,253,000,000				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27.
Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ESSELON II									
1	Persentase Peningkatan Produksi Daging dan Telur Daging :	Kg							
	a. Sapi Potong	268,212		1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	6.0
	b. Kerbau	50,204		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0
	c. Kambing	12,608		1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	6.4
	d. Domba	408		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	6.5
	e. Ayam Buras	500,787		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0
	f. Ayam Ras Petelur	1,244,736		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0
	g. Ayam Ras Pedaging	6,859,018		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	6.5
	h. Itik	70,958		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0
	Telur :	Kg							
	a. Ayam Buras	2,055,704		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	10.0
	b. Ayam Ras Petelur	72,008,607		1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	6.4
	c. Itik	1,318,854		1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	6.4
2	Persentase Status Kesehatan Hewan			81	82	83	84	85	85
3	Persentase ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH			100	100	100	100	100	100
ESSELON III									
1	Populasi Ternak								
	a. Sapi Potong	75,642		87,000	90,000	93,000	96,000	99,000	99,000
	b. Sapi Perah	24		30	35	40	45	50	50
	c. Kerbau	3,641		3,787	3,969	4,187	4,442	4,733	4,733
	d. Kambing	20,829		22,079	23,537	25,203	27,078	29,161	29,161
	e. Ayam Buras	2,512,527		2,663,279	2,688,404	2,713,529	2,738,654	2,763,780	2,763,780
	f. Ayam Ras Petelur	6,857,963		7,269,441	7,338,020	7,406,600	7,475,180	7,543,759	7,543,759
	g. Ayam Ras Pedaging	51,365,593		54,447,528	54,961,184	55,474,840	55,988,496	56,502,152	56,502,152
	h. Itik	192,333		198,103	200,026	201,950	203,873	205,796	205,796
2	Jumlah berkembangnya Desa kawasan ternak	0.00		-	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
3	Persentase pelaku usaha binaan bermitra dengan pihak lain	5.00		-	2.00	3.00	4.00	5.00	14.00
4	Persentase poktan yang dapat mengembangkan usahanya	10.00		-	3.00	4.00	5.00	6.00	18.00
5	Jumlah data dan informasi peternakan yang terkelola dengan baik (Dok)	1.00		-	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
6	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana peternakan	100.00		-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Persentase pengelolaan aset ternak Daerah	7.00		3.00	-	-	-	-	3.00
8	Persentase pelaku usaha Binaan yang bermitra dengan pihak lain	5.00		1.00	-	-	-	-	1.00
9	Persentase poktan yang dapat mengembangkan usahanya	10.00		2.00	-	-	-	-	2.00
10	Persentase sarana dan prasarana peternakan yang terdistribusi dengan lancar	100.00		100.00	-	-	-	-	100.00
11	Persentase penurunan angka kematian ternak								
	a. Sapi Potong	1.00		1.00	-	-	-	-	0.50
	b. Sapi Perah	0.00		-	-	-	-	-	-
	c. Kerbau	0.30		0.50	-	-	-	-	0.50
	d. Kambing	0.25		0.30	-	-	-	-	0.30
	e. Ayam Buras	4.50		3.00	-	-	-	-	3.00
	f. Ayam Ras Petelur	3.00		3.00	-	-	-	-	3.00
	g. Ayam Ras Pedaging	3.14		5.00	-	-	-	-	5.00
	h. Itik	7.00		7.00	-	-	-	-	7.00

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Persentase produk hasil ternak yang sehat	100.00		100.00	-	-	-	-	100.00
13	Persentase pelayanan kesehatan hewan	6.20		6.50	-	-	-	-	6.50
14	Jumlah pengolahan hasil produksi peternakan	14.00		16.00	-	-	-	-	16.00
15	Persentase penurunan angka kematian ternak								-
	a. Sapi Potong	1.00		-	1.00	0.75	0.75	0.50	0.50
	b. Sapi Perah	0.00		-	-	-	-	-	-
	c. Kerbau	0.30		-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	d. Kambing	0.25		-	0.25	0.24	0.22	0.20	0.20
	e. Ayam Buras	4.50		-	2.80	2.60	2.50	2.40	2.40
	f. Ayam Ras Petelur	3.00		-	2.80	2.60	2.40	2.20	2.20
	g. Ayam Ras Pedaging	3.14		-	4.50	4.00	3.50	3.00	3.00
	h. Itik	7.00		-	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00
16	Persentase produk hasil ternak yang sehat	100.00		-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
17	Persentase pelayanan kesehatan hewan	6.20		-	6.50	6.70	6.70	7.00	7.00
18	Jumlah Pengembangan dan Peningkatan Mutu serta Kualitas Produksi hasil Peternakan	16.00		-	8.00	12.00	16.00	20.00	56.00
19	IKM terhadap pelayanan administrasi Perkantoran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			CUKUP					
	IKM terhadap pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian dan Perkantoran ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
20	IKM terhadap pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			CUKUP	-	-	-	-	100.00
21	IKM terhadap peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			CUKUP	-	-	-	-	-
22	IKM terhadap peningkatan Kompetensi ASN yang dipersyaratkan			CUKUP	-	-	-	-	100.00
23	IKM terhadap pemenuhan dan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
24	Nilai SAKIP SKPD	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
26	Kesesuaian antara pagu Renstra dengan Renja			94,39	-	-	-	-	100.00
28	IKM terhadap penyebaran Informasi dan Pelayanan SKPD				BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut periode 2018 – 2023 merupakan dokumen resmi perencanaan pembangunan peternakan untuk lima (5) tahun yang memuat visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan peternakan di Kabupaten Tanah Laut, yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat., yang menjadi tolok ukur dan sekaligus mengarahkan semua komponen internal (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) dan eksternal (Masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan seluruh aparaturnya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut) dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

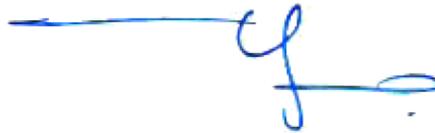
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 – 2023 akan menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Penyusunan Rencana Strategis juga bertujuan sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). RENSTRA ini juga diharapkan dapat memberikan layanan publik yang baik serta acuan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya sebagai fasilitator, stimulator, motivator, dan regulator.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyadari bahwa apa yang disajikan masih jauh dari sempurna, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran, tanggapan serta kritik yang membangun untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dapat dilaksanakan dengan baik melalui kerja ikhlas, cerdas dan tuntas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian visi RPJMD yakni **“TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi)”** .

Pelaihari, Februari 2019

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TANAH LAUT,



Ir. SUHARYO

NIP. 19640502 198703 1 020

LAMPIRAN

**POHON KINERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT**

ESS II

ESS III

ESS IV

KEPALA DINAS	
KINERJA UTAMA	
1	Meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak
2	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan
3	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Produk Peternakan
INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Persentase Peningkatan Produksi Daging dan Telur
2	Persentase Status Kesehatan Hewan
3	Persentase ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH

SEKRETARIAT	
KINERJA UTAMA	
1	Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan
INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	IKM terhadap pelayanan administrasi Perkantoran/Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	IKM terhadap pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian dan Perkantoran ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	IKM terhadap pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	IKM terhadap peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	IKM terhadap peningkatan Kompetensi ASN yang dipersyaratkan
6	IKM terhadap pemenuhan dan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
7	Nilai SAKIP SKPD
8	Kesesuaian antara pagu Renstra dengan Renja
9	IKM terhadap penyebarluasan Informasi dan Pelayanan SKPD

BIDANG PERBIBITAN, PRODUKSI DAN PAKAN TERNAK	
KINERJA UTAMA	
1	Meningkatnya Populasi ternak
2	Berkembangnya Desa kawasan ternak
INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Populasi Ternak
2	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Desa Produksi Ternak

IDANG KESWAN, KESMAVET, PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASI	
KINERJA UTAMA	
1	Menurunnya angka kematian ternak
2	Meningkatnya ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH
3	Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan
4	Meningkatnya mutu dan kualitas hasil produksi peternakan
INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Persentase penurunan angka kematian ternak
2	Persentase produk hasil ternak yang sehat
3	Persentase pelayanan kesehatan hewan
4	Jumlah Pengembangan dan Peningkatan Mutu serta Kualitas Produksi hasil Peternakan

BIDANG KELEMBAGAAN, USAHA, PRASARANA DAN SARANA	
KINERJA UTAMA	
1	Meningkatnya pengembangan usaha peternakan
2	Meningkatnya pengembangan lembaga, data dan informasi sektor peternakan
INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Persentase pelaku usaha binaan bermitra dengan pihak lain
2	Persentase poktan yang dapat mengembangkan usahanya
3	Jumlah data dan informasi peternakan yang terkelola dengan baik
4	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana peternakan

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
KINERJA UTAMA	
1	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana administrasi perkantoran
2	Menyusun data kepegawaian, evaluasi dan administrasi kepegawaian SKPD Dinas Peternakan dan Keswan
3	Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM
4	Menyusun dan merencanakan kebutuhan aset Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah Jasa Surat Menyurat (Kali)
2	Jenis Rekening Terbayar
3	Jumlah KIR dan perizinan kendaraan dinas/operasional terbayar (Buah/Unit)
4	Jumlah jasa transaksi keuangan terbayar (Kali)
5	Jumlah Materi Terbeli (Lembar)
6	Jenis peralatan dan kelengkapan kebersihan yang dibeli
7	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (Buah/Unit)
8	Jenis ATK terbeli
9	Jenis jasa cetak
10	Jumlah tersedianya jasa pengadaan (Lembar)
11	Jumlah tersedianya bahan bakar (liter)
12	Jumlah tersedianya komponen listrik (jenis)
13	Jumlah tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan (Eksampler)
14	Jumlah makan dan minum rapat (Orang)
15	Jumlah SPKD Luar Daerah (Orang)
16	Jumlah SPKD Dalam Daerah (Orang)
17	Jumlah terbelinya kendaraan Dinas/Operasional (N/Unit Roda 2/Roda 4) (Unit)
18	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
19	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor terbeli
20	Jumlah Pengadaan Meubeler (Buah)
21	Jenis pemeliharaan gedung kantor
22	Jumlah perbaikan peralatan kerja (Buah/Unit)
23	Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
24	Jumlah Pembangunan Gedung (Unit)
25	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Paket/Tahun)
26	Jumlah ASN (Orang)
27	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu terbeli (Steel)
28	Jumlah Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Perlengkapannya (Steel)
29	Jumlah Terikrutinya Pameran Pembangunan (Kali)
30	Tersedianya sistem informasi SKPD (Sistem)
31	Jumlah terlaksananya fasilitasi pemasaran produk peternakan daerah (Kali/Tahun)

KASUBBAG PERENC. KEUANGAN DAN EVALUASI	
KINERJA UTAMA	
1	Menyusun perencanaan, Keuangan dan Evaluasi yang berkualitas
2	Menyusun pelaporan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akuntabel
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah Tersusunnya Dokumen Perencanaan (Dok)
2	Jumlah Tersusunnya Laporan Keuangan (Dok)
3	Jumlah penyusunan sistem pelaporan kinerja yang akuntabel (Dok)

KASI KESEHATAN HEWAN	
KINERJA UTAMA	
1	Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan
2	Melaksanakan penyidikan dan pemeriksaan penyakit ternak
3	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah pengobatan dan vaksinasi
2	Jumlah penyidikan dan pemeriksaan specimen/ sampel (ulas darah, feces, organ dan serum)
3	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan
4	Terlaksananya Pemetaan Penyakit Hewan di Kab. Tanah Laut

KASI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
KINERJA UTAMA	
1	Melaksanakan Pengendalian Penyakit Zoonosa dan Pengawasan produk asal hewan
2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pasar Hewan dan RPH
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah Vaksinasi Rabies
2	Jumlah pengambilan specimen sampel produksi hasil ternak (Daging Sapi dan Daging Ayam)
3	Jumlah Sosialisasi NKV (Kali)
4	Jumlah Pengawasan Hewan Qurban (Kecamatan)
5	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi Pasar Hewan dan RPH (Dok)

KASI PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL	
KINERJA UTAMA	
1	Melaksanakan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah produk pasca panen hasil peternakan yang dapat dikembangkan
2	Jumlah produk hasil peternakan yang kualitasnya meningkat

KASI BUDIDAYA TERNAK	
KINERJA UTAMA	
1	Melaksanakan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
2	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
2	Jumlah aset ternak daerah yang bergulir dimasyarakat
3	Jumlah aset ternak yang telah dikembalikan ke daerah

KASI PERBIBITAN TERNAK	
KINERJA UTAMA	
1	Melaksanakan Peningkatan kualitas bibit ternak
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah Intensifikasi IB
2	Jumlah angka kelahiran ternak sapi potong

KASI PAKAN TERNAK	
KINERJA UTAMA	
1	Melaksanakan Peningkatan luas tanam, pendistribusian dan pengujian sampel Pakan Ternak
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah penyebaran bibit rumput
2	Jumlah pemeliharaan demplot pakan ternak
3	Jumlah sampel pakan ternak yang layak

KASI PRASARANA DAN SARANA	
KINERJA UTAMA	
1	Melaksanakan Penyediaan, Pengadaan dan Pendistribusian sarana dan prasarana
INDIKATOR KINERJA	
1	Jenis penyediaan, pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana

KASI USAHA, PROMOSI DAN INVESTASI	
KINERJA UTAMA	
1	Melaksanakan pengembangan Usaha, agribisnis dan Promosi hasil produksi peternakan unggulan daerah
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah Petani yang mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AU/TS/K)
2	Jumlah Pelaku Usaha yang bermitra dengan pihak lain
3	Jumlah kortes ternak terlaksana (Kali)
4	Jumlah produksi peternakan yang dapat dipasarkan (Produk)
5	Jenis informasi pasar atas hasil produksi peternakan yang akurat dan dapat diakses (Informasi)

KASI SDM, KELEMBAGAAN, DATA DAN INFORMASI	
KINERJA UTAMA	
1	Melaksanakan pelatihan dan pembinaan kelompok tani
2	Melaksanakan pembinaan kelembagaan kelompok tani
3	Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sektor peternakan
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah kelompok tani terlatih
2	Jumlah kelompok tani ternak berprestasi
3	Jumlah Terkelolanya data dan informasi sektor peternakan

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SOPD	Satuan	Target Renstra SOPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase peningkatan Populasi Ternak Sapi Potong	%	6	7	8	9	10	10.51	8.23	6.64	15.86	16.19	175.20	117.53	82.97	176.19	161.90
a.	Persentase angka kebuntingan ternak sapi potong	%	55	60	65	70	70	45.14	64.90	60.87	66.11	67.00	82.08	108.17	93.64	94.44	95.71
	1) Jumlah Intensifikasi IB	ekor	7,000	7,500	8,000	17,000	10,000	7,122	7,430	11,862	17,084	17,662	101.74	99.07	148.28	100.49	176.62
	2) Jumlah kebuntingan	ekor	3,850	4,500	5,200	11,900	7,000	3,215	4,822	7,220	11,294	11,833	83.51	107.16	138.85	94.91	169.04
b.	Persentase angka kelahiran ternak sapi potong	%	75	77	80	80	80	92	84	75	85	82	122.76	108.57	93.42	106.25	102.49
	1) Jumlah kelahiran	ekor	2,888	3,465	4,160	9,520	5,600	2,960	4,031	5,396	9,600	9,702	102.51	116.33	129.71	100.84	173.25
c.	Persentase peningkatan pengelolaan aset ternak Daerah	%	3	4	5	6	7	3.91	9.20	5.15	6.11		130.19	229.99	103.06	101.83	0.00
	1) Jumlah aset ternak daerah yang bergulir dimasyarakat	ekor	1,400	1,350	1,300	1,250	1,200	1,357	1,337	1,339	1,257	1,250	103.17	100.97	97.09	100.56	104.17
	2) Jumlah aset ternak yang telah dikembalikan ke daerah	ekor	50	55	60	65	70	53	123	69	38		106.00	223.64	115.00	58.46	0.00
d.	Jumlah penyebaran bibit rumput	Ha	2	2	2	2	2	2.5	2.5	0	25		13.5	125.00	125.00	0.00	1250.00
e.	Jumlah pemeliharaan demplot pakan	Ha	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
f.	Jumlah pengambilan sampel pakan ternak	Sampel	6	7	8	7	5	6	10	9	7	3	100.00	142.86	112.50	100.00	60.00
g.	Jumlah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	ekor	20	20	20	20	10	0	0	0	0	10	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
h.	Jumlah pelaku usaha bermitra dengan pihak lain	Pelaku Usaha	1	2	3	4	5	2	3	4	4		200.00	150.00	133.33	100.00	0.00
	1) Jumlah produksi peternakan yang dapat dipasarkan	Produk	5	7	8	10	15	7	9	12	14		140.00	128.57	150.00	140.00	0.00
	2) Jumlah informasi pasar atas hasil produksi peternakan yang akurat dan dapat diakses	Informasi	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
i.	Jumlah poktan yang dapat mengembangkan usahanya	Poktan	5	10	15	20	25	5	10	15	20		100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
	1) Jumlah Kelompok Tani terlatih	Poktan	5	10	15	20	25	5	10	15	20		100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
	2) Jumlah Kelompok Tani Berprestasi	Poktan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
j.	Jumlah informasi peternakan yang terkelola dengan baik	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	1) Jumlah informasi peternakan yang akurat dan bisa diakses	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
k.	Jumlah sarana dan prasarana peternakan yang terpenuhi dan terdistribusi dengan lancar																
	1) Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana pasar hewan yang sesuai standar	Unit	0	0	8	0	2	0	0	8	0		0.00	0.00	100.00	0.00	1.00
	2) Jumlah sarana dan prasarana teknologi peternakan yang terdistribusi	Unit	8	10	12	14	16	8	10	13	15		100.00	100.00	108.33	107.14	0.00
	3) Jumlah kelompok tani yang terlatih dalam pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Poktan	8	10	12	14	16	8	10	13	15		100	100	108.3333	107.14	0.00
2	Persentase penurunan angka Kematian Ternak																
a.	Persentase penurunan angka Kematian Ternak																
	1) Sapi / Kerbau/Kambing	%	1.3	1	1	1	0.5	0.86	0.43	0.31	1	2	151	232.56	322.58	100.00	25.00
	2) Ayam Buras	%	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	4.84	1.47	1.75	4.5	4.5	45	149.66	125.71	48.89	48.89
	3) Ayam Ras	%	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.94	2.47	5.36	3.14	4.18	170	64.78	29.85	50.96	38.28
b.	Jumlah pengobatan dan vaksinasi	ekor	3750	4000	4250	4500	4750	4050.00	4350.00	5000	4700		108	108.75	117.6471	104.44	0.00
c.	Jumlah pengambilan spacemen / sampel																
	1) Jumlah pengambilan specemen/ sampel ulas darah	Sampel	300	350	400	400	400	300	350	400	400		100	100	100	100.00	0.00
	2) Jumlah pengambilan specemen/ sampel feces	Sampel	550	600	650	700	750	550	600	650	660		100	100	100	94.29	0.00
3	Persentase tingkat pangan asal hewan yang ASUH	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100.00	0.00
a.	Persentase ternak yang sehat																
	1) Jumlah pengambilan specemen sampel produksi hasil ternak daging ayam	Sampel	40	40	40	100	100	40	40	25	100		100	100	62.5	100.00	0.00
	2) Jumlah pengambilan specemen sampel produksi hasil ternak daging sapi	Sampel	25	25	25	20	25	25	25	25	20		100	100	100	100.00	0.00
b.	Persentase sarana dan prasarana rumah potong hewan yang berstandar	%	55	65	75	80	85	55	65	75	75	75	100	100	100	93.75	88.24
	1) Jumlah sarana dan prasarana rumah potong hewan yang sesuai standar	Unit	2	2	2	0	2	2	2	2	0	0	100	100	100	0.00	1.00
c.	Jumlah pelaku usaha yang hasil produksinya meningkat	Pelaku Usaha	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	100	100	100	100.00	100.00
	1) Jumlah Pelaku Usaha terlatih	Pelaku Usaha	1	2	3	4	5	1	2	3	4	2	100	100	100	100.00	40.00
	2) Jumlah produk hasil olahan ternak yang berhasil dikembangkan	Produk	4	6	8	10	15	4	6	8	14	15	100	100	100	140.00	100.00

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tanah Laut

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400,000	1,000,000	-	-	-	-	32,000	-	-	-	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	-80,000	0
2. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	60,000,000	60,600,000	72,600,000	118,880,000	98,880,070	45,279,228	26,962,855	23,223,380	54,200,338	45,133,012	75.47	44.49	31.99	45.59	45.64	106,880,000	36,077,166
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	-	7,400,000	7,500,000	8,000,000	-	-	4,581,000	5,611,600	3,226,000	0.00	0.00	61.91	74.82	40.33	7,500,000	3,226,000
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	181,764,000	185,216,000	380,400,000	486,250,000	20,000,000	151,879,000	166,813,800	367,600,000	469,055,000	75,000	83.56	90.06	96.64	96.46	0.38	449,897,200	-30,300,800
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	7,800,000	7,435,000	12,000,000	36,780,000	10,000,000	4,800,000	7,350,000	8,961,000	34,292,000	1,847,500	61.54	98.86	74.68	93.24	18.48	35,220,000	887,500
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3,400,000	12,950,000	18,900,000	15,150,000	5,000,000	3,400,000	6,726,000	7,350,000	6,975,000	2,395,000	100.00	51.94	38.89	46.04	47.90	14,470,000	1,715,000
7. Penyediaan Alat Tulis kantor	56,695,000	60,922,000	55,000,000	42,784,000	28,585,000	51,810,000	51,215,700	49,140,500	37,112,000	25,784,500	91.38	84.07	89.35	86.74	90.20	31,445,000	15,422,500
8. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	6,587,000	9,075,000	10,000,000	31,390,000	30,000,000	6,508,750	7,002,750	7,967,250	20,107,500	9,305,600	98.81	77.17	79.67	64.06	31.02	30,072,600	8,003,850
9. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11,475,000	2,725,000	30,000,000	94,300,000	18,200,000	7,940,000	1,335,000	6,888,750	77,112,500	11,275,500	69.19	48.99	22.96	81.77	61.95	92,005,000	9,687,500
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	78,875,000	160,230,000	678,450,000	36,720,000	0	62,360,000	125,024,000	500,069,809	24,501,455	0	79.06	78.03	73.71	66.73	#DIV/0!	20,945,000	-12,472,000
11. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,920,000	1,500,000	4,280,482	4,411,000	3,840,000	3,780,000	1,110,000	85.61	88.22	76.80	76.83	74.00	3,920,000	253,904
12. Penyediaan Makanan dan Minuman	12,500,000	22,500,000	21,765,000	58,960,000	23,740,000	10,290,000	18,548,000	20,905,000	57,421,000	19,125,000	82.32	82.44	96.05	97.39	80.56	56,460,000	17,067,000
13. Rakor dan Koordinasi Ke Luar daerah	591,210,000	980,300,000	516,887,000	429,162,200	174,800,000	567,956,329	597,001,800	516,815,896	427,566,148	174,535,203	96.07	60.90	99.99	99.63	99.85	310,920,200	60,943,937
14. Rakor dan Koordinasi di dalam daerah	55,110,000	60,595,000	55,010,000	75,195,000	38,000,000	24,650,000	19,805,000	55,008,050	74,565,000	37,815,000	44.73	32.68	100.00	99.16	99.51	64,173,000	32,885,000
15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SOPD					405,000,000					291,200,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	71.90	0	291,200,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor				20,000,000					18,910,000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	94.55	#DIV/0!		
2. Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	228,100,000	124,600,000	-	-	-	220,620,000	105,225,900	-	-	26,132,000	96.72	84.45	0.00	0.00	1.00	-45,620,000	-17,992,000
3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	14,505,000	11,350,000	21,000,000	21,850,000	2,000,000	11,805,000	11,350,000	12,662,500	15,950,000.00		81.39	100.00	60.30	73.00	0.00	18,949,000	-2,361,000
4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	69,050,000	152,382,000	211,752,000	87,250,000	47,621,000	60,777,400	120,971,800	158,299,630	67,238,050		88.02	79.39	74.76	77.06	0.00	73,440,000	-12,155,480
5. Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas	-	373,650,000	-	-	-		365,681,000	-	-		0.00	97.87	0.00	0.00	0.00	0	0
6. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	-	1,249,400,000	-	-	-		817,394,000	-	-		0.00	65.42	0.00	0.00	0.00	0	0
7. Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional	-	20,600,000	6,300,000	-	-		17,965,000	6,300,000	-		0.00	87.21	100.00	0.00	0.00	0	0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	17,650,000	49,950,000	15,350,000	-	-	17,650,000	49,950,000	15,350,000	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	-3,530,000	-3,530,000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur																	

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	-	-	47,500,000	8,000,000	-	-	4,200,000	7,500,000.00									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7,610,000	12,984,000	8,480,000	1,245,000	1,250,000	5,242,500	3,971,250	7,195,000	844,000	379,000	68.89	30.59	84.85	67.79	30.32	-277,000	-669,500
Program Pengembangan data / informasi																	
1. Penyusunan Profile daerah	-	192,280,000	-	-	-	-	66,995,000	-	-	-	0.00	34.84	0.00	0.00	1.00	0	0
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah																	
1. Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah	-	155,895,000	139,440,000	80,295,000	-	-	59,140,500	112,185,500	79,068,500	-	0.00	37.94	80.45	98.47	#DIV/0!	80,295,000	0
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani																	
1. Pelatihan Petani dan Pelaku agribisnis	108,265,000	134,429,800	84,537,000	59,723,000	39,545,000	101,615,500	88,355,800	79,322,900	56,705,500	36,620,000	93.86	65.73	93.83	94.95	92.60	38,070,000	16,296,900
2. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	175,510,000	135,146,900	83,486,000	36,877,000	10,000,000	157,316,300	97,358,300	75,207,000	36,680,750	7,064,000	89.63	72.04	90.08	99.47	70.64	1,775,000	-24,399,260
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak																	
1. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular	208,329,000	284,515,000	101,308,500	161,548,000	96,770,000	202,070,300	228,147,040	76,498,500	147,609,700	87,915,500	97.00	80.19	75.51	91.37	90.85	119,882,200	47,501,440
2. Penyidikan dan pemeriksaan penyakit ternak	13,579,000	35,287,000	16,707,000	54,693,000	2,500,000	8,171,000	6,345,000	12,529,500	41,564,500	850,000	60.17	17.98	75.00	76.00	34.00	51,977,200	-784,200
3. Pengendalian penyakit zoonosa dan tersedianya pangan asal hewan yang ASUH	56,397,000	76,415,000	26,910,000	49,850,000	14,999,900	42,104,000	57,466,000	24,326,855	43,751,500	1,805,000	74.66	75.20	90.40	87.77	12.03	38,570,600	-6,615,800
4. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana RPH	673,350,000	1,719,889,000	431,732,000	0	-	655,922,800	1,236,313,000	418,669,300	-	-	97.41	71.88	96.97	#DIV/0!	#DIV/0!	-134,670,000	-131,184,560
Program Perencanaan Pembangunan Daerah																	
1. Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana Kerja (renja)	5,626,000	8,432,000	55,595,000	16,714,000	6,500,000	3,358,000	741,500	5,595,000	10,269,500	2,375,500	59.69	8.79	10.06	61.44	36.55	15,588,800	1,703,900
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan																	
1. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	384,068,000	724,519,000	339,030,000	38,193,000	40,000,000	355,430,200	36,043,000	249,080,190	31,841,000	26,544,000	92.54	4.97	73.47	83.37	66.36	-38,620,600	-44,542,040
2. Pembelian dan Pendistribusian vaksin dan pakan ternak	124,555,000	147,020,000	46,599,900	46,308,000	10,000,000	110,334,850	58,353,050	30,337,130	38,921,960	7,545,000	88.58	39.69	65.10	84.05	75.45	21,397,000	-14,521,970
3. Pengembangan agribisnis peternakan	287,030,000	191,325,000	152,807,000	50,670,000	10,000,000	182,209,300	153,191,600	149,883,000	42,063,000	9,635,000	63.48	80.07	98.09	83.01	96.35	-6,736,000	-26,806,860
4. Pendamping dana Tugas Pembantuan APBN	33,000,000	124,847,000	17,100,000	167,636,000	53,250,000	-	42,273,000	15,750,000	143,212,900	42,357,000	0.00	33.86	92.11	85.43	79.54	161,036,000	42,357,000
5. Pendistribusian semen bibit sapi unggul dan pelaksanaan inseminasi buatan	246,190,000	659,475,075	531,677,000	175,075,000	25,000,000	199,483,850	480,914,075	500,628,000	150,509,250	18,516,000	81.03	72.92	94.16	85.97	74.06	125,837,000	-21,380,770
6. Pengembangan Data dan Informasi					48,230,000					17,520,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	36.33	0	17,520,000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan																	
1. Pembangunan pusat-pusat etalase / eksebsi / promosi atas hasil produksi peternakan	766,313,000	1,384,589,900	1,365,528,419	-		620,804,920	1,159,854,590	1,174,306,000	-		81.01	83.77	86.00	0.00	1.00	-153,262,600	-124,160,984
2. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	186,707,000	107,424,800	78,736,500	45,626,500		163,018,500	52,654,400	57,173,500	34,419,000		87.31	49.02	72.61	75.44	#DIV/0!	8,285,100	-32,603,700
3. Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan	-	94,851,700	109,928,600	93,445,000	7,490,000	-	77,150,280	88,714,900	86,639,000	7,490,000	0.00	81.34	80.70	92.72	100.00	93,445,000	7,490,000
4. Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan yang akan di Pasarkan					10,000,000					7,970,000							
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan																	
1. Pengadaan Sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	332,706,000	297,710,000	201,670,000	165,785,000	35,575,000	272,029,500	213,792,290	185,526,003	146,327,750	25,950,800	81.76	71.81	91.99	88.26	72.95	99,243,800	-28,455,100
2. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan	174,832,000	214,400,000	101,890,000	93,324,000	35,190,000	145,587,750	127,506,750	96,446,350	57,101,500	27,195,000	83.27	59.47	94.66	61.19	77.28	58,357,600	-1,922,550
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah																	
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan aset daerah	154,985,000	175,000,000	189,900,000	100,065,500	14,980,000	94,022,900	118,128,000	129,544,500	74,092,050	2,279,200	60.67	67.50	68.22	74.04	15.21	69,068,500	-16,525,380
Total	5,339,173,000	10,426,916,175	6,248,376,919	3,012,164,200	1,372,605,970	4,570,728,359	6,885,460,030	5,258,081,893	2,623,518,951	978,970,315	86	66	84	87	71		

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran P

No.	Masalah Pokok	Masalah	
(1)	(2)	(3)	
1.	Percepatan Pertumbuhan Populasi Ternak Belum Sebanding dengan Konsumsi	1) Permintaan terhadap produk peternakan yang semakin meningkat	1) 2) 3)
		2) Penerapan Teknologi Peternakan Belum Optimal	1)
		3) Usaha Pengolahan Hasil Peternakan Belum Optimal	1) 2)

Pembangunan Daerah

Akar Masalah
(4)
Turunnya mutu genetik ternak. Masih terjadinya kasus penyakit ternak (Jembrana, AI, Parasiter/Cacingan dan Gangguan Reproduksi pada sapi). Masih kurangnya Pengawasan lalu lintas ternak.
Pemahaman peternak terhadap pengembangan teknologi peternakan tepat guna masih rendah.
Masih rendahnya usaha pengolahan hasil peternakan. Masih banyak penyedia bahan pangan asal hewan yang belum mehami ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi, SDM dan Kelembagaan serta pengembangan usaha sektor peternakan		Produksi Daging (Ton)	10,500	11,000	11,500	12,000	12,500
			Produksi Telur (Ton)	85,000	87,000	90,000	92,000	95,000
	Meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak		Persentase Peningkatan Produksi Daging dan Telur					
			Daging :					
			a. Sapi Potong	1	1.1	1.2	1.3	1.4
			b. Kerbau	1	1	1	1	1
			c. Kambing	1	1.2	1.3	1.4	1.5
			d. Domba	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
			e. Ayam Buras	1	1	1	1	1
			f. Ayam Ras Petelur	1	1	1	1	1
			g. Ayam Ras Pedaging	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
			h. Itik	1	1	1	1	1
			Telur :					
			a. Ayam Buras	1	1.5	2	2.5	3
b. Ayam Ras Petelur	1	1.2	1.3	1.4	1.5			
c. Itik	1	1.2	1.3	1.4	1.5			
2	Menekan kejadian Penyakit Hewan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk peternakan melalui penanganan kesehatan hewan, pengawasan terhadap produk peternakan dan penanganan Pasca Panen serta Pengolahan Hasil Peternakan		Intensitas pelayanan kesehatan hewan (Ekor)	6000	6200	7300	7400	8500
			Pangan asal hewan yang ASUH (%)	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Status Kesehatan Hewan	81	82	83	84
3	Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan serta pemenuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, kepegawaian yang efektif dan efisien	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Produk Peternakan	Persentase ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH	100	100	100	100	100
			Terkelolanya administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan (%).	100	100	100	100	100

**Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI I : Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi			
MISI 1 : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1) Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi, SDM dan Kelembagaan serta pengembangan usaha sektor peternakan	1) Meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak	1) Peningkatan produksi dan produktivitas ternak	1) Penurunan resiko inbreeding melalui Intensifikasi Kawin Alam (INKA). 2) Peningkatan angka kelahiran, memperpendek jarak kelahiran (calving interval) dan peningkatan bobot lahir. 3) Pengembangan teknologi pakan ternak dan pengawasan mutu pakan ternak. 4) Perbaikan mutu genetik sumber daya genetik ternak asli Kabupaten Tanah Laut (Kijang dan Kerbau Rawa). 5) Peningkatan kualitas bibit ternak melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB). 6) Penguatan prasarana dan sarana Inseminasi Buatan (IB). 7) Peningkatan penerapan teknik budidaya ternak yang baik (Good Farming Practice). 8) Peningkatan penerapan Public Awareness (kesejahteraan hewan) melalui sosialisasi kepada konsumen, peternak dan pelaku usaha.
		2) Peningkatan peran swasta dalam pengembangan usaha sektor peternakan	1) Pengembangan komponen agribisnis peternakan. 2) Peningkatan investasi, industrialisasi peternakan dan peran swasta melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber pembiayaan lainnya.
		3) Peningkatan Sumber Daya Manusia peternak dan pelaku usaha untuk menghasilkan produk	1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia peternak dan pelaku usaha peternakan
		4) Peningkatan promosi dan pemasaran produk hasil peternakan.	1) Perbaikan standarisasi produk peternakan dan sistem pendukung peternakan.
		5) Penerapan teknologi peternakan tepat guna yang ramah lingkungan.	1) Peningkatan prasarana dan sarana peternakan, baik sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran sehingga dapat bersaing dipasaran 2) Pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas dan pupuk organik yang ramah lingkungan
2) Menekan kejadian Penyakit Hewan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk peternakan melalui penanganan kesehatan hewan, pengawasan terhadap produk peternakan dan penanganan Pasca Panen serta Pengolahan Hasil Peternakan	1) Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	1) Peningkatan pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis	1) Penguatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan hewan (Puskesmas dan Check Point). 2) Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui pengobatan, dan vaksinasi.
	2) Meningkatnya Pengawasan Terhadap Produk Peternakan	1) Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas ternak dan produk hasil peternakan	1) Peningkatan pengawasan lalu lintas ternak. 2) Peningkatan pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner.

3) Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan serta pemenuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, kepegawaian yang efektif dan efisien.	1) Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran, dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan.	1) Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana perkantoran dan kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2) Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.	1) Peningkatan pengelolaan dan pemenuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, dan kepegawaian yang efektif dan efisien. 1) Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2) Meningkatkan mekanisme pengumpulan, pemutakhiran data dan informasi sektor peternakan yang lengkap, akurat dan kontinyu.
---	---	---	---

MISI 2 : Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1) Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi, SDM dan Kelembagaan serta pengembangan usaha sektor peternakan	1) Meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak	1) Pengembangan peternakan dengan pendekatan kawasan dan komoditas unggulan, melalui Pemanfaatan lahan secara optimal dengan pola simbiosis mutualisme antara ternak dengan tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan dan eks tambang.	1) Pengembangan pola integrasi sapi dengan tanaman. 2) Pengembangan kawasan peternakan.
		2) Adopsi dan inovasi pengembangan dan pengolahan pakan ternak berkualitas.	1) Kajian dan pelatihan pengolahan pakan ternak yang berkualitas dengan bahan baku yang tersedia di Kabupaten Tanah Laut.
		3) Pengembangan usaha pengolahan limbah peternakan	1) Kajian dan pelatihan pengolahan limbah peternakan. 2) Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Kode (3)	Program dan Kegiatan (4)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) (5)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017) (6)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (17)
						Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	
		3.03.3.03.02.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah (Unit)	1	Unit	500,000,000									
		3.03.3.03.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah (Unit)	0	0	-									
		3.03.3.03.02.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah (Buah/unit)	0	0	-									
		3.03.3.03.02.02.10	Pengadaan Mebeuler	Jumlah (Buah)	0	0	-									
		3.03.3.03.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jenis	1	1	6,736,000									
		3.03.3.03.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis Pemeliharaan	3	3	67,500,000									
		3.03.3.03.02.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	0	0	-									
		3.03.3.03.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Unit	0	0	-									
		3.03.3.03.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	IKM	Cukup	Baik	-									
		3.03.3.03.02.03.05	Pengadaan Pakain Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Stell	0	0	-									
		3.03.3.03.02.03.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah Stell	0	0	-									
		3.03.3.03.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	IKM	Cukup	Baik	8,000,000									
		3.03.3.03.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN	0	2	8,000,000									
		3.03.3.03.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	BB	BB	3,709,950									
		3.03.3.03.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	5	5	3,709,950									
		4.03.3.03.02.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Keseuaian antara pagu Renstra dengan Renja		94.39	6,298,000									
		4.03.3.03.02.21.18	Penyusunan Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah Dokumen	7	7	6,298,000									
		TOTAL					3,382,479,625									

Pelihar, 12 Februari 2019
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan He

Ir. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020

Unit Kerja SKPD Penang gungjawab	Lokasi	
(18)	(19)	

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi, SDM dan Kelembagaan serta pengembangan usaha sektor peternakan				Produksi Daging (Ton)	9,009	10,500		11,000		11,500		12,000		12,500		57,500		
				Produksi Telur (Ton)	75,385	85,000		87,000		90,000		92,000		95,000		449,000		
	Meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak			Persentase Peningkatan Produksi Daging dan Telur Daging :	Kg													
				a. Sapi Potong	268,212	1		1.1		1.2		1.3		1.4		6		
				b. Kerbau	50,204	1		1		1		1		1		5		
				c. Kambing	12,608	1		1.2		1.3		1.4		1.5		6.4		
				d. Domba	408	1.1		1.2		1.3		1.4		1.5		6.5		
				e. Ayam Buras	500,787	1		1		1		1		1		5		
				f. Ayam Ras Petelur	1,244,736	1		1		1		1		1		5		
				g. Ayam Ras Pedaging	6,859,018	1.1		1.2		1.3		1.4		1.5		6.5		
				h. Itik	70,958	1		1		1		1		1		5		
				Telur :														
				a. Ayam Buras	2,055,704	1		1.5		2		2.5		3		10		
				b. Ayam Ras Petelur	72,008,607	1		1.2		1.3		1.4		1.5		6.4		
				c. Itik	1,318,854	1		1.2		1.3		1.4		1.5		6.4		
		3.03.3.03.02.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi Ternak				90,000	840,000,000	93,000	1,360,000,000	96,000	1,460,000,000	99,000	1,560,000,000	99,000		
				a. Sapi Potong	75,642	87,000		90,000		93,000		96,000		99,000		99,000		
				b. Sapi Perah	24	30		35		40		45		50		50		
				c. Kerbau	3,641	3,787		3,969		4,187		4,442		4,733		4,733		
				d. Kambing	20,829	22,079		23,537		25,203		27,078		29,161		29,161		
				e. Ayam Buras	2,512,527	2,663,279		2,688,404		2,713,529		2,738,654		2,763,780		2,763,780		
				f. Ayam Ras Petelur	6,857,963	7,269,441		7,338,020		7,406,000		7,475,180		7,543,759		7,543,759		
				g. Ayam Ras Pedaging	51,365,593	54,447,528		54,961,154		55,474,840		55,988,496		56,502,152		56,502,152		
				h. Itik	192,333	198,103		200,026		201,950		203,873		205,796		205,796		
		3.03.3.03.02.22.03.	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Jumlah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat				750,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000		
				a. Sapi Potong (Ekor)	10	23		25		25		25		25		123		
				b. Kambing (Ekor)	0	35		35		35		35		35		175		
				c. Itik (Ekor)	0	4000		4000		4000		4000		4000		20000		
			Penelitian, Pengolahan dan pengembangan pakan ternak	Jumlah penyebaran bibit rumput (Ha)	10			1	40,000,000		1	60,000,000		1	60,000,000		4	
				Jumlah pemeliharaan demplot pakan (Ha)	0.5			2		2		2		2		8		
				Jumlah sampel pakan ternak yang layak (Sampel)	5			8		8		8		8		32		
			Pendistribusian semen bibit ternak unggul dan pelaksanaan Inseminasi buatan	Jumlah intensifikasi IB (Dosis)	10000	10000		10000	50,000,000	10000	550,000,000	10000	650,000,000	10000	750,000,000	50000		
				Jumlah angka kelahiran ternak sapi potong (Ekor)	5600	5600		5800		6000		6200		6400		30000		
			Program Pembinaan dan pengembangan potensi desa	Jumlah berkembangnya Desa kawasan ternak	0	0		1	50,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	4		
			Pembinaan dan pengembangan desa produksi ternak	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Desa Produksi Ternak Sapi Potong (Desa)	0	0		0	50,000,000	1	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	1		
				Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Desa Produksi Ternak Kerbau Rawa (Desa)	0	0		0		0		1		0		1		
				Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Desa Produksi Ternak Kambing (Desa)	0	0		0		0		0		1		1		
				Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Desa Produksi Ternak Itik (Desa)	0	0		1		0		0		0		1		
			Program Kelembagaan Usaha Prasarana dan sarana	Persentase pelaku usaha binaan bermitra dengan pihak lain	5			2	710,000,000	3	735,000,000	4	740,000,000	5	745,000,000	15		
				Persentase poktan yang dapat mengembangkan usahanya	10			3		4		5		6		20		
				Jumlah data dan informasi peternakan yang terkelola dengan baik (Dok)	1			1		1		1		1		5		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana peternakan	100		100		100		100		100		100	100			
			Peningkatan SDM dan Kemampuan Lembaga Petani Ternak	Jumlah Petani dan Peternak terlatih (orang)	120		130	90,000,000	140	95,000,000	150	100,000,000	160	105,000,000	580				
				Jumlah Penilaian Kelompok Tani berprestasi (kali) (Kecamatan)	11		11		11		11		11		11	11			
			Pengembangan data dan Informasi	Jumlah Terkelolanya data dan informasi sektor peternakan (Dok)	1		1	30,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1		
			Usaha, agribisnis dan Promosi hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah Petani yang mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUT/S/K)	100		75	90,000,000	75	100,000,000	75	100,000,000	75	100,000,000	375				
				Jumlah Pelaku Usaha yang bermitra dengan pihak lain	15		4		6		8		10		30				
				Jumlah kontes ternak terlaksana (Kali)	0		1		1		1		1		4				
				Jumlah produksi peternakan yang dapat dipasarkan (Produk)	5		5		5		5		5		25				
				Jenis informasi pasar atas hasil produksi peternakan yang akurat dan dapat diakses (Informasi)	12		12		12		12		12		60				
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Peternakan	Jenis pengadaan sarana dan prasarana peternakan	1		5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	24				
Menekan kejadian Penyakit Hewan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk peternakan melalui penanganan kesehatan hewan, pengawasan terhadap produk peternakan dan penanganan Pasca Panen serta Pengolahan Hasil Peternakan				Intensitas pelayanan kesehatan hewan (Ekor)	5,000	6,000	6,200	7,300	7,400	8,500	35,400								
				Pangan asal hewan yang ASUH (%)	100	100	100	100	100	100									
Meningkatnya Status Kesehatan Hewan				Persentase Status Kesehatan Hewan	81	82	83	84	85	85									
				Persentase ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH	100	100	100	100	100	100									
Meningkatnya Pengawasan Terhadap Produk Peternakan dan penanganan Pasca Panen serta Pengolahan Hasil Peternakan			Program Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Angka kematian ternak			95,000,000	275,000,000	300,000,000	335,000,000									
				a. Sapi Potong	1.0	1	1	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
				b. Sapi Perah	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				c. Kerbau	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
				d. Kambing	0.3	0.3	0.25	0.24	0.22	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
				e. Ayam Buras	4.5	3	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	
				f. Ayam Ras Petelur	3.0	3	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	
				g. Ayam Ras Pedaging	3.1	5	4.5	4	3.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
				h. IZK	7.0	7	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
				Persentase produk kesehatan hewan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Persentase pelayanan kesehatan hewan	6.2	6.5	6.5	6.7	6.7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	33.4
3.03.3.03.02.21.02	Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak			Jumlah Vaksinasi Ternak Sapi (Ekor)	21250	3000	3250	40,000,000	3300	150,000,000	3350	175,000,000	3400	200,000,000	16300				
				Jumlah Vaksinasi Ternak Unggas (Ekor)		2500	2750		2800		2850		2900		13800				
				Jumlah Pengobatan Ternak Sapi (Ekor)		3000	3250		3300		3350		3400		16300				
3.03.3.03.02.21.07	Penyidikan dan Pemeriksaan Penyakit Ternak			Jumlah penyidikan dan pemeriksaan specimen/ sampel			25,000,000		40,000,000		40,000,000		50,000,000						
				a. Ulas Darah	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1000				
				b. Feces	750	400	400	400	400	400	400	400	400	2000					
				c. Organ	0	5	7	8	9	10	10	10	10	39					
				d. Serum	500	400	400	400	400	400	400	400	400	2000					
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan (Dok)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Terlaksananya Pemetaan Penyakit Hewan di Kab. Tanah Laut (Dok)	0	1		1		1		1		1		5		
		3.03.3.03.02.21.10	Pengendalian Penyakit Zoonosa dan Penyediaan Pangan Asal Hewan Yang ASUH	Jumlah Vaksinasi Rabies (Dosis/Ekor), Jumlah pengambilan specimen sampel produksi hasil ternak (daging sapi), Jumlah pengambilan specimen sampel produksi hasil ternak (daging ayam), Jumlah Sosialisasi NKV (Kali), Jumlah Pengawasan Hewan Qurban (Kecamatan), Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi Pasar Hewan dan RPH (Dok)	500 25 100 1 11 0	500 25 75 1 11 1		600 25 75 2 11 1	30,000,000	650 25 100 3 11 1	85,000,000	700 25 125 4 11 1	85,000,000	750 25 150 5 11 1	85,000,000	3200 125 525 15 11 5		
		3.03.3.03.02.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Pengembangan dan Peningkatan Mutu serta Kualitas Produksi hasil Peternakan (Produk) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Peternakan	16 14		8 4	40,000,000	12 6	50,000,000	16 8	55,000,000	20 10	60,000,000	56 30			
				Jumlah produk yang dapat dikembangkan (Produk) Jumlah produk hasil peternakan yang kualitasnya meningkat (Produk)	2 2	2 2		4 4	40,000,000	6 6	50,000,000	8 8	55,000,000	10 10	60,000,000	30 30		
Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan serta pemenuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, dan kepegawaian yang				Terkelolanya administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan (%).	100		100		100	100		100		100		100		
	Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan.			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	B	BB		BB		BB		BB		A		A		
		3.03.3.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM		CUKUP		BAIK	1,229,000,000	BAIK	1,485,000,000	BAIK	1,500,000,000	SANGAT BAIK	1,510,000,000	BAIK		
		3.03.3.03.02.01.20	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Jumlah PTT (Orang)	27	27		27	600,000,000	30	660,000,000	30	675,000,000	30	685,000,000	1		
			Penyediaan jasa, bahan, perabotan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah Jasa Surat Menyurat (Kali) Jenis Rekening Terbayar Jumlah KIR dan perizinan kendaraan dinas/operasional terbayar (Buah/Unit) Jumlah jasa transaksi keuangan terbayar (Kali) Jumlah Materai Terbeli (Lembar) Jenis peralatan dan kelengkapan kebersihan yang dibeli Jumlah perabotan kerja yang diperbaiki (Buah/Unit) Jenis ATK terbeli Jenis jasa cetak Jumlah tersedianya jasa penggandaan (Lembar) Jumlah tersedianya bahan bakar (liter) Jumlah tersedianya komponen listrik (Jenis) Jumlah tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan (Eksampler)	20 5 15 20 200 15 60 25 12 10000 200 5 1	0 5 15 20 200 15 60 22 12 10000 200 5 1		20 5 15 20 200 15 30 25 12 10000 200 5 1	304,000,000	20 5 15 20 200 15 30 25 12 10000 200 5 1	350,000,000	20 5 15 20 200 15 40 25 12 10000 200 5 1	350,000,000	20 5 15 20 200 15 40 25 12 10000 200 5 1	350,000,000	80 25 75 100 1000 75 200 122 60 50000 1000 25 5		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah makan dan minum rapat (Orang)	720	740		750		750		800		800		3840		
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Jumlah SPPD Luar Daerah (Orang)	1	40		40	325,000,000	40	475,000,000	40	475,000,000	40	475,000,000	200		
				Jumlah SPPD Dalam Daerah (Orang)	1	430		450		500		500		500		2380		
			Program Pemenuhan dan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM				BAIK	1,232,000,000	BAIK	1,242,000,000	BAIK	894,000,000	SANGAT BAIK	847,000,000	SANGAT BAIK		
			Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah terbelinya kendaraan Dinas/Operasional (%/Unit Roda 2/Roda 4) (Unit)	0	0		1	350,000,000	1	250,000,000	1	60,000,000	1	25,000,000	4		
				Jenis Perengkapan Gedung Kantor	0	5		5		5		5		5		25		
				Jenis peralatan dan perengkapan kantor terbeli	0	5		10		10		10		10		45		
				Jumlah Pengadaan Mebeuler (Buah)	0	0		60		10		0		1		71		
			Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jenis pemeliharaan gedung kantor	2	7		2	95,000,000	2	105,000,000	2	110,000,000	2	115,000,000	15		
				Jumlah perbaikan peralatan kerja (Buah/Unit)	10	60		15		15		15		15		120		
				Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3	3		3		3		3		3		15		
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Gedung (Unit)	0	1		1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	5		
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Paket/Tahun)	0	0		1	350,000,000	1	450,000,000	0	350,000,000	0	250,000,000	2		
			Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah ASN (Orang)	0	2		3	12,000,000	3	12,000,000	3	24,000,000	3	32,000,000	14		
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu terbeli (Steel)	0	0		72	75,000,000	0	75,000,000	72		0	75,000,000	144		
				Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Steel)	0	0		72		0		72		0		144		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Nilai SAKIP	BB			BB	12,750,000	BB	20,500,000	BB	21,000,000	BB	21,000,000	BB		
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Jumlah Tersusunnya Dokumen Perencanaan (Dok)	7	6		7	6,500,000	7	7,000,000	7	7,500,000	7	7,500,000	34		
			Penyusunan laporan keuangan	Jumlah Tersusunnya Laporan Keuangan (Dok)	1	0		1	2,500,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	4		
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah penyusunan sistem pelaporan kinerja yang akuntabel (Dok)	5	7		5	3,750,000	5	7,500,000	5	7,500,000	5	7,500,000	27		
				Jumlah Aset BMD tercatat (Dok)	24			24		24		24		24		24		
			Program Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan SKPD	IKM				BAIK	90,000,000	BAIK	100,000,000	BAIK	105,000,000	SANGAT BAIK	115,000,000	SANGAT BAIK		
			Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan	Jumlah Terikutinya Pameran Pembangunan (Kali)	5	0		5	50,000,000	5	60,000,000	5	60,000,000	5	70,000,000	20		
			Pembuatan sistem informasi SKPD	Tersedianya sistem informasi SKPD (Sistem)	1	0		1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	4		
			Fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah	Jumlah terlaksananya fasilitasi pemasaran produk peternakan daerah (Kali/Tahun)	0	0		1	25,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	4		
			TOTAL					4,298,750,000		5,327,500,000		5,135,000,000		5,255,000,000				

Bekihari, Februari 2019
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Ir. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

17	Persentase pelayanan kesehatan hewan	6.20	-	6.50	6.70	6.70	7.00	7.00
18	Jumlah Pengembangan dan Peningkatan Mutu serta Kualitas Produksi hasil Peternakan	16.00	-	8.00	12.00	16.00	20.00	56.00
19	IKM terhadap pelayanan administrasi Perkantoran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		CUKUP					
	IKM terhadap pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian dan Perkantoran ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
20	IKM terhadap pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		CUKUP	-	-	-	-	100.00
21	IKM terhadap peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		CUKUP	-	-	-	-	-
22	IKM terhadap peningkatan Kompetensi ASN yang dipersyaratkan		CUKUP	-	-	-	-	100.00
23	IKM terhadap pemenuhan dan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
24	Nilai SAKIP SKPD	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
26	Kesesuaian antara pagu Renstra dengan Renja		94,39	-	-	-	-	100.00
28	IKM terhadap penyebaran Informasi dan Pelayanan SKPD			BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

**POHON KINERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

ESS II

KEPALA DINAS
KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak
2 Meningkatnya Status Kesehatan Hewan
3 Meningkatnya Pengawasan Terhadap Produk Peternakan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Persentase Peningkatan Produksi Daging dan Telur
2 Persentase Status Kesehatan Hewan
3 Persentase ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH

ESS III

SEKRETARIAT
KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 IKM terhadap pelayanan administrasi Perkantoran/Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2 IKM terhadap pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian dan Perkantoran ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 IKM terhadap pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4 IKM terhadap peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5 IKM terhadap peningkatan Kompetensi ASN yang dipersyaratkan
6 IKM terhadap pemenuhan dan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
7 Nilai SAKIP SKPD
8 Kesesuaian antara pagu Renstra dengan Renja
9 IKM terhadap perluasan Informasi dan Pelayanan SKPD

BIDANG PERBIBITAN, PRODUKSI DAN PAKAN TERNAK
KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya Populasi ternak
2 Berkembangnya Desa kawasan ternak
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Populasi Ternak
2 Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Desa Produksi Ternak

BIDANG KESWAN, KESMAVET, PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL
KINERJA UTAMA
1 Menurunnya angka kematian ternak
2 Meningkatnya ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH
3 Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan
4 Meningkatnya mutu dan kualitas hasil produksi peternakan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Persentase penurunan angka kematian ternak
2 Persentase produk hasil ternak yang sehat
3 Persentase pelayanan kesehatan hewan
4 Jumlah Pengembangan dan Peningkatan Mutu serta Kualitas Produksi hasil Peternakan

BIDANG KELEMBAGAAN, USAHA, PRASARANA DAN SARANA
KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya pengembangan usaha peternakan
2 Meningkatnya pengembangan lembaga, data dan informasi sektor peternakan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Persentase pelaku usaha binaan bermitra dengan pihak lain
2 Persentase poktan yang dapat mengembangkan usahanya
3 Jumlah data dan informasi peternakan yang dikelola dengan baik
4 Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana peternakan

ESS IV

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KINERJA UTAMA
1 Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana administrasi perkantoran
2 Menyusun data kepegawaian, evaluasi dan administrasi kepegawaian SKPD Dinas Peternakan dan Keswan
3 Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM
4 Menyusun dan merencanakan kebutuhan aset Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
INDIKATOR KINERJA
1 Jumlah Jasa Surat Menyurat (Kali)
2 Jenis Rekening Terbayar
3 Jumlah KIR dan perizinan kendaraan dinas/operasional terbayar (Buah/Unit)
4 Jumlah jasa transaksi keuangan terbayar (Kali)
5 Jumlah Materai Terbeli (Lembar)
6 Jenis peralatan dan kelengkapan kebersihan yang dibeli
7 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (Buah/Unit)
8 Jenis ATK terbeli
9 Jenis jasa cetak
10 Jumlah tersedianya jasa penggandaan (Lembar)
11 Jumlah tersedianya bahan bakar (liter)
12 Jumlah tersedianya komponen kelistrikan (Jenis)
13 Jumlah tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan (Eksampler)
14 Jumlah makan dan minum rapat (Orang)
15 Jumlah SPPD Luar Daerah (Orang)
16 Jumlah SPPD Dalam Daerah (Orang)
17 Jumlah terbelinya kendaraan Dinas/Operasional (%/Unit Roda 2/Roda 4) (Unit)
18 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
19 Jenis peralatan dan perlengkapan kantor terbeli
20 Jumlah Pengadaan Mebeuler (Buah)
21 Jenis pemeliharaan gedung kantor
22 Jumlah perbaikan peralatan kerja (Buah/Unit)
23 Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
24 Jumlah Pembangunan Gedung (Unit)
25 Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Paket/Tahun)
26 Jumlah ASN (Orang)
27 Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu terbeli (Steel)
28 Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Steel)
29 Jumlah Terkutinya Pameran Pembangunan (Kali)
30 Tersedianya sistem informasi SKPD (Sistem)
31 Jumlah terlaksananya fasilitasi pemasaran produk peternakan daerah (Kali/Tahun)

KASUBBAG PERENC. KEUANGAN DAN EVALUASI
KINERJA UTAMA
1 Menyusun perencanaan, Keuangan dan Evaluasi yang berkualitas
2 Menyusun pelaporan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akuntabel
INDIKATOR KINERJA
1 Jumlah Tersusunnya Dokumen Perencanaan (Dok)
2 Jumlah Tersusunnya Laporan Keuangan (Dok)
3 Jumlah penyusunan sistem pelaporan kinerja yang akuntabel (Dok)

KASI KESEHATAN HEWAN
KINERJA UTAMA
1 Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan
2 Melaksanakan penyidikan dan pemeriksaan penyakit ternak
3 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
1 Jumlah pengobatan dan vaksinasi
2 Jumlah penyidikan dan pemeriksaan spesimen/sampel (ulas darah, feces, organ dan serum)
3 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan
4 Terlaksananya Pemetaan Penyakit Hewan di Kab. Tanah Laut

KASI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
KINERJA UTAMA
1 Melaksanakan Pengendalian Penyakit Zoonosa dan Pengawasan produk asal hewan
2 Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pasar Hewan dan RPH
INDIKATOR KINERJA
1 Jumlah Vaksinasi Rubies
2 Jumlah pengambilan specimen sampel produksi hasil ternak (Daging Sapi dan Daging Ayam)
3 Jumlah Sosialisasi NKV (Kali)
4 Jumlah Pengawasan Hewan Qurban (Kecamatan)
5 Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi Pasar Hewan dan RPH (Dok)

KASI PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL
KINERJA UTAMA
1 Melaksanakan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
INDIKATOR KINERJA
1 Jumlah produk pasca panen hasil peternakan yang dapat dikembangkan
2 Jumlah produk hasil peternakan yang kualitasnya meningkat

KASI BUDIDAYA TERNAK
KINERJA UTAMA
1 Melaksanakan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
2 Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
INDIKATOR KINERJA
1 Jumlah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
2 Jumlah aset ternak daerah yang bergulir dimasyarakat
3 Jumlah aset ternak yang telah dikembalikan ke daerah

KASI PERBIBITAN TERNAK
KINERJA UTAMA
1 Melaksanakan Peningkatan kualitas bibit ternak
INDIKATOR KINERJA
1 Jumlah Intensifikasi IB
2 Jumlah angka kelahiran ternak sapi potong

KASI PAKAN TERNAK
KINERJA UTAMA
1 Melaksanakan Peningkatan luas tanam, pendistribusian dan pengujian sampel Pakan Ternak
INDIKATOR KINERJA
1 Jumlah penyebaran bibit rumput
2 Jumlah pemeliharaan demplot pakan ternak
3 Jumlah sampel pakan ternak yang layak

KASI PRASARANA DAN SARANA
KINERJA UTAMA
1 Melaksanakan Penyediaan, Pengadaan dan Pendistribusian sarana dan prasarana peternakan
INDIKATOR KINERJA
1 Jenis penyediaan, pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana peternakan

KASI USAHA, PROMOSI DAN INVESTASI
KINERJA UTAMA
1 Melaksanakan pengembangan Usaha, agribisnis dan Promosi hasil produksi peternakan unggulan daerah
INDIKATOR KINERJA
1 Jumlah Petani yang mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUS/TK)
2 Jumlah Pelaku Usaha yang bermitra dengan pihak lain
3 Jumlah kontes ternak terlaksana (Kali)
4 Jumlah produksi peternakan yang dapat dipasarkan (Produk)
5 Jenis informasi pasar atas hasil produksi peternakan yang akurat dan dapat diakses (Informasi)

1
2
3
1
2
3

ASI SDM, KELEMBAGAAN, DATA DAN INFORMASI

KINERJA UTAMA

Melaksanakan pelatihan dan pembinaan kelompok tani
Melaksanakan pembinaan kelembagaan kelompok tani
Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sektor peternakan

INDIKATOR KINERJA

Jumlah kelompok tani terlatih
Jumlah kelompok tani ternak berprestasi
Jumlah Terkelolanya data dan informasi sektor peternakan

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN EVALUASI

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG KELEMBAGAAN, USAHA, PRASARANA DAN SARANA

BIDANG PERREBTAN, PRODUKSI DAN PAKAN

BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL

SEKSI PRASARANA DAN SARANA

SEKSI PERREBTAN TERNAK

SEKSI KESEHATAN HEWAN

SEKSI USAHA, PROMOSI DAN INVESTASI

SEKSI BUDIDAYA TERNAK

SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

SEKSI SDM, KELEMBAGAAN, DATA DAN INFORMASI

SEKSI PAKAN TERNAK

SEKSI PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL

UPT DINAS

BUPATI TANAH LAUT

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.3.3.15	Produksi Daging	(Kg)							
	- Sapi (%)	268,212	1	1	1.1	1.2	1.3	1.4	7
	- Kambing (%)	12,608	1	1	1.2	1.3	1.4	1.5	7.4
	- Babi (%)	8	1	1	1	1	1	1	6
2.3.3.16	Produksi daging unggas	(Kg)							
	- Ayam Kampung (%)	500,787	1	1	1	1	1	1	6
	- Ayam Petelur (%)	1,244,736	1	1	1	1	1	1	6
	- Ayam Pedaging (%)	6,859,018	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	7.5
	- Itik (%)	70,958	1	1	1	1	1	1	6
2.3.3.17	Produksi Telur	(Kg)							
	- Ayam Kampung (%)	2,055,704	1	1	1.5	2	2.5	3	11
	- Ayam Petelur (%)	72,008,607	1	1	1.2	1.3	1.4	1.5	7.4
	- Itik (%)	1,318,854	1	1	1.2	1.3	1.4	1.5	7.4
2.3.3.18	Jumlah peternak yang meningkat kapasitas melalui pelatihan (Orang)	120	120	150	210	270	300	360	1410
2.3.3.19	Jumlah kelembagaan peternak yang meningkat kapasitasnya (Klp)	30	6	6	6	6	6	6	36
2.3.3.20	NTP Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.21	Pertumbuhan PDRB Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.22	Luas kawasan peternakan yang dikembangkan (Kawasan)	4	-	-	1	1	1	1	4

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tanah Laut

Ir. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020